



Laporan 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla

DAFTAR ISI

PEMBANGUNAN MANUSIA MENUJU BANGSA PEMENANG 6

- 5 Aspek Pembangunan Manusia Pemerintahan Jokowi - JK 7
- Alokasi Anggaran untuk Pembangunan Manusia 8

BAGIAN I: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN DAYA SAING 9

- IKHTISAR 10

Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing 11

- Indeks Daya Saing Global Meningkat 11

Pengelolaan Makro Ekonomi 12

- Pertumbuhan Ekonomi Stabil 12
- Inflasi Terkendali 13
- Pengangguran Menurun 13
- Ketimpangan Pendapatan Menurun 14
- Kemiskinan Menurun 14
- Koordinasi Pengelolaan Fiskal dan Moneter 15
- Penerimaan Perpajakan 16
- Utang Pemerintah Dilakukan dengan Hati-hati 17

Deregulasi Ekonomi 18

- Langkah Maju Deregulasi 18
- *Online Single Submission* (OSS) 19
- Investasi 20
- Investasi Asing Menurut Negara Asal 21
- Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor 21

- Indonesia Layak Investasi 22
- Kemudahan Berusaha 22

Pengembangan Sumber Ekonomi Baru 23

- PDB Sektor Ekonomi Kreatif 23
- Pengembangan Ekonomi Kreatif 24
- Pengembangan Sektor Pariwisata 25
- Pariwisata Adalah Primadona 26
- Daya Saing Pariwisata Indonesia 26

Perbaikan Produktivitas 27

- Kualitas Investasi Meningkatkan 27
- Infrastruktur untuk Energi yang Andal dan Terjangkau 28
- Ketersediaan Infrastruktur Konektivitas 29
- Peningkatan Pemanfaatan Infrastruktur Konektivitas 30
- Ketersediaan Infrastruktur Telekomunikasi 31
- Ketersediaan Infrastruktur Mendukung Ketahanan Pangan 32
- Peningkatan Peran dan Daya Saing BUMN 33
- Revitalisasi Pendidikan Vokasi 34
- Pengakuan terhadap Kualitas Pendidikan Vokasi 35
- Pengembangan Riset dan Teknologi 36
- Penguatan Strategi Pemasaran Produk Indonesia 37
- Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan 38

- Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kepentingan Nasional 39
- Penguasaan Blok-blok Migas Besar 40
- Divestasi Freeport 41
- Realokasi Subsidi untuk Belanja yang Lebih Produktif 42
- Perbaikan Statistik Pangan 43
- Akses Permodalan 44
- Pembiayaan untuk Mereka yang Tak Terjangkau Perbankan 45

Ekonomi Maritim 46

- Peningkatan Kualitas SDM Maritim 46
- Bank Mikro Nelayan 47
- Penyediaan Akses Bahan Bakar Nelayan 47
- Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Laut 48
- Luas Kawasan Konservasi Perairan Laut Terus Meningkat 49

BAGIAN II: PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEBIJAKAN

AFIRMATIF 50

- IKHTISAR 51

Peningkatan Kesejahteraan dan Kebijakan Afirmatif 52

- Indeks Pembangunan Manusia 52

Pemenuhan Kebutuhan Dasar 53

- Pelaksanaan Jaminan Sosial 53
- Pelaksanaan Bantuan Sosial 54
- Jaminan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia 55
- Peningkatan Akses terhadap Fasilitas Kesehatan 56
- Mengabdikan Melalui Pelayanan Kesehatan 57
- Perbaikan Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak 58
- Kesehatan untuk Generasi Mendatang 59

- Peningkatan Kualitas Pendidikan 60
- Pengendalian Jumlah Kelulusan dan Putus Sekolah 61
- Partisipasi Pendidikan Meningkat 62
- Pemerataan Pendidikan 62
- Pembenahan Kualitas Guru 63
- Beasiswa untuk Mahasiswa Kurang Mampu yang Berprestasi 64
- Dukungan Beasiswa Pendidikan Tinggi 65
- Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja dan Buruh Migran 66
- Menyediakan Hunian Layak untuk Rakyat 67

Pemberdayaan 68

- Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kian Meningkat 68
- Perempuan Menjadi Pelaku Ekonomi 69
- Ruang Perlindungan Anak 70
- Penanganan Perdagangan Orang dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak 71
- Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas 72
- Paket Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 73
- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial 74
- Penanganan Konflik Reforma Agraria 75
- Penyelesaian Tata Ruang untuk Mendukung Infrastruktur Strategis Nasional 75

Keberpihakan 76

- Desa Semakin Makmur 76
- Meningkatkan Kegiatan Ekonomi dan Kualitas Hidup Masyarakat 77
- Perbaikan Tata Kelola Dana Desa 78
- Menciptakan Lapangan Kerja di Desa 79
- Pelayanan Haji 80
- Kesejahteraan Veteran dan Pensiunan PNS 81

BAGIAN III: PENGUATAN INDONESIA SENTRIS	82	Membangun Papua Untuk Kemakmuran Rakyat	100
▸ IKHTISAR	83	▸ Membangun Papua dan Papua Barat	100
Penguatan Indonesia Sentris	84	▸ Peningkatan Kualitas Hidup Rakyat Papua dan Papua Barat	101
▸ Proyek Strategis Nasional (PSN)	84	▸ Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas di Papua dan Papua Barat	102
Pemerataan Pembangunan Wilayah	85	▸ Penguatan Ekonomi dan Produktivitas Papua	103
▸ Menegakkan Kedaulatan di Perbatasan	85	BAGIAN IV: PENINGKATAN STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN, PENEGAKAN HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	104
▸ Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)	86	▸ IKHTISAR	105
▸ Menembus Keterisolasian Rakyat	87	Peningkatan Stabilitas Politik dan Keamanan, Penegakan Hukum, dan Tata Kelola Pemerintahan	106
▸ Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Perbatasan	88	▸ Indeks Demokrasi Indonesia	106
▸ Pemerataan Proyek Strategis Nasional	89	Stabilitas Politik dalam Negeri dan Diplomasi Internasional	107
▸ Memajukan Daerah Tertinggal	90	▸ Demokrasi yang Stabil	107
▸ Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	90	▸ Kepemimpinan dalam Diplomasi Internasional	108
▸ Terobosan Untuk Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	91	▸ Perdamaian Palestina dan Afghanistan	109
Mewujudkan Energi Berkeadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	92	▸ Diplomasi Ekonomi dan Dialog Antar-Peradaban	110
▸ Listrik untuk Rakyat	92	▸ Menjauhi Perang Dagang, Menawarkan Kolaborasi	111
▸ Lampu Surya Gratis Untuk Rakyat	93	▸ Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia	112
▸ Mewujudkan BBM Berkeadilan	94	Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Pemenuhan HAM	113
Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berpihak pada Rakyat	95	▸ Negara Hadir Menegakkan Hukum	113
▸ Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan	95	▸ Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terus Dibenahi	114
▸ Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan	96	▸ HAM dalam Indeks Negara Hukum	114
▸ Penurunan Jumlah Titik Panas	97	▸ Perlindungan HAM	115
▸ Upaya Restorasi Gambut	97		
▸ Mengelola Taman Nasional Bersama Rakyat	98		
▸ Tata Kelola dan Pemulihan Lahan Gambut	99		

Stabilitas Pertahanan dan Keamanan yang Terjaga 116

- Pemberantasan Narkoba 116
- Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme 117
- Kontribusi Industri Pertahanan Nasional 118
- Perkembangan *Minimun Essential Force II* 119
- Bela Negara untuk Tanah Air 120
- Tangguh Menanggulangi Kebencanaan 121
- Mandiri Mengatasi Bencana 122

Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional 123

- Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Perilaku Anti Korupsi 123
- Bersama Memberantas Korupsi 124
- Kinerja Birokrasi 125
- Perbaikan Tata Kelola Penerimaan ASN 126
- Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas 127
- Meningkatkan Pelayanan Lalu Lintas 128
- Peningkatan Pelayanan Mudik 2018 129

BAGIAN V: PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN PRESTASI BANGSA 130

- IKHTISAR 131

Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Bangsa 132

- Pemajuan Budaya 132
- Penetapan Warisan Budaya Takbenda 133
- Bangsa Besar Menuju Bangsa Pemenang 134

Pemajuan Budaya Maritim 135

- Penanaman Nilai-nilai Kemaritiman 135
- Pengembalian Peradaban Maritim 136

Prestasi Bidang Sains dan Teknologi 137

- Perkembangan Sains dan Teknologi Nasional 137
- Perolehan Medali di Kancah Internasional 138

Prestasi Bidang Olahraga 139

- Kesuksesan Penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018 139
- Prestasi Asian Games 2018 140
- Prestasi Asian Para Games 2018 141
- Kualitas Prajurit TNI-Angkatan Darat di Mata Dunia 142

Budaya Kewirausahaan 143

- Rasio Wirausaha Meningkatkan Pesat 143
- Membangun Budaya Wirausaha 144

Membangun Manusia Indonesia Menuju Negara Maju

“Membangun manusia Indonesia adalah investasi kita untuk menghadapi masa depan, dan melapangkan jalan menuju Indonesia maju. Kita siapkan manusia Indonesia menjadi manusia unggul sejak dalam kandungan sampai tumbuh mandiri, juga meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya.”

Presiden Joko Widodo

dalam Sidang Tahunan MPR RI, 16 Agustus 2018

Mengapa Pembangunan Manusia?

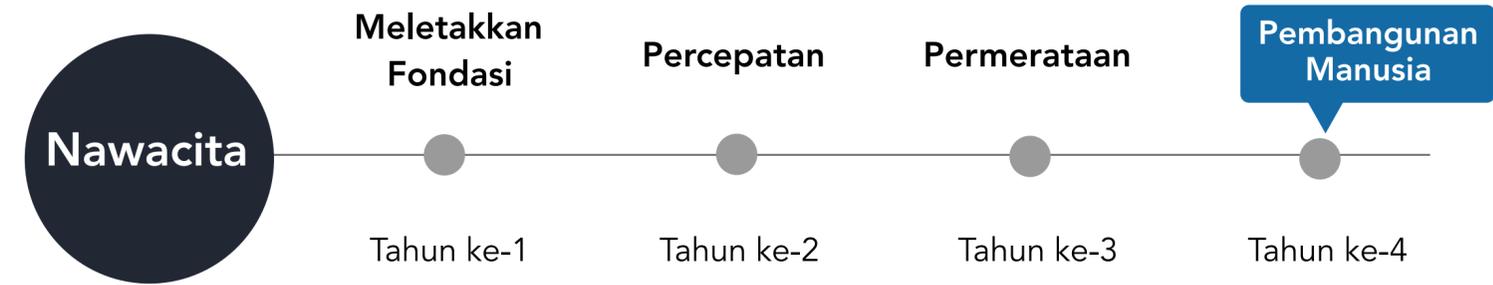


Setelah tahun-tahun sebelumnya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik dan ekonomi secara masif, berikut upaya pemerataan, Pemerintah kini menekankan pembangunan manusia Indonesia yang tangguh. Inilah titik pijak sekaligus fondasi utama Indonesia menuju negara maju.

Di tahun keempat, kita menghadapi tantangan eksternal yang besar yakni kondisi instabilitas perekonomian global. Pemerintah mengoptimalkan segala sumber daya dan peluang untuk memperkuat daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

Kita terus memperbaiki ketimpangan, baik ketimpangan pendapatan maupun antar-wilayah, menjaga stabilitas politik dan keadilan hukum serta meningkatkan prestasi di berbagai bidang.

Kita percaya bahwa penciptaan fondasi (tahun pertama), percepatan (tahun kedua) dan pemerataan (tahun ketiga) telah membangkitkan kepercayaan diri kita sebagai bangsa yang besar, yang akan terus bergerak maju dan menjadi bangsa pemenang. ■

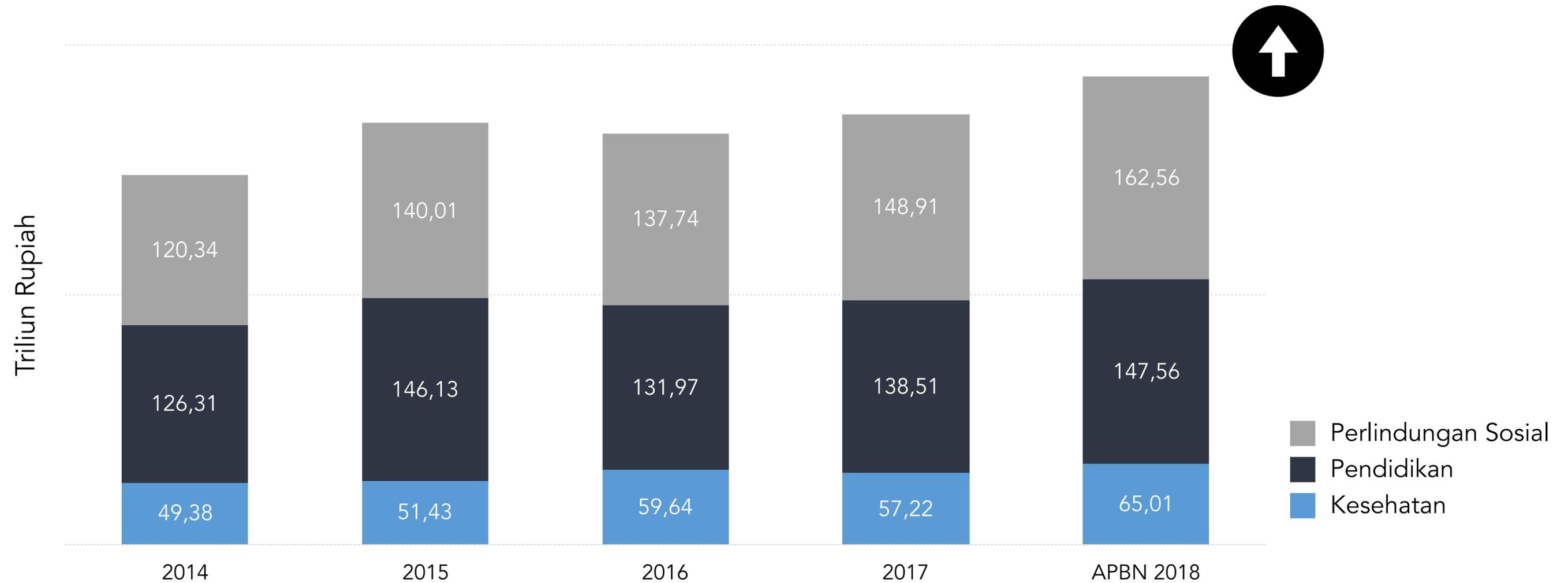


5 Aspek Pembangunan Manusia Pemerintahan Jokowi-JK



Alokasi Anggaran untuk Pembangunan Manusia

Sebagai komitmen untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran yang terkait langsung dengan pembangunan manusia, terutama kesehatan dan pendidikan.





Bagian I

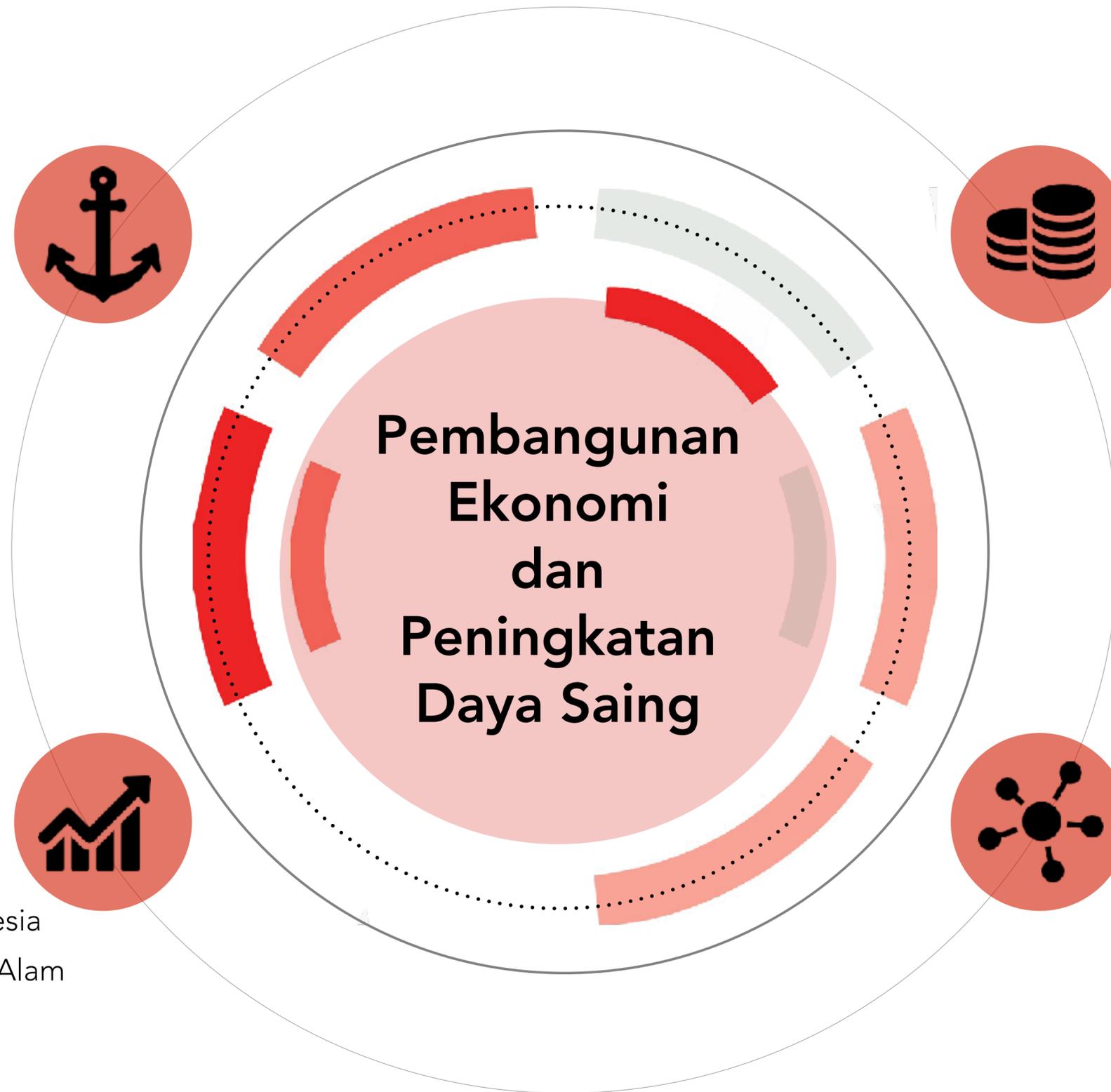
Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing

Ekonomi Maritim

- SDM Maritim
- Bank Mikro Nelayan
- Akses Bahan Bakar
- Konektivitas Laut
- Produksi Ikan

Perbaikan Produktivitas

- Kualitas Investasi
- Infrastruktur
- BUMN
- Vokasi
- Riset dan Teknologi
- Pemasaran Produk Indonesia
- Energi dan Sumber Daya Alam
- Statistik Pangan
- Permodalan

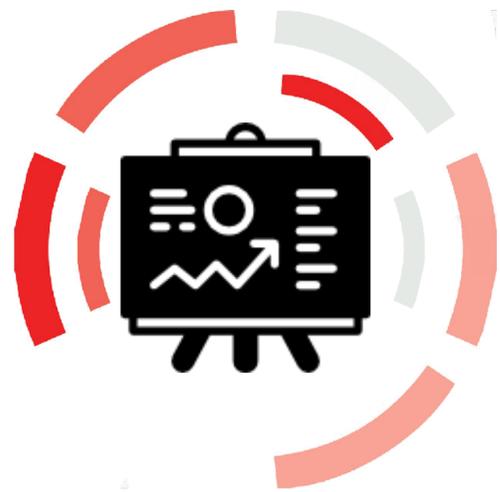


Deregulasi Ekonomi

- *Online Single Submission*
- Peningkatan Investasi
- *Ease of Doing Business*

Pengembangan Sumber Ekonomi Baru

- Ekonomi Kreatif
- Pariwisata



Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing

Stabilitas kondisi perekonomian menjadi salah satu kunci pembangunan manusia unggul. Untuk itu, Pemerintah menjaga dan mendorong perekonomian nasional serta meningkatkan daya saing nasional melalui terobosan-terobosan di berbagai bidang.

Tahun 2018 menjadi titik balik pembangunan ekonomi nasional. Tahun ini, perhatian lebih diberikan kepada pembangunan manusia. Alokasi anggaran untuk kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial terus digenjot. Meskipun ekonomi global berada dalam pusaran ketidakpastian, perekonomian Indonesia berdiri kokoh. Pertumbuhan ekonomi stabil. Angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan menurun. Harga-harga terkendali. Pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan hati-hati. Koordinasi antara Pemerintah dan otoritas moneter terus terjalin.

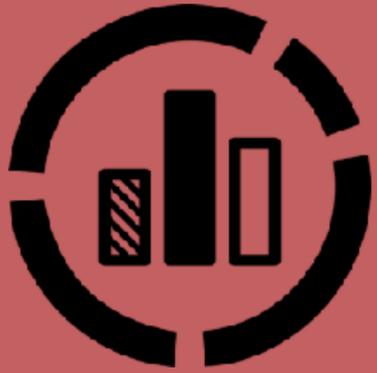
Stabilitas perekonomian Indonesia menjadi fondasi dari pembangunan lintas sektor. Tak cukup dengan itu, Pemerintah menciptakan insentif bagi pelaku ekonomi, mendorong reformasi di berbagai bidang, membangun sentra ekonomi baru, memperkuat poros maritim nasional, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Langkah-langkah tersebut diambil demi mengungkit daya saing sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa ini: menjadi bangsa pemenang. ■

Indeks Daya Saing Global Meningkat

Indeks Daya Saing Global Indonesia naik ke peringkat 45 dari 140 negara pada tahun 2018. Terus membaik, dibarengi dengan perbaikan struktur perekonomian nasional.



Ket: Sejak tahun 2018, penghitungan Indeks Daya Saing Global menggunakan metodologi baru



Pengelolaan Makro Ekonomi

Kendati menghadapi ketidakpastian global, dengan kerja keras dan kebijakan yang konsisten, indikator makroekonomi tetap terjaga dan terus menunjukkan peningkatan ke arah yang lebih baik.

Pencapaian ini adalah bukti komitmen kuat Pemerintah pada pembangunan Indonesia yang menyeluruh dan adil.

Kondisi makro ekonomi dikelola dengan baik dan hati-hati. Pertumbuhan ekonomi stabil pada kisaran 5% dan terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

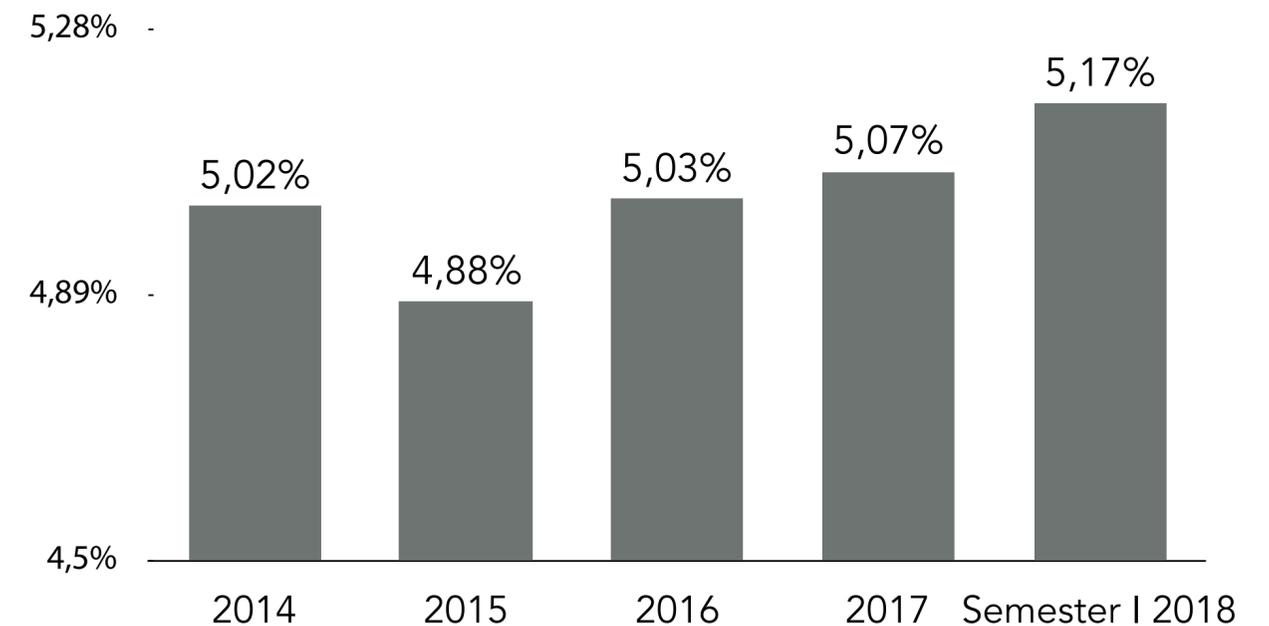
Angka pengangguran terus menurun mencapai 5,13%, dibarengi dengan peningkatan kesempatan kerja. Tingkat inflasi pada kisaran 3%, yang menjaga daya beli masyarakat dan memberi ruang bagi dunia usaha. Untuk pertama kalinya, angka kemiskinan berada pada level satu digit (9,82%). Diikuti dengan penurunan ketimpangan pendapatan yang konsisten. Rasio gini pada level 0,389.

Pengelolaan keuangan negara dilakukan berhati-hati. Defisit APBN dijaga di bawah 3% dari PDB. Utang Pemerintah dikelola untuk mendukung pembangunan program-program prioritas dan sektor produktif. Bersama otoritas moneter, Pemerintah mengambil langkah-langkah strategis terutama dalam menjaga nilai tukar rupiah dan mengatasi defisit neraca transaksi berjalan. ■

Pertumbuhan Ekonomi Stabil

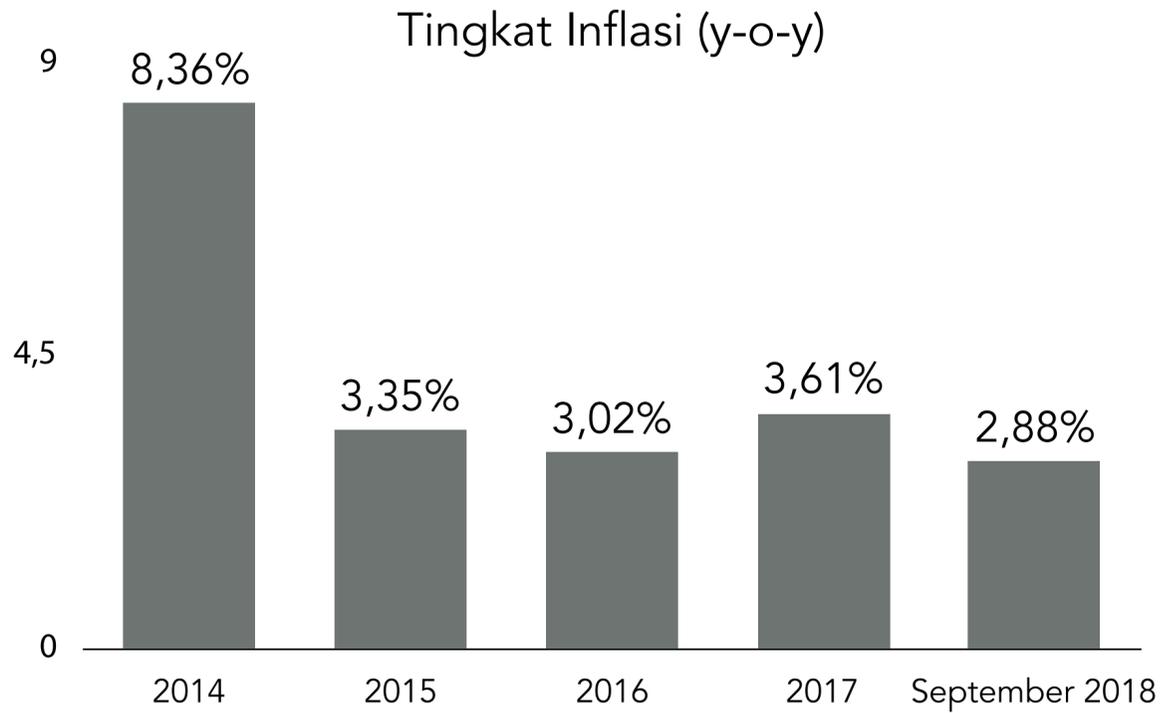
Ekonomi Indonesia tumbuh stabil pada kisaran 5 persen dan terus meningkat di tengah ketidakpastian kondisi global.

Pertumbuhan Ekonomi (y-o-y)



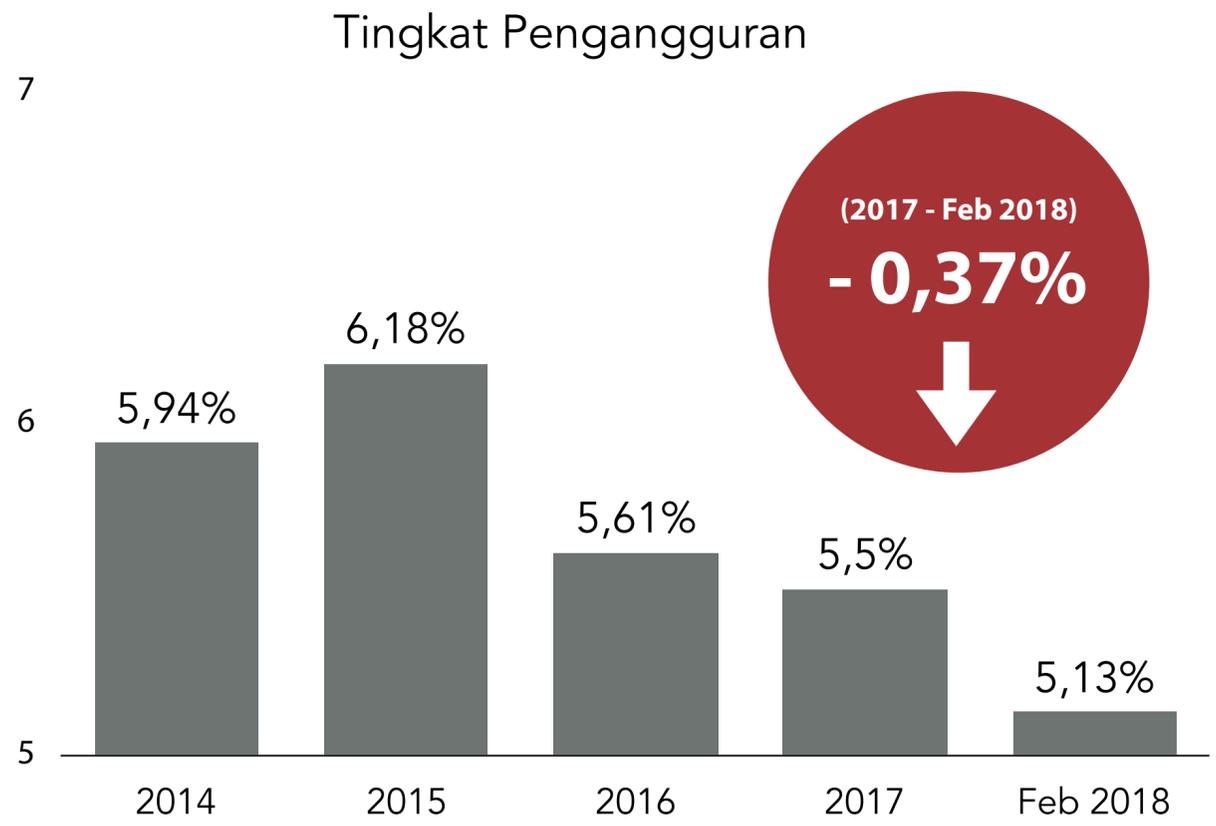
Inflasi Terkendali

Inflasi September 2018 2,88% (y-o-y). Terjaga lebih baik daripada target APBN 2018 yang sebesar 3,5%. Stabilitas harga terkendali untuk menjaga daya masyarakat dan memberi ruang gerak dunia usaha.



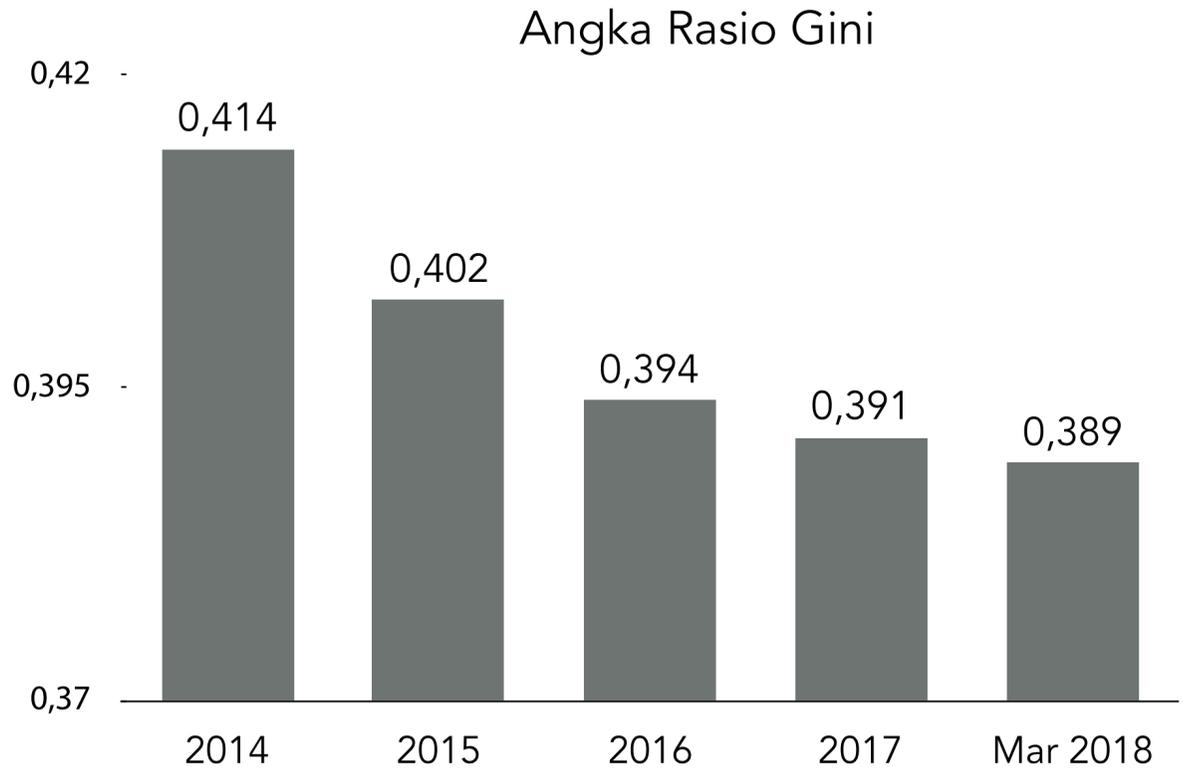
Pengangguran Menurun

Tingkat pengangguran terus menurun mencapai angka 5,13%, dibarengi dengan terbukanya kesempatan kerja.



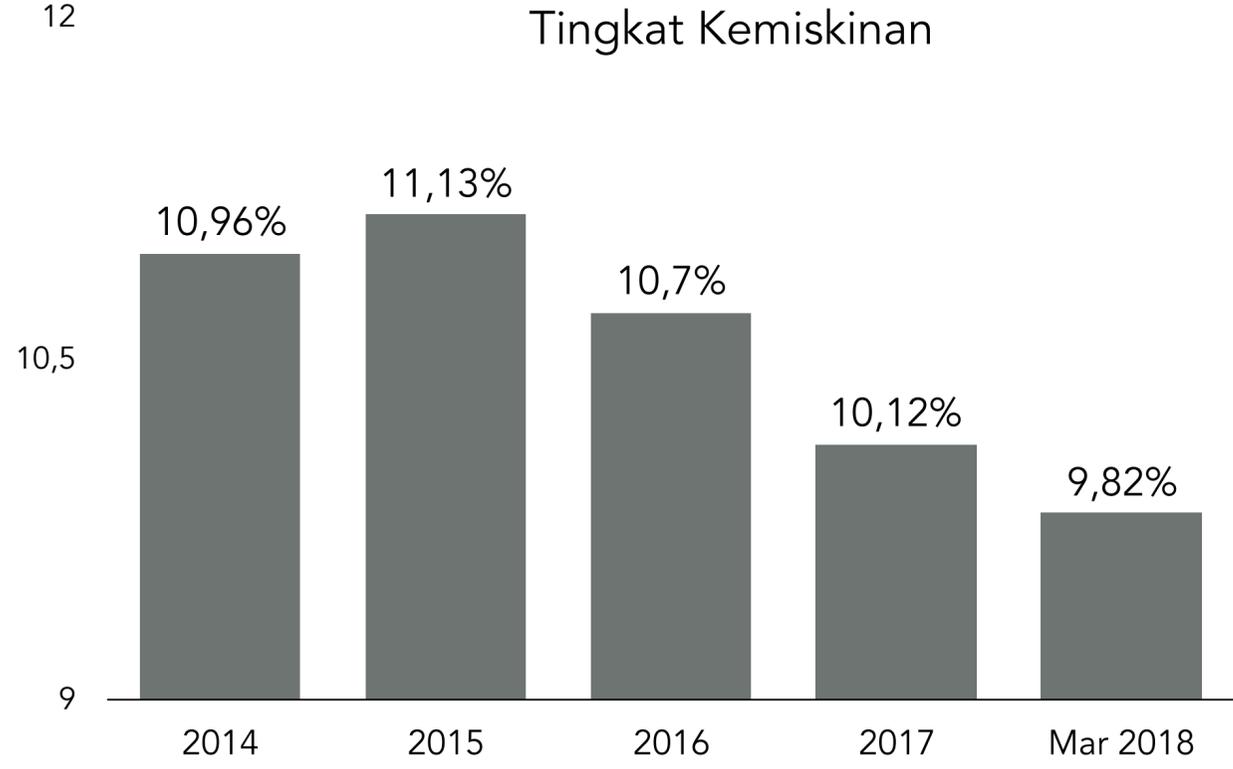
Ketimpangan Pendapatan Menurun

Secara gradual angka ketimpangan pendapatan terus menurun. Pemerataan terus membaik. Angka rasio gini mencapai 0,389 pada Maret 2018.



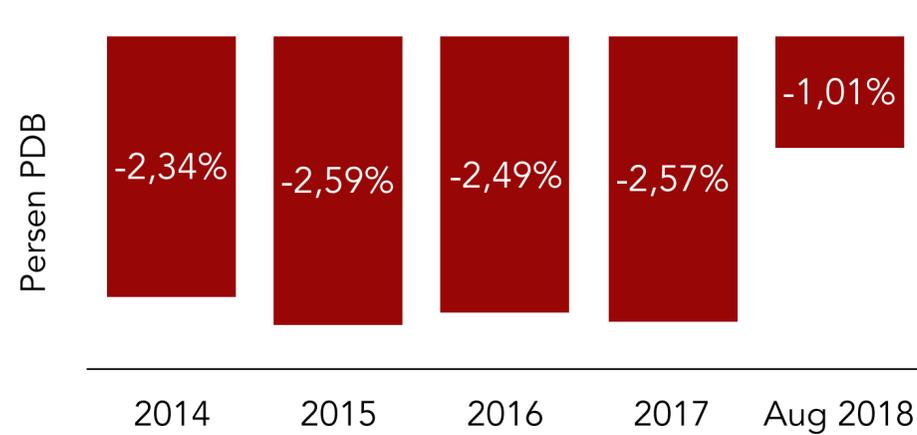
Kemiskinan Menurun

Untuk pertama kalinya dalam sejarah republik angka kemiskinan menurun hingga mencapai level satu digit. Pada Maret 2018 tingkat kemiskinan tercatat sebesar 9,82%.



Koordinasi Pengelolaan Fiskal dan Moneter

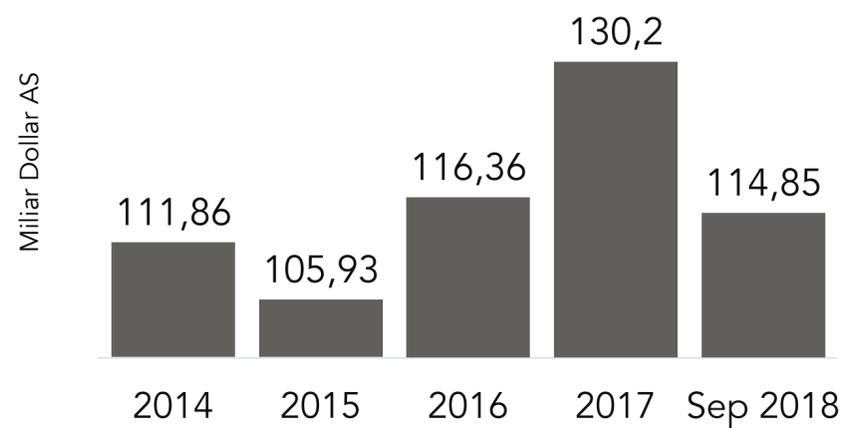
Melalui komunikasi dan koordinasi, sektor fiskal dan moneter dikelola dengan baik dan hati-hati oleh Pemerintah dan Bank Indonesia. Indikator strategis menunjukkan keuangan negara dan moneter berada dalam posisi aman dan terkendali.



Defisit APBN terkontrol. Dengan APBN yang ekspansif, defisit terjaga di bawah 3% dari PDB



Keseimbangan Primer APBN juga tercatat terus menurun. Kemandirian pada sumber pembiayaan domestik semakin baik.



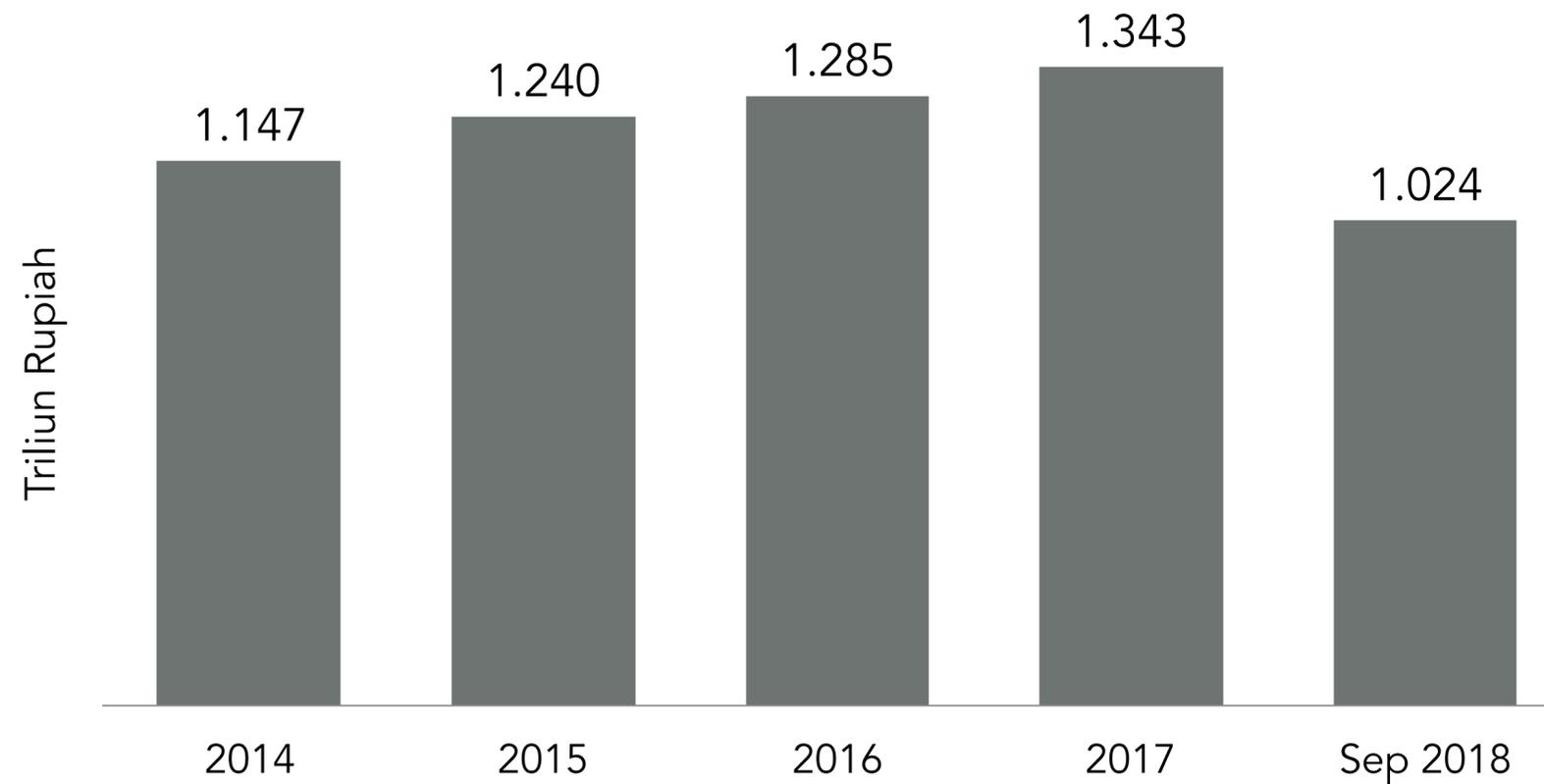
Cadangan devisa cukup membiayai impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah selama 6,3 bulan atau 2 kali lipat di atas standar internasional.



Defisit neraca transaksi berjalan tercatat terus dijaga di bawah 3% PDB.

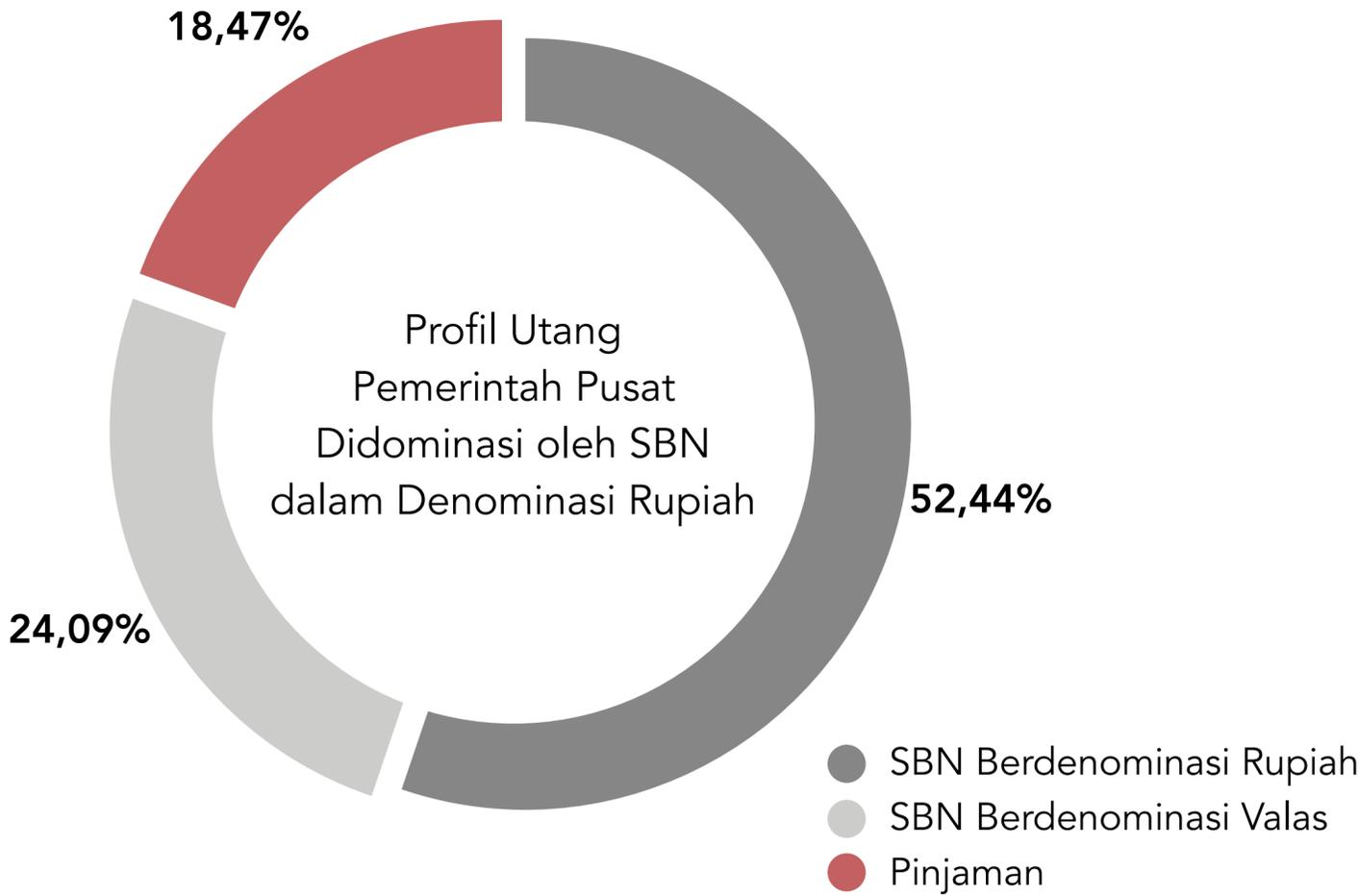
Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan sebagai sumber pembiayaan APBN yang paling utama menunjukkan tren meningkat meski kondisi ekonomi Indonesia dihadapkan dengan tekanan eksternal. Bukti ada perbaikan efektivitas pemungutan pajak oleh Pemerintah.

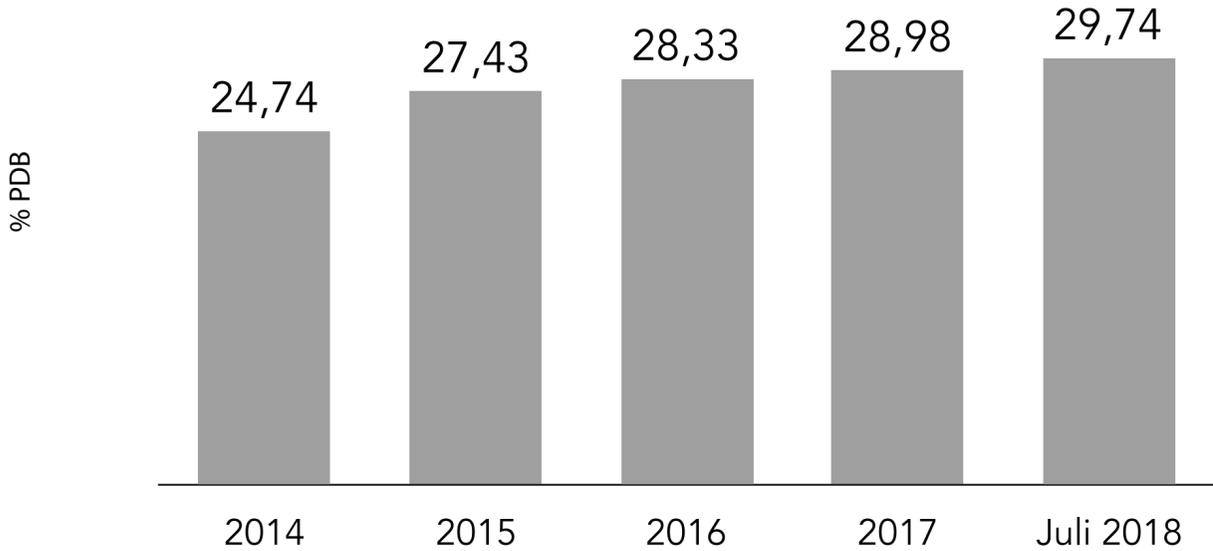


Utang Pemerintah Dikelola dengan Hati-Hati

Pemerintah mengelola utang dengan sangat hati-hati, dialokasikan untuk mendukung peningkatan belanja produktif. Rasio utang terhadap PDB dijaga di bawah batas psikologis 30% PDB, dan berada jauh di bawah amanat Undang-undang Keuangan Negara maksimal sebesar 60% PDB.



Rasio Utang Pemerintah Pusat terhadap PDB



Sumber: Kementerian Keuangan



Deregulasi Ekonomi

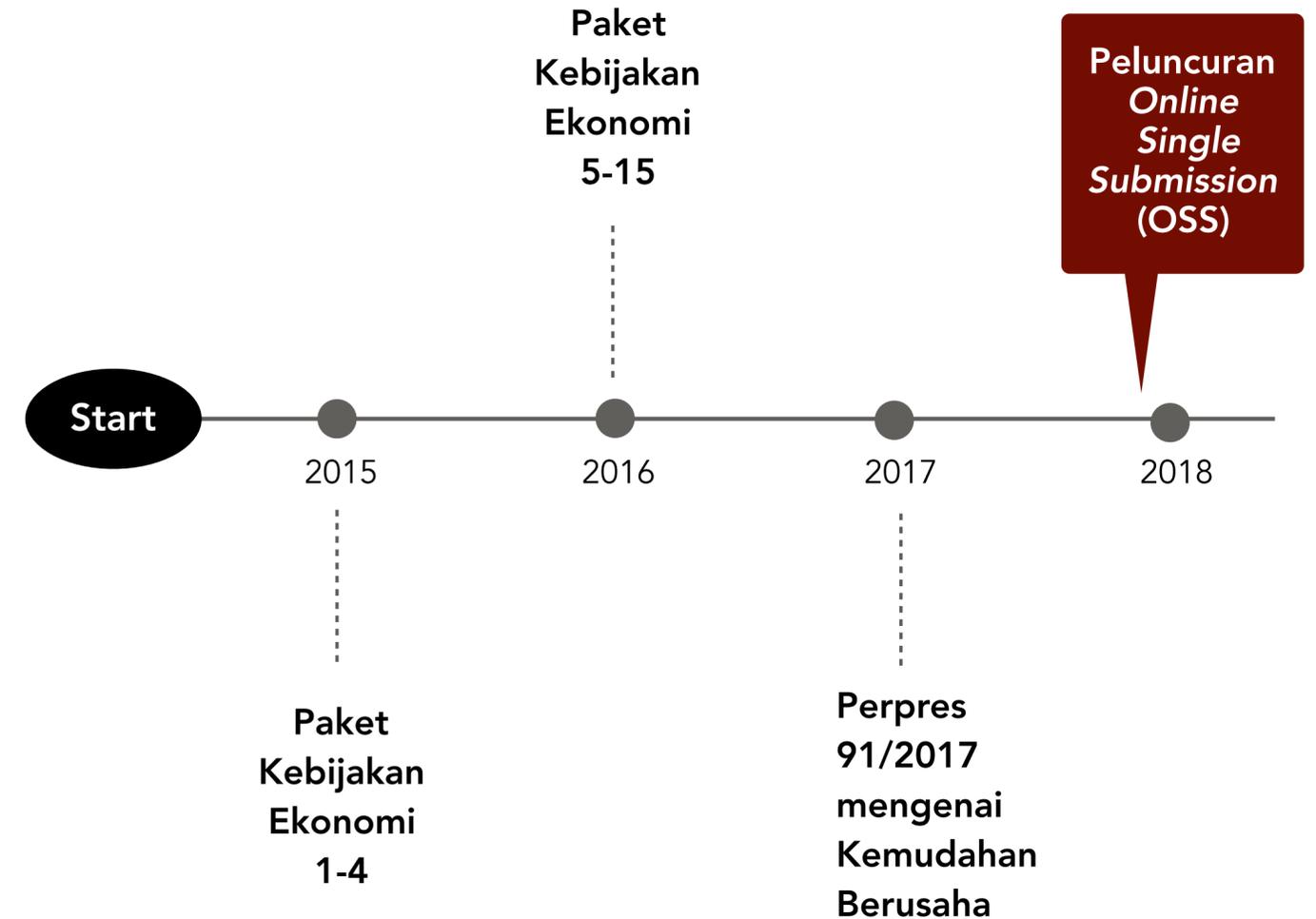
Efisiensi regulasi jadi salah satu kunci utama akselerasi pembangunan ekonomi. Regulasi yang baik memberi ruang luas bagi investasi dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan. Dengan itu, APBN dapat digunakan bagi program-program prioritas peningkatan produktivitas dan kesejahteraan rakyat.

Swasta telah berperan penting dalam pembangunan ekonomi, baik melalui pengembangan dunia usaha maupun kemudahan penciptaan lapangan kerja, di tingkat regional dan nasional. Dalam perekonomian terbuka, peran swasta tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat antar-negara. Untuk itu, investasi baik domestik maupun asing sangat penting bagi akselerasi pembangunan ekonomi nasional. Investasi adalah sumber pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, sehingga harus ditingkatkan terus perannya.

Selama empat tahun, Pemerintah membenahi berbagai tantangan dan hambatan perizinan untuk memudahkan investasi. Langkah tersebut mencakup perbaikan dan penyederhanaan regulasi hingga penerapan *Online Single Submission (OSS)*. Langkah-pemerintah ini berdampak pada peningkatan komitmen dan nilai investasi. Selain itu juga pengakuan internasional atas kemudahan berusaha dan kelayakan berinvestasi di Indonesia. ■

Langkah Maju Deregulasi

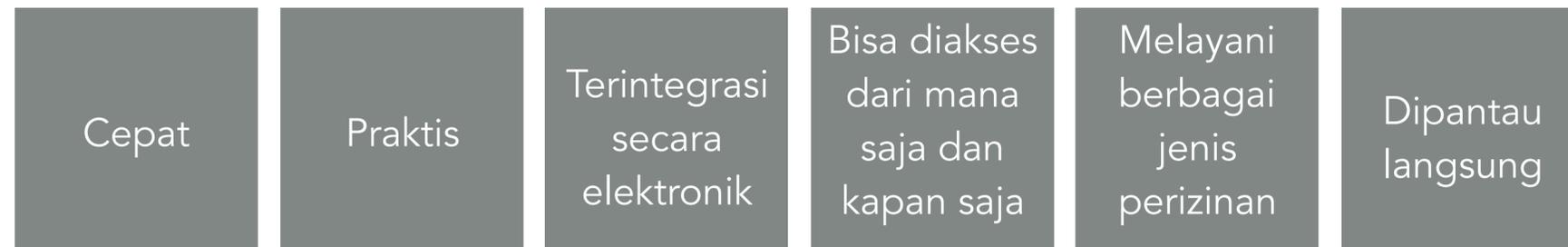
Untuk mengeliminasi regulasi yang menghambat efisiensi ekonomi, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE), diikuti dengan Perpres Percepatan Berusaha pada 2017, dan peluncuran *Online Single Submission (OSS)*.



Online Single Submission (OSS)

Tahun 2018, Pemerintah melakukan perubahan fundamental dalam proses pengajuan izin berusaha dengan memperkenalkan OSS atau Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Kelebihan OSS



OSS mengubah sistem manual terpisah-pisah menjadi sistem elektronik terintegrasi, yang diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018. Sistem ini terus disempurnakan dan dikembangkan untuk menciptakan iklim berusaha yang kompetitif dan efisien.

Sektor yang dilayani OSS, di antaranya:



Ketenagalistrikan



Obat & Makanan



Perdagangan



Perindustrian



Perhubungan

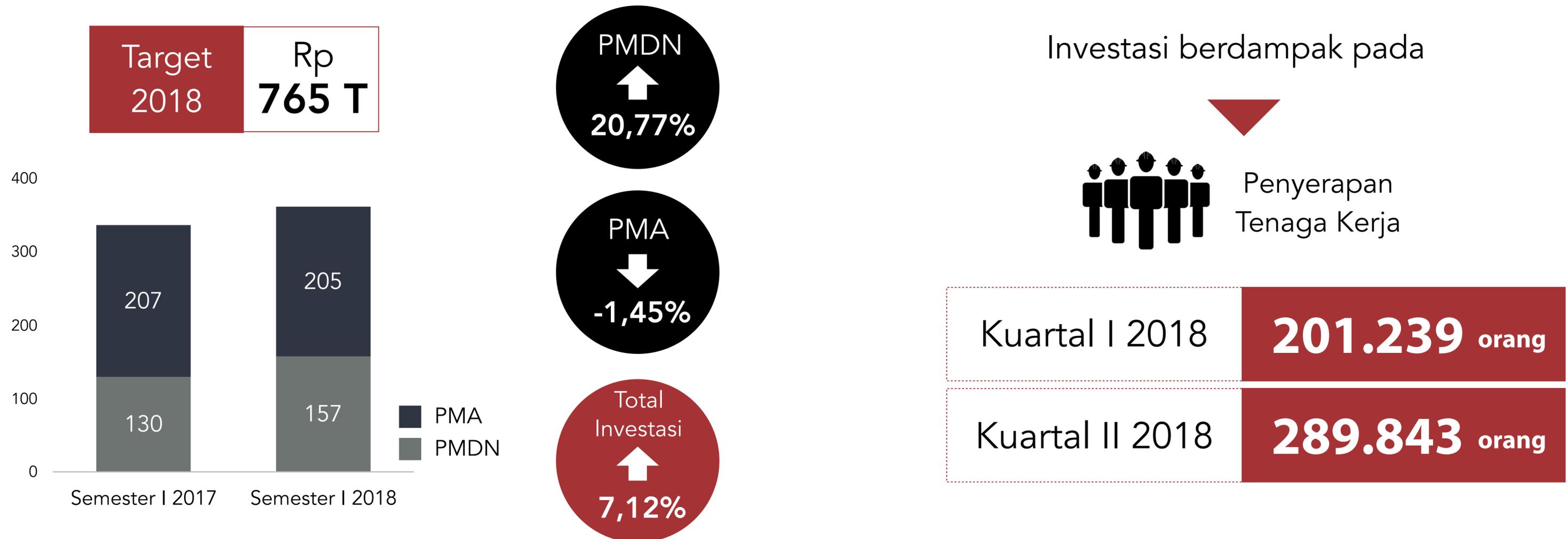


Keuangan

dan 14 sektor lainnya

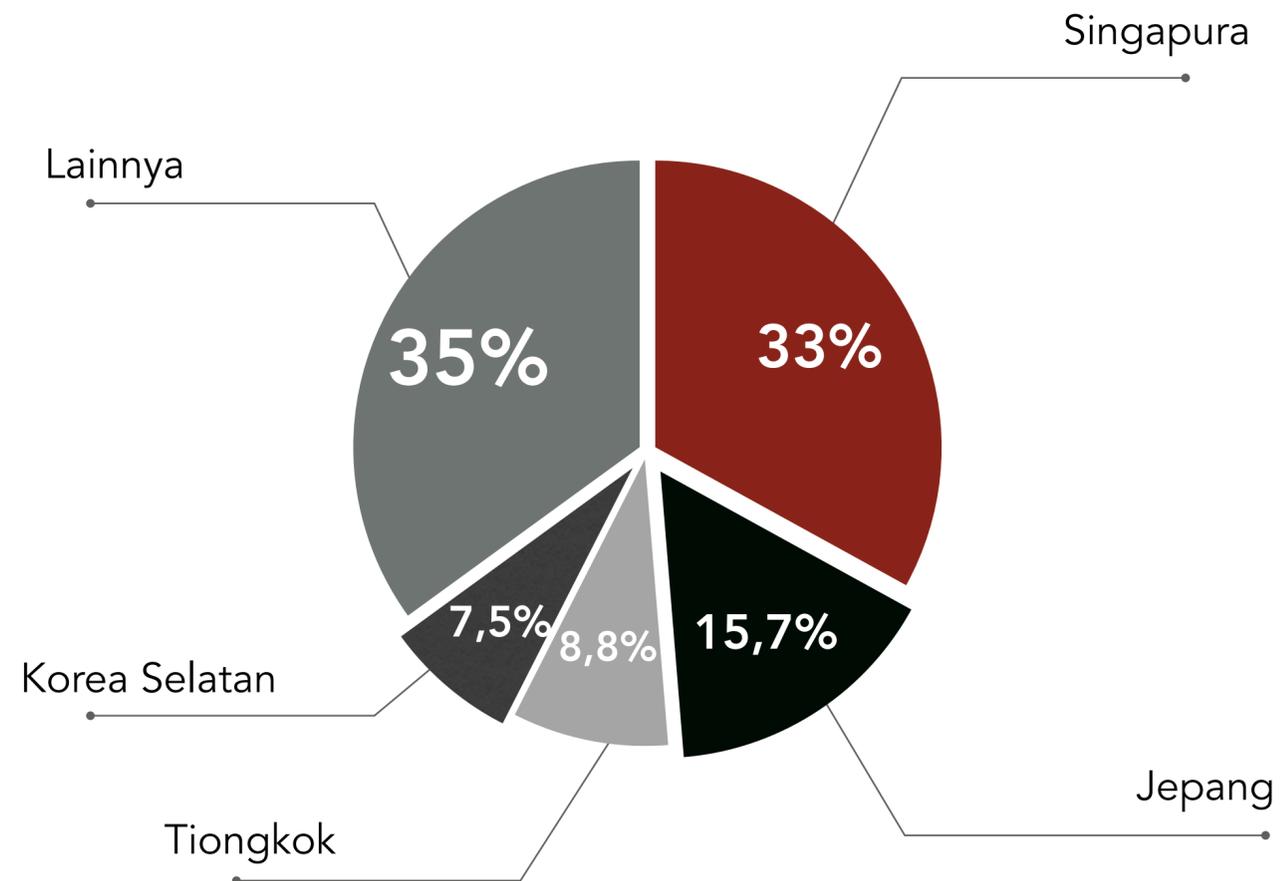
Investasi

Realisasi investasi pada Semester I 2018 mencapai Rp361 Triliun atau 47,2% dari target 2018. Faktor global berdampak pada sedikit penurunan PMA, tetapi porsi investasi dalam negeri meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peran domestik semakin kuat.



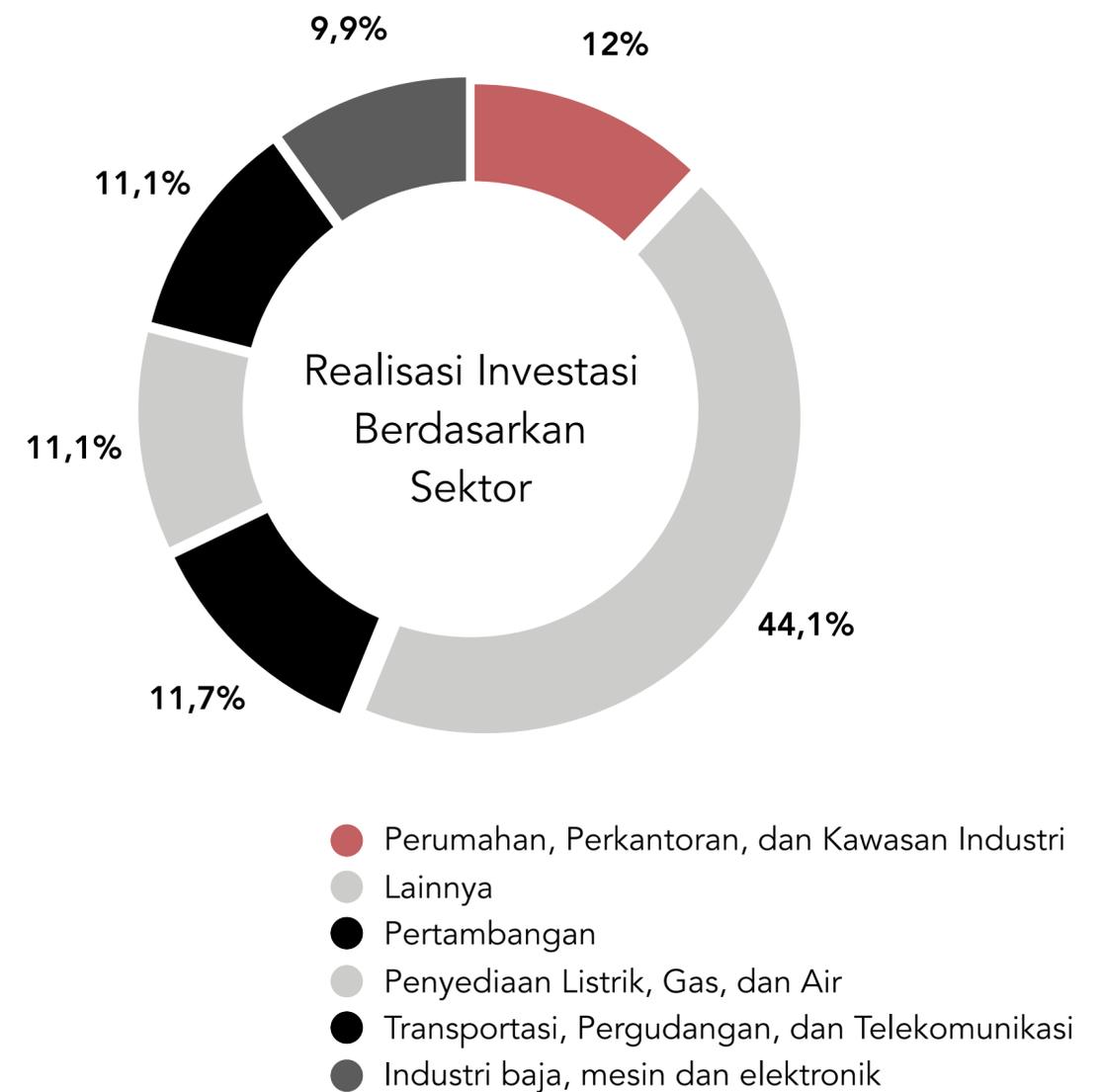
Investasi Asing Menurut Negara Asal

Secara tradisional, Singapura dan Jepang masih menjadi sumber utama PMA. Diversifikasi sumber PMA sangat penting untuk menjaga kesinambungan investasi terutama ketika menghadapi gejolak global.



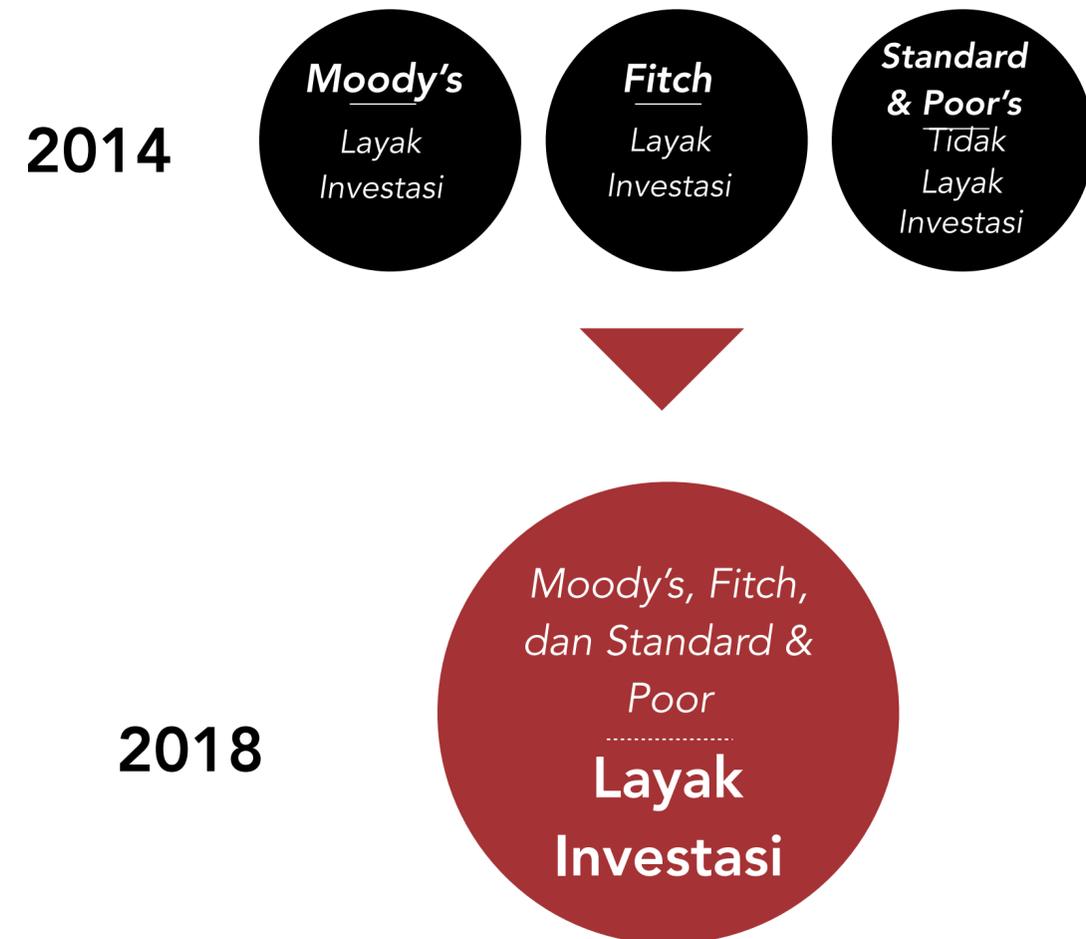
Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor

Sebagai sektor yang paling produktif, industri pengolahan dan perdagangan masih menjadi sektor utama tujuan investasi.



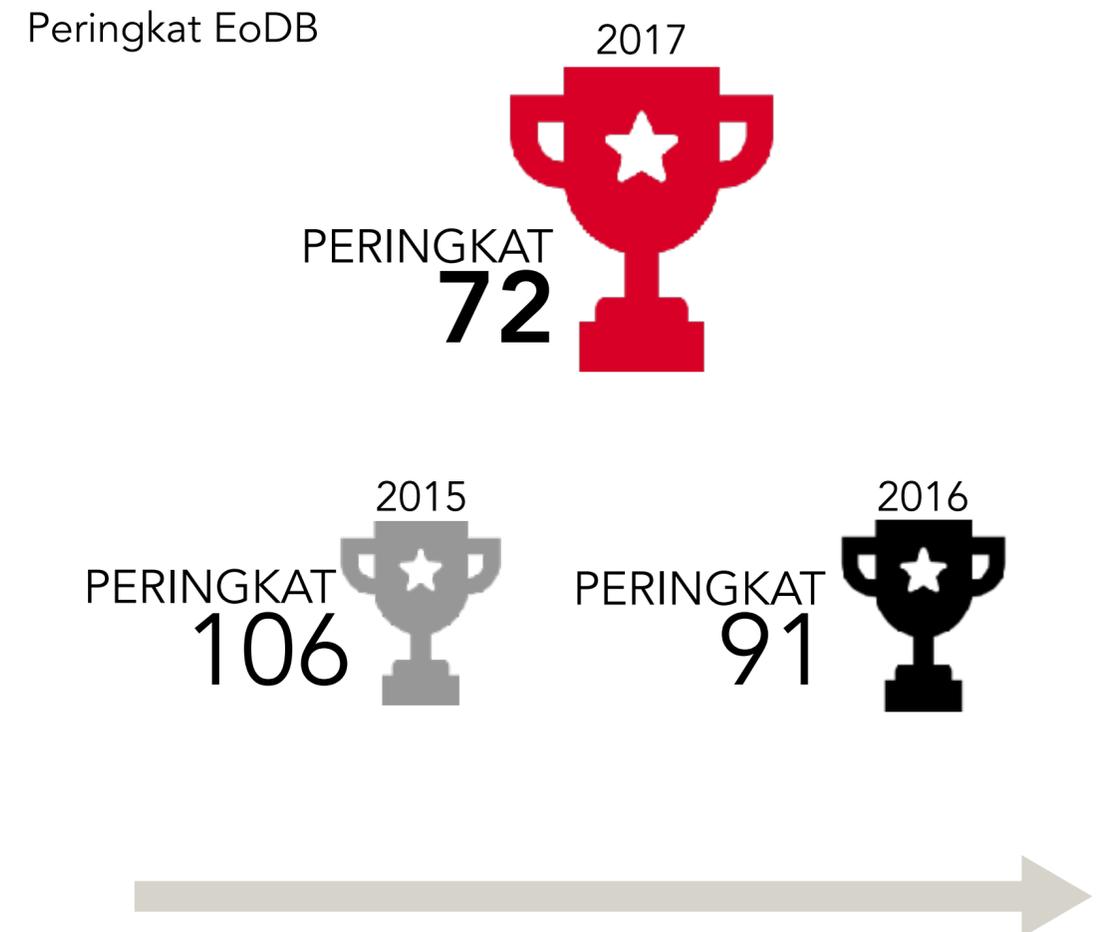
Indonesia Layak Investasi

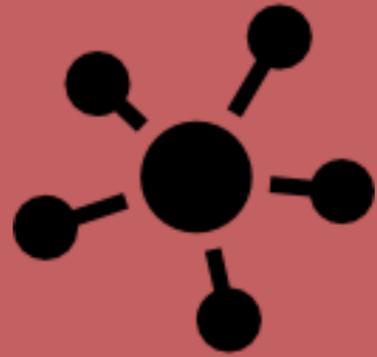
Sejak 2017 Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan peringkat layak Investasi oleh 3 lembaga pemeringkat internasional terkemuka. Status ini menjadi indikasi, Indonesia lebih dipercaya oleh investor internasional.



Kemudahan Berusaha

Sejalan dengan komitmen kemudahan berusaha, peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia terus melonjak. Menempati posisi 72 pada 2017, lonjakan ini menunjukkan ada perbaikan struktural yang berkesinambungan.





Pengembangan Sumber Ekonomi Baru

Demi mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, perlu diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memunculkan basis-basis ekonomi baru yang bersumber pada kreativitas manusia maupun pengelolaan sumber daya daerah.

Sumber ekonomi baru bisa berbentuk sektor ekonomi berbasis aktivitas kreatif-inovatif maupun wilayah tertentu yang mempunyai keunggulan komparatif karena faktor sumber daya bawaan (*endowment*) yang dimilikinya.

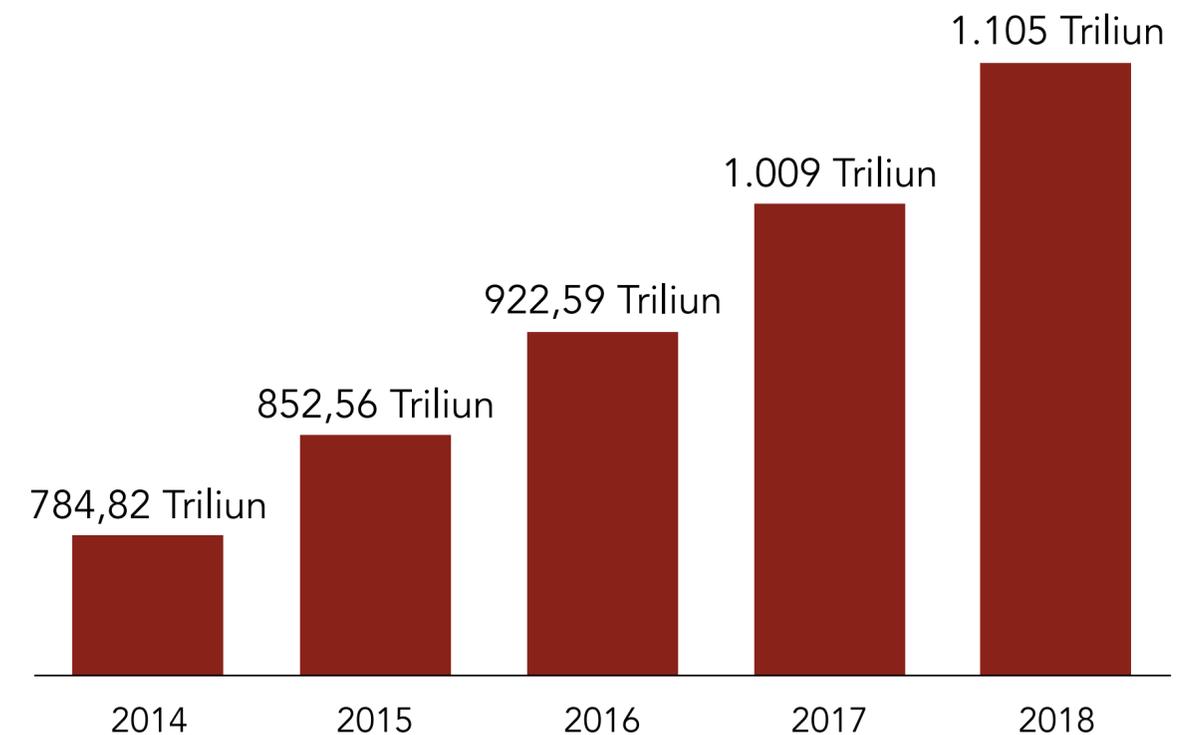
Pengembangan sektor-sektor ekonomi yang kreatif-inovatif dilakukan melalui berbagai terobosan. Perkembangan teknologi berperan penting di sini.

Sedangkan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu dilakukan berdasarkan potensi wilayah yang mempunyai keunggulan komparatif, sehingga bisa menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui proses aglomerasi dan memberikan efek perambatan (*spillovers*) ke wilayah di sekitarnya.

Kedua pendekatan ini saling melengkapi. Sektor pariwisata dan perdagangan adalah salah satu contohnya. Sama-sama membutuhkan pengembangan wilayah dan dukungan teknologi serta aktivitas yang kreatif. ■

PDB Sektor Ekonomi Kreatif

Nilai PDB Ekonomi Kreatif secara konsisten terus meningkat dari tahun ke tahun. Bukti kontribusi sektor ekonomi kreatif semakin penting dalam perekonomian nasional.



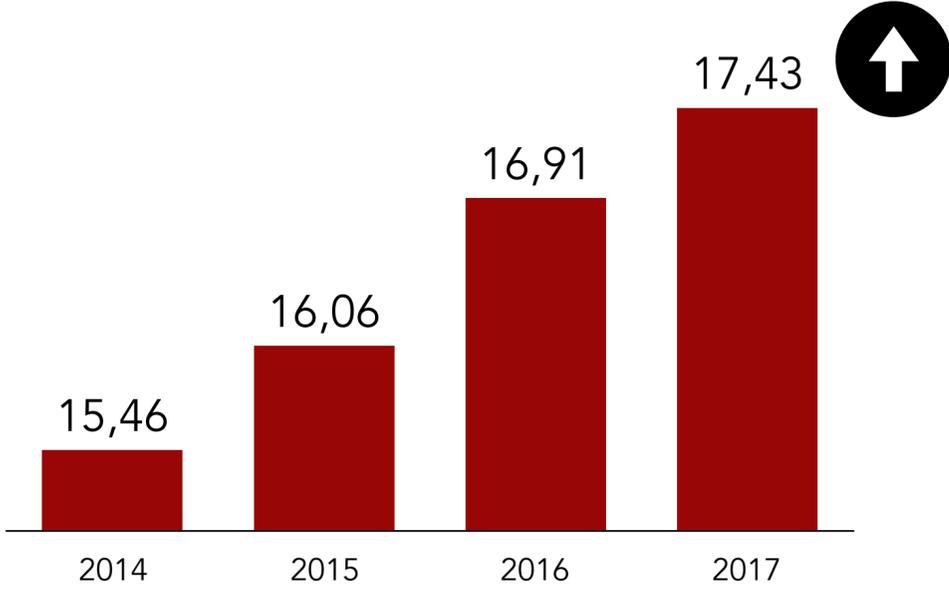
Sumber: Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Pengembangan Ekonomi Kreatif

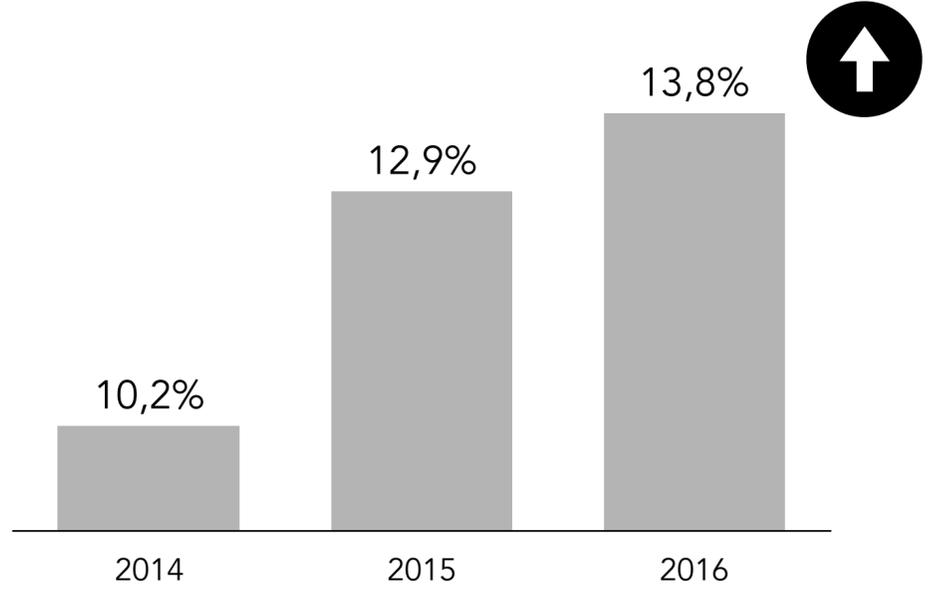
Sektor ekonomi kreatif (Ekraf) juga berkontribusi pada ekspor nasional dan penyerapan tenaga kerja. Kedua indikator tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun.



Jumlah Penduduk Indonesia yang bekerja di Sektor Ekraf (juta jiwa)

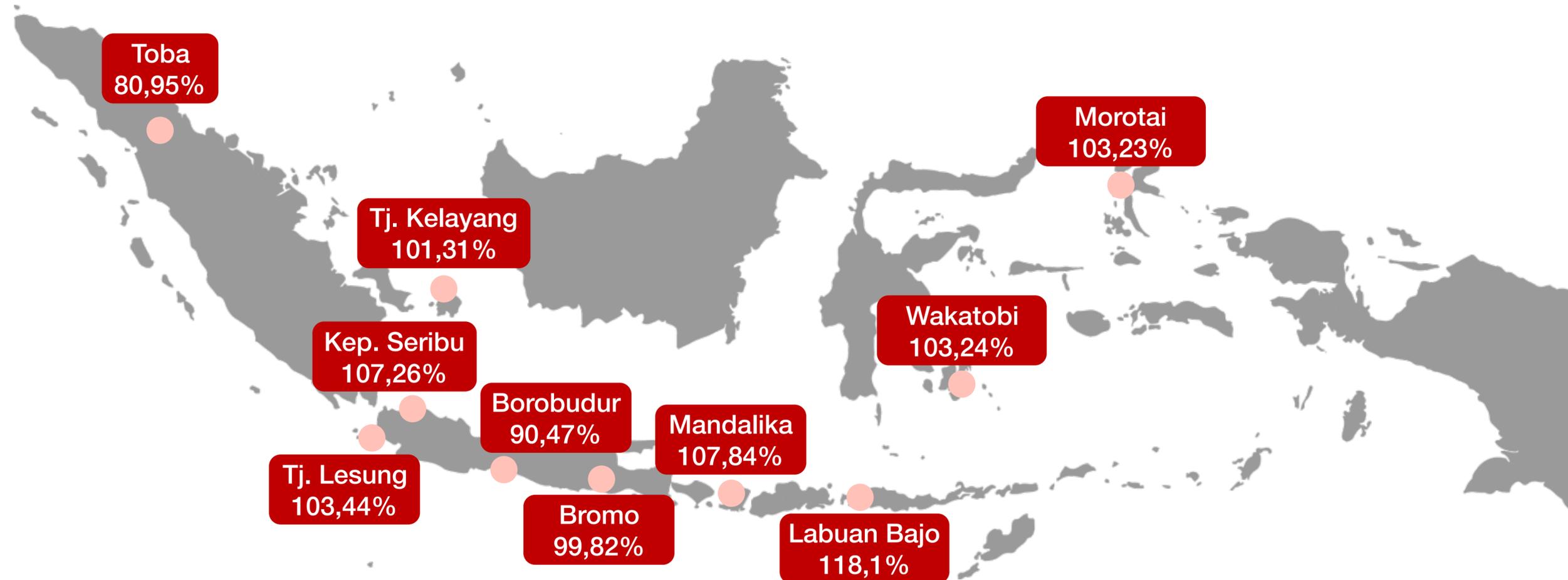


Kontribusi Ekspor Ekraf terhadap Ekspor Nasional (%)



Pengembangan Sektor Pariwisata

Dalam rangka mendorong daya saing dan menjadikan pariwisata sebagai sumber utama devisa, Pemerintah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur dan aksesibilitas pariwisata nasional yang tersebar dari wilayah barat hingga timur Indonesia.



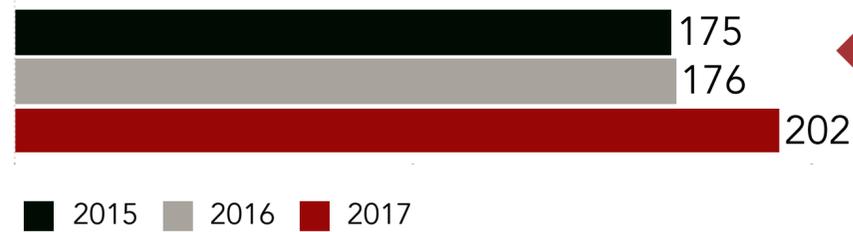
Pemerintah terus mengejar penyelesaian pembangunan infrastruktur, amenities, dan atraksi di 10 Destinasi Pengembangan Pariwisata. Hingga September 2018, hampir seluruh DPP memenuhi target pembangunan tahun 2018.

Pariwisata Adalah Primadona

Dari tahun ke tahun sektor pariwisata terus menjadi andalan Pemerintah dalam memberikan kontribusi positif untuk menggerakkan perekonomian nasional, terutama dalam menggerakkan ekonomi lokal dan penerimaan devisa.



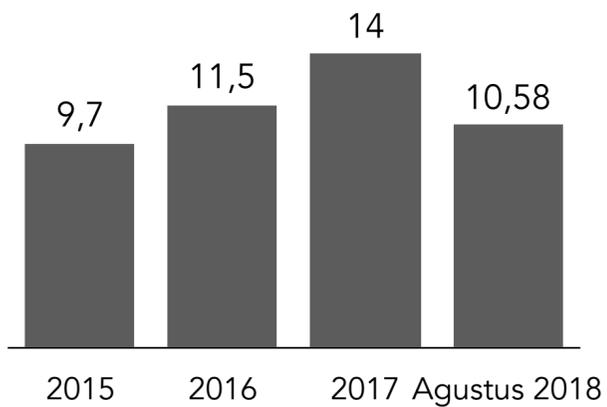
Devisa (Miliar USD)



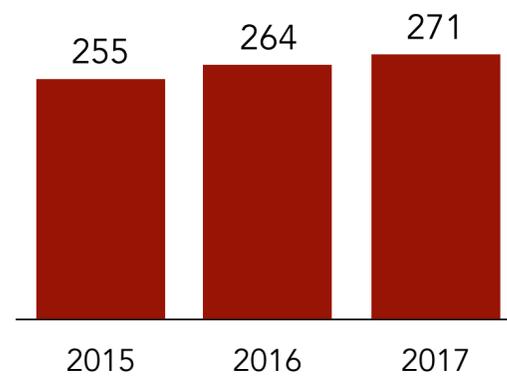
Devisa pariwisata pada 2017 tumbuh 14,77% dari 2016



Wisatawan Mancanegara (Juta Kunjungan)



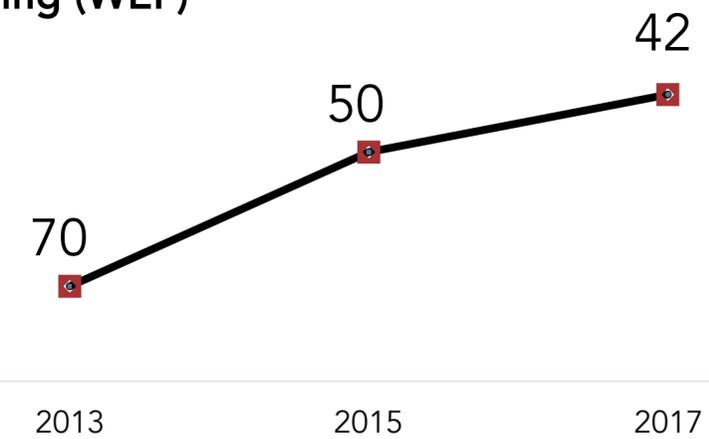
Wisatawan Nusantara (Juta Kunjungan)



Daya Saing Pariwisata Indonesia

Dengan berbagai upaya komprehensif, dari peningkatan pelayanan hingga promosi destinasi baru pariwisata, maka daya saing pariwisata Indonesia terus membaik.

Indeks Daya Saing (WEF)



Penghargaan Wonderful Indonesia





Perbaikan Produktivitas

Produktivitas jadi faktor penentu bagi pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Peningkatan produktivitas menunjukkan perbaikan efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi yang tinggi berdampak pada skala ekonomi yang lebih besar dan optimal.

Peningkatan produktivitas ditentukan tiga faktor kunci: kualitas sumber daya manusia, modal, dan level teknologi. Ketiganya harus didukung dengan infrastruktur dan kebijakan baik. Produktivitas di level nasional sangat tergantung pada komponen-komponen di level mikro.

Infrastruktur terus dipercepat pembangunannya, baik yang memberikan dampak jangka panjang maupun jangka pendek. Manfaatnya pun sudah dirasakan terutama yang mendukung kelancaran mobilitas dan konektivitas.

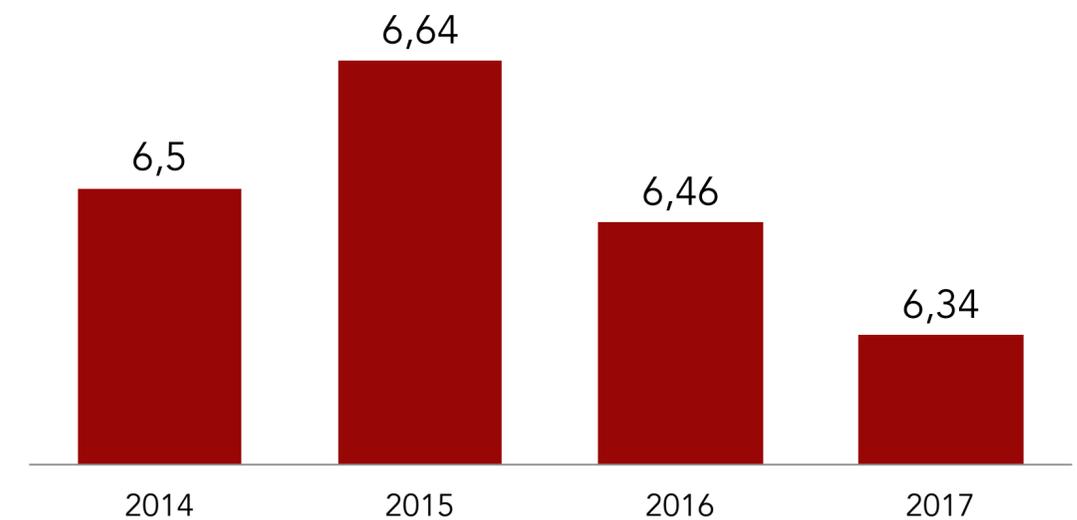
Selanjutnya, peningkatan kualitas SDM dilakukan dengan memperbaiki pendidikan, terutama vokasi, dan perbaikan iklim ketenagakerjaan. Secara fundamental, perbaikan SDM dilakukan sejak dini melalui kesadaran akan pentingnya 1000 hari kehidupan pertama. Gizi dan sanitasi yang baik menjadi kunci utama.

Dari sisi teknologi, pengembangan riset ditingkatkan dengan mengakomodir revolusi industri 4 agar mampu bersaing di pasar internasional. ■

Kualitas Investasi Meningkat

Secara gradual, kualitas investasi terus membaik sejak 2015, sehingga angka ICOR tahun 2016 dan 2017 terus menurun.

Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

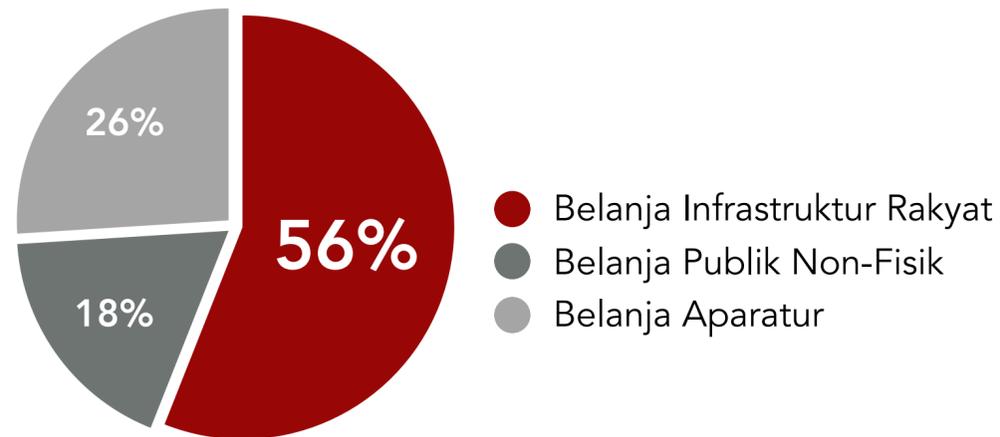


- ▶ ICOR menunjukkan jumlah tambahan investasi yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu unit output nasional (PDB).
- ▶ ICOR juga menunjukkan kualitas investasi. Semakin rendah ICOR, semakin berkualitas investasi.

Infrastruktur untuk Energi yang Andal dan Terjangkau

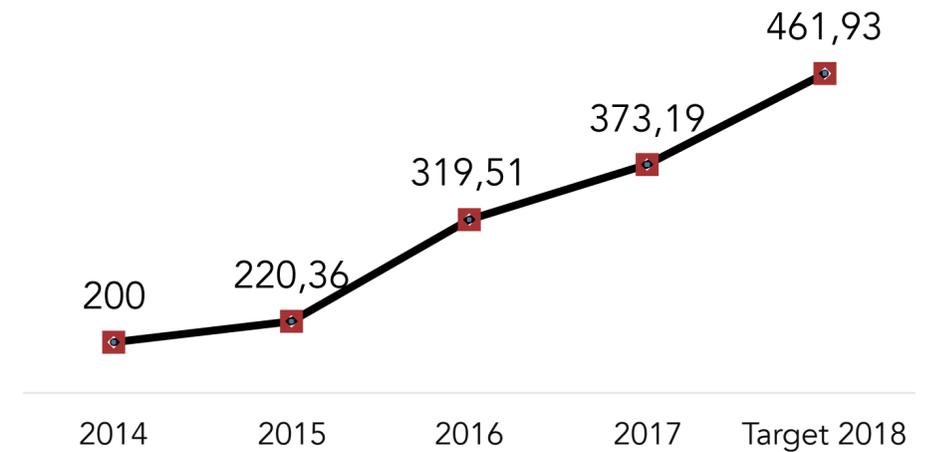
Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan energi secara meluas. Didukung APBN, dan pelaksanaan program strategis 35.000 MW juga pembangunan jaringan pipa gas.

**APBN 2018 Kementerian ESDM:
56% untuk Pembangunan
Infrastruktur Energi**

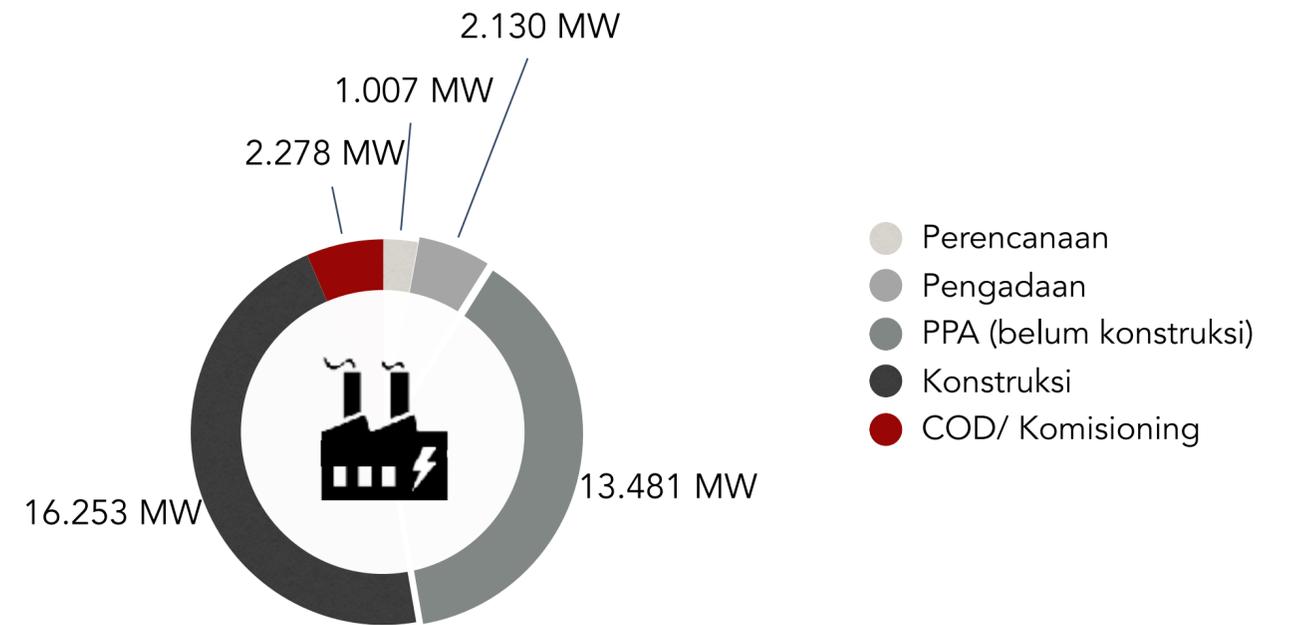


Pertama kali, 56% (Rp3,6 T) dari Anggaran Kementerian ESDM dialokasikan untuk pembangunan Infrastruktur Energi bagi Rakyat.

**Pembangunan
Jaringan Gas Kota
dan Pipa Transmisi &
Distribusi Gas
(dalam ribu SR)**



**Program
35.000 MW**



Ketersediaan Infrastruktur Konektivitas

Pembangunan infrastruktur konektivitas didedikasikan untuk mempermudah mobilitas masyarakat bekerja dan berusaha. Selain juga demi meratanya distribusi barang/jasa, meningkatnya produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.



Jalan dan Jembatan

Hingga 2018 telah terbangun:

- ▶ Jalan sepanjang 3.432 KM
- ▶ Jalan tol sepanjang 947 KM
- ▶ Jembatan sepanjang 39,8 KM
- ▶ Jembatan gantung 134 unit



Kereta Api

Hingga 2018 telah terbangun:

- Jalur KA termasuk Jalur Ganda & Reaktivasi 754,59 km'sp
- Peningkatan & Rehabilitasi Jalur KA 413,6 km'sp
- *Light Rail Transit* (LRT)
 - Sumatera Selatan (selesai dibangun)
 - Jakarta (selesai dibangun)
 - Jabodebek (selesai tahun 2019)
- *Mass Rapid Transit* (MRT) selesai tahun 2019



Bandar Udara

Hingga 2018 telah terbangun:

- 10 bandara baru
- Revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi dan wilayah perbatasan.

Jembatan Udara (Angkutan Udara Perintis Kargo):

- Penurunan disparitas harga 5 bahan kebutuhan pokok sebesar 57,21% untuk masyarakat daerah terpencil dan daerah tertinggal atau daerah yang belum terlayani moda transportasi lain



Pelabuhan

Hingga 2018 telah terbangun:

- 19 pelabuhan
- 8 pelabuhan sedang dibangun, selesai tahun 2019.

Meningkatnya Kapasitas Pengangkutan Barang

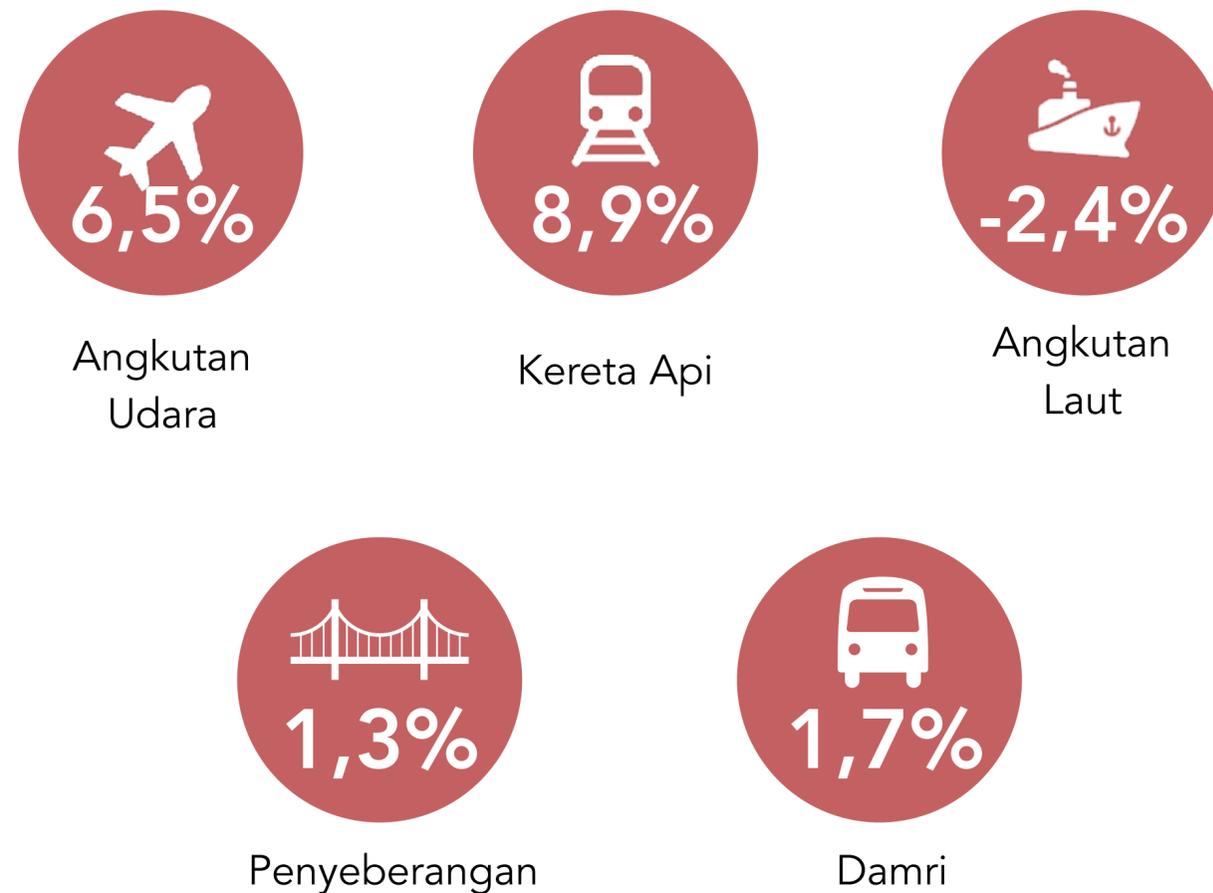


- Tambahan 5 unit kapal penyeberangan penumpang
- Tambahan 3 unit kapal motor penyeberangan
- Tambahan 10 pelabuhan penyeberangan

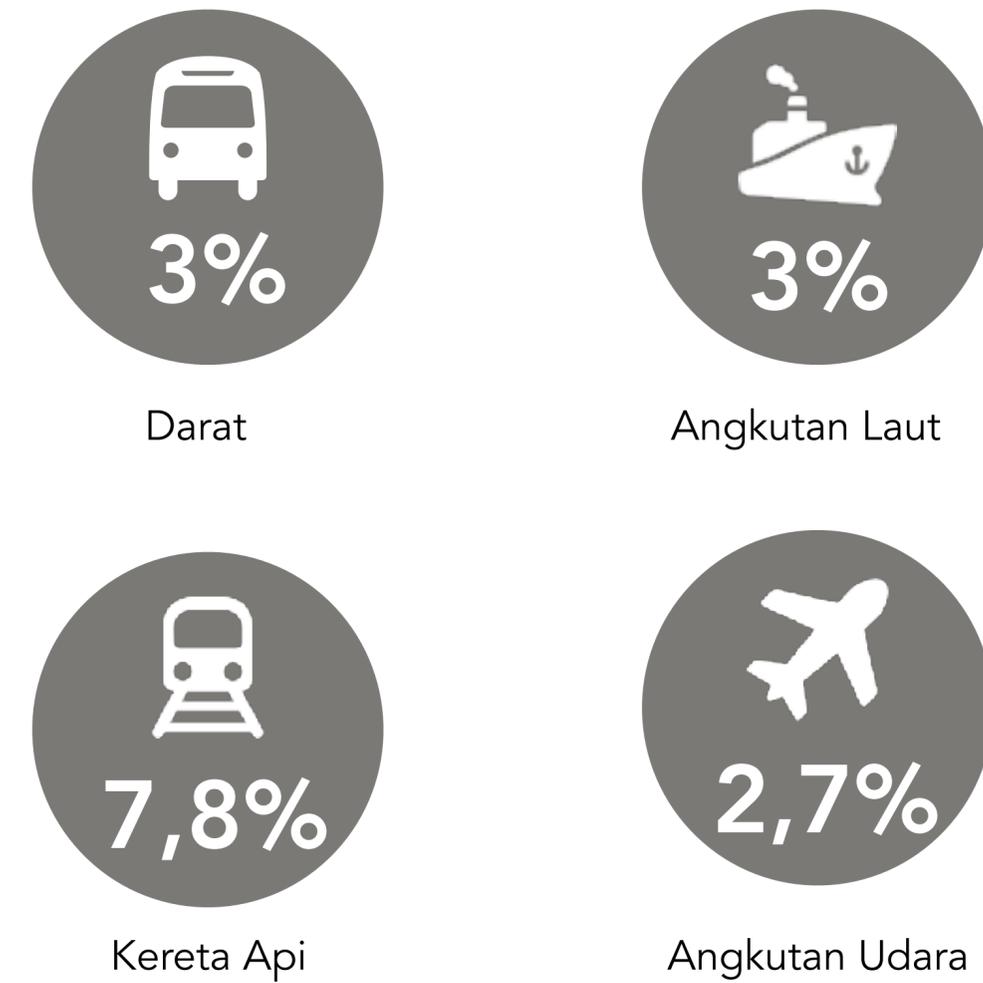
Peningkatan Pemanfaatan Infrastruktur Konektivitas

Infrastruktur konektivitas yang telah dibangun Pemerintah kini mulai terlihat manfaatnya.

Pertumbuhan Penumpang
(rata-rata per tahun, 2014-2017)

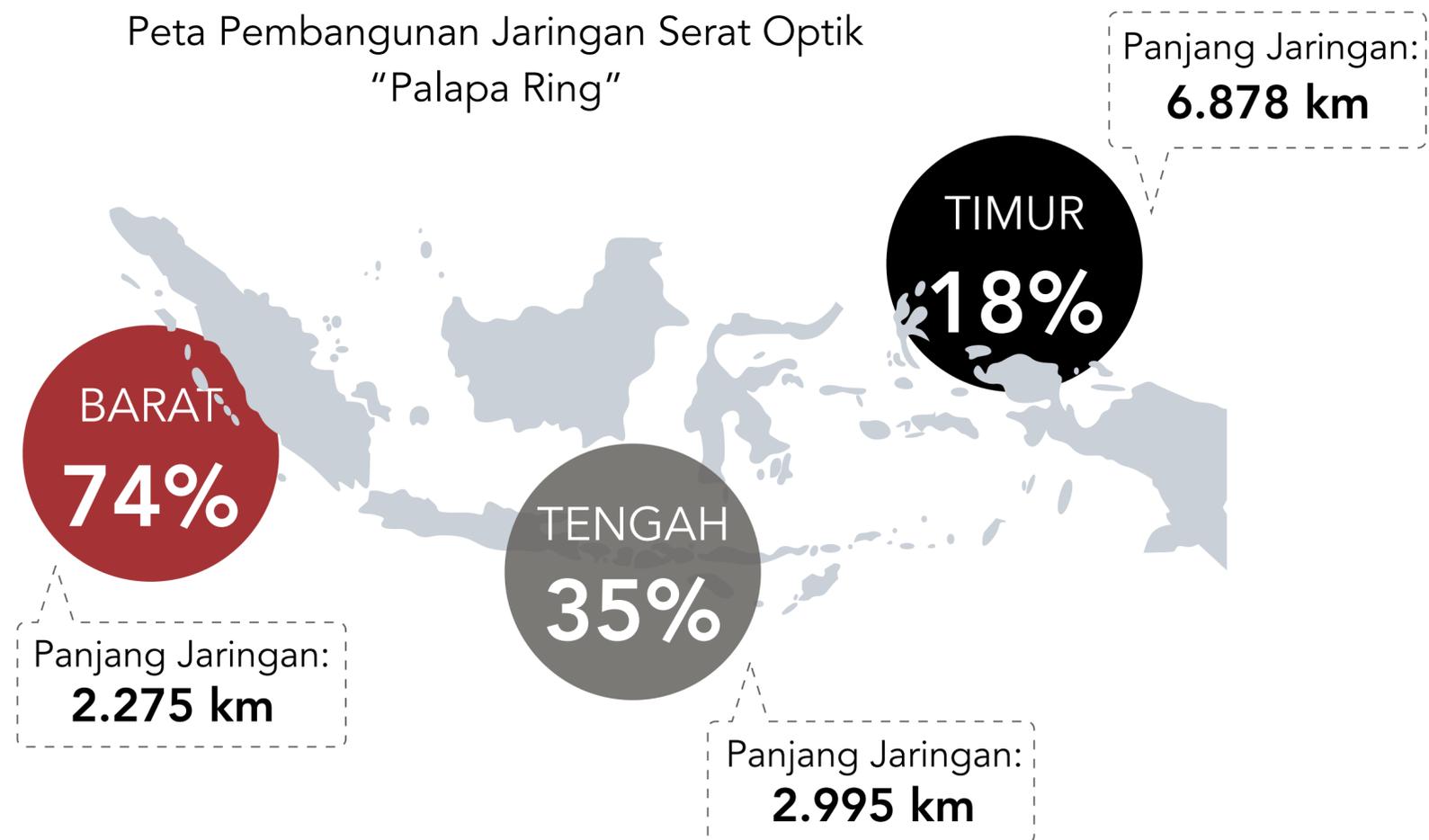


Pertumbuhan Angkutan Barang
(rata-rata per tahun, 2014-2017)



Ketersediaan Infrastruktur Telekomunikasi

Pemerintah membangun berbagai macam infrastruktur pendukung telekomunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Demi memperluas cakupan jaringan dan terutama pemenuhan akses masyarakat terhadap komunikasi dan teknologi.



Palapa Ring (*Broadband*) Paket Barat

- Mulai beroperasi pada awal April 2018 di 457 Kab/ Kota
- Inovasi Pembiayaan melalui Pola Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)



Penguatan BTS

175 ribu menara



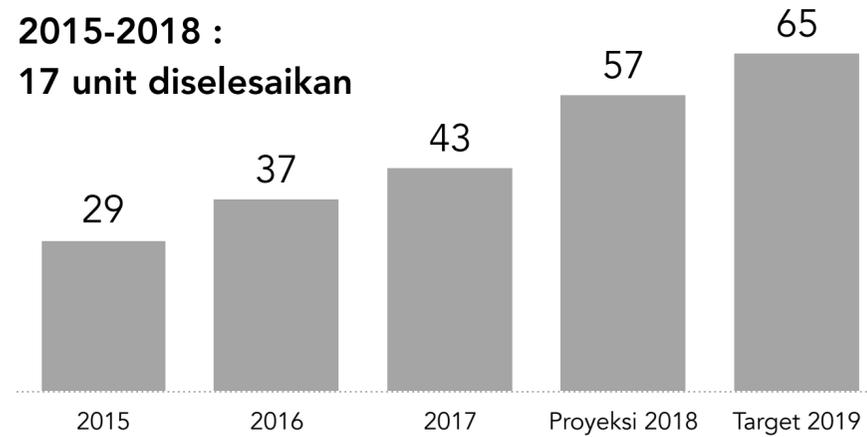
Mobile Coverage

75 ribu kelurahan

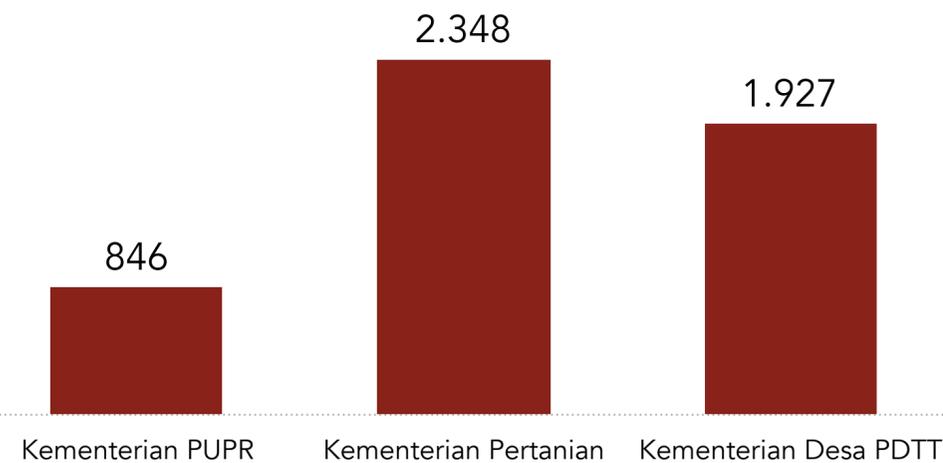
Ketersediaan Infrastruktur Pendukung Ketahanan Pangan

Pemerintah terus meningkatkan ketersediaan pangan bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan pangan menjadi program prioritas Pemerintah.


Pembangunan Bendungan
(unit, kumulatif)




Pembangunan Embung
2015-2017 (unit)



**Tambahan
Manfaat dari
Pembangunan
Bendungan
2015 - 2019**


Layanan Irigasi Waduk
160.000 Ha


Kapasitas Tampung
2,11 Miliar m3


Air Baku
3,02 m3/detik


Potensi Energi
145 MW

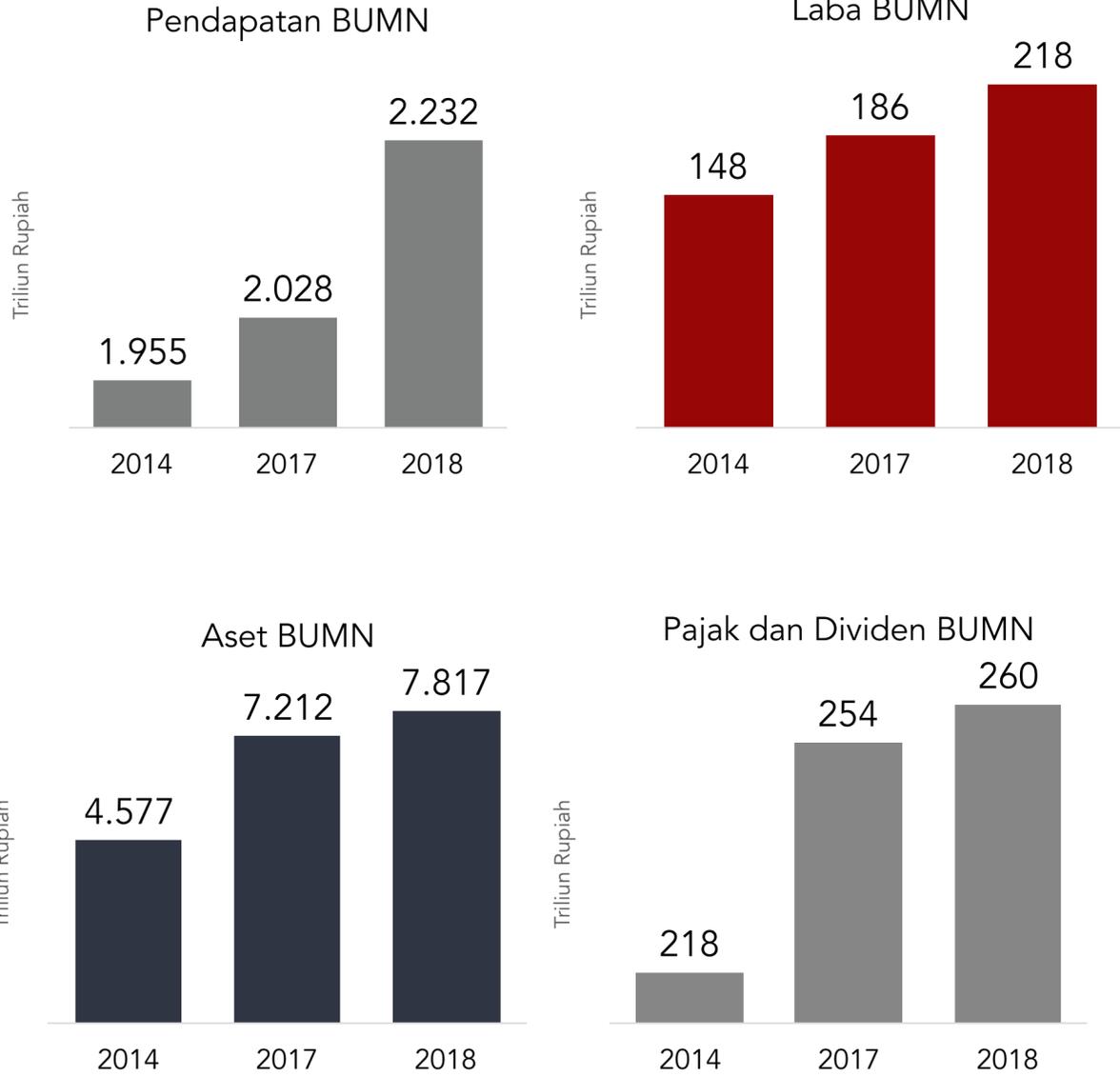
Jaringan Irigasi (2015-2018)



Sumber: Kementerian PUPR, Kemendes PDTT, Kementan

Peningkatan Peran dan Daya Saing BUMN

BUMN berupaya hadir mendukung peningkatan daya saing bangsa serta tumbuh kembang ekonomi kerakyatan.

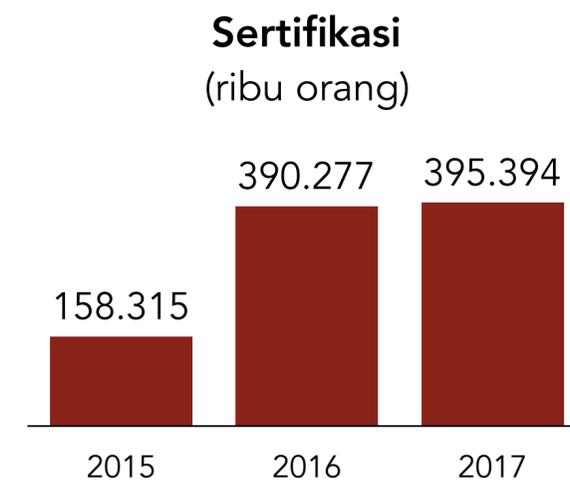
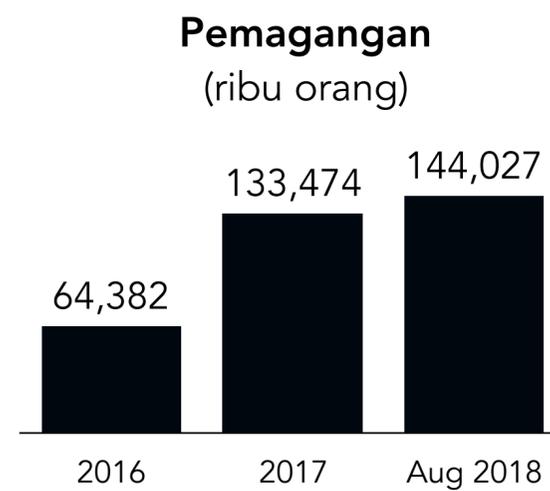
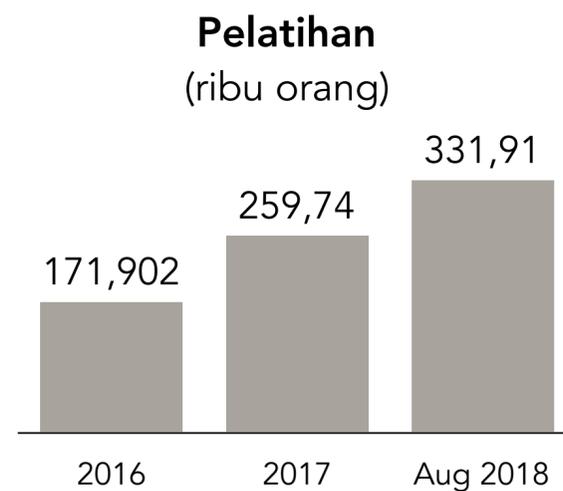


Dukungan BUMN untuk Ekonomi Kerakyatan:

- ▶ Menyalurkan KUR hingga September 2018 sebesar Rp 270 T yang menjangkau 13,24 juta debitur.
- ▶ Melakukan pemberdayaan pelaku usaha super mikro kepada kelompok perempuan prasejahtera sejumlah 4,93 juta nasabah, dan mampu menyerap dana sebesar Rp 10,61 T.
- ▶ Melakukan pendampingan kepada usaha mikro kecil (UKM) sejumlah 293.295 nasabah, dan mampu menyerap dana sebesar Rp 21,21 T.

Revitalisasi Pendidikan Vokasi

Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sangat penting dalam menyelesaikan masalah pengangguran serta meningkatkan kualitas dan daya saing SDM. Dengan pelatihan, sistem magang, sertifikasi, dan kerja sama dengan dunia usaha, diharapkan lulusan yang memiliki kompetensi dan siap untuk bekerja.

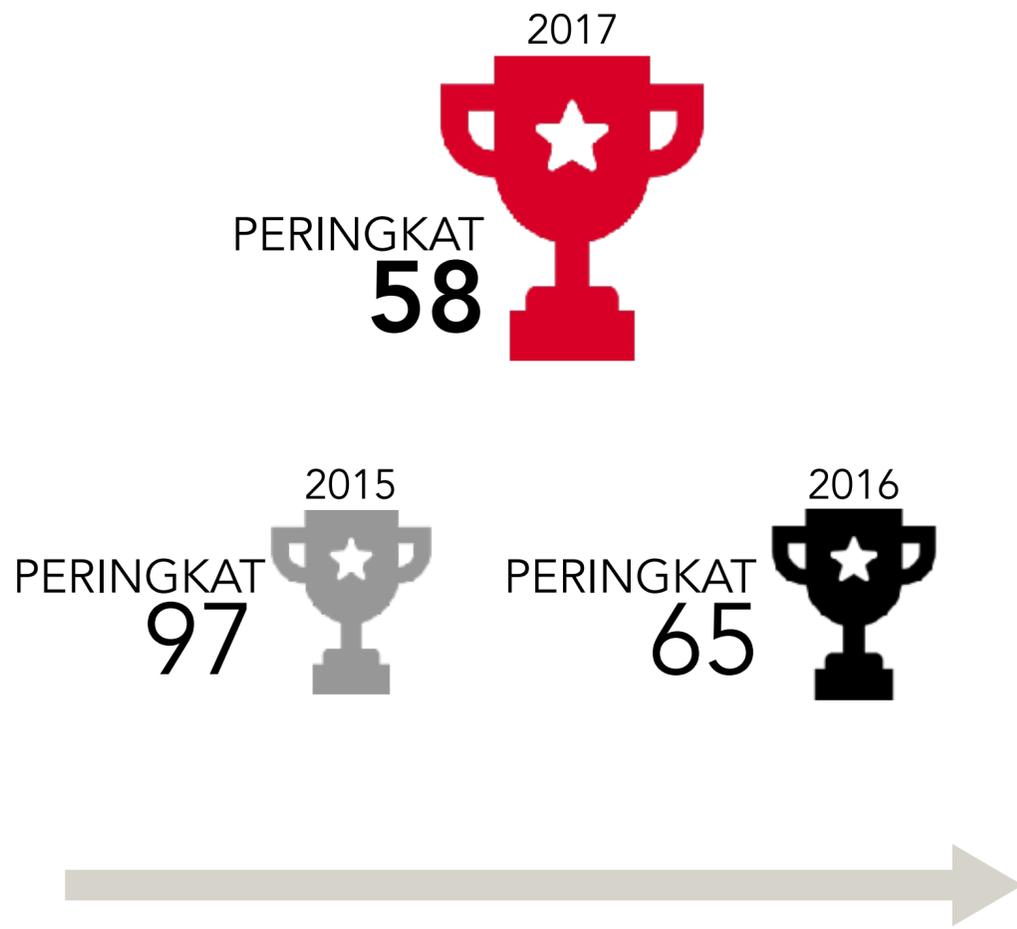


Sumber: Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan

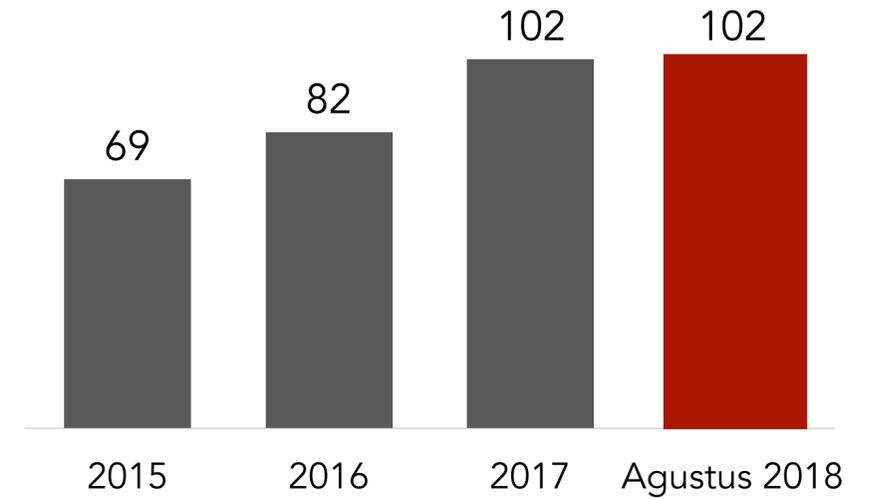
Pengakuan terhadap Kualitas Pendidikan Vokasi

Upaya Pemerintah merevitalisasi pendidikan vokasi mulai membuahkan hasil. Perbaikan kualitas pendidikan vokasi Indonesia diakui oleh dunia internasional dan industri.

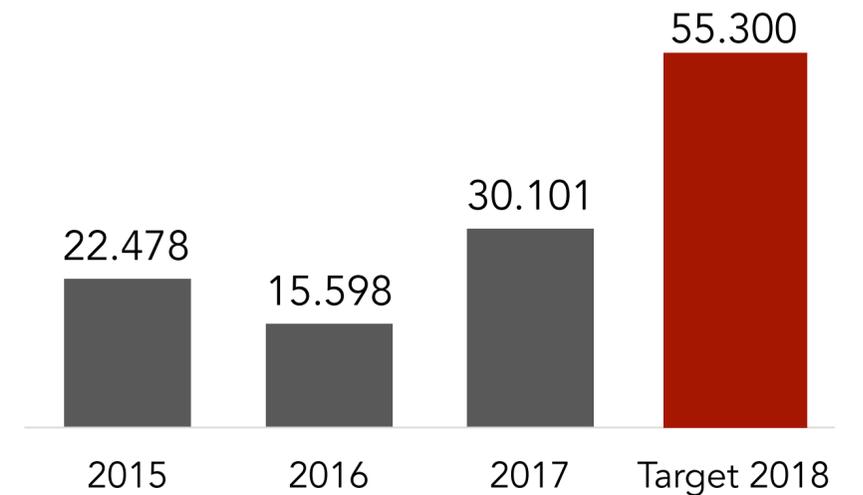
Peringkat Pelatihan Vokasi Indonesia dalam *Global Talent Competitiveness Index*



Jumlah BLK Pemerintah Berkualifikasi Baik



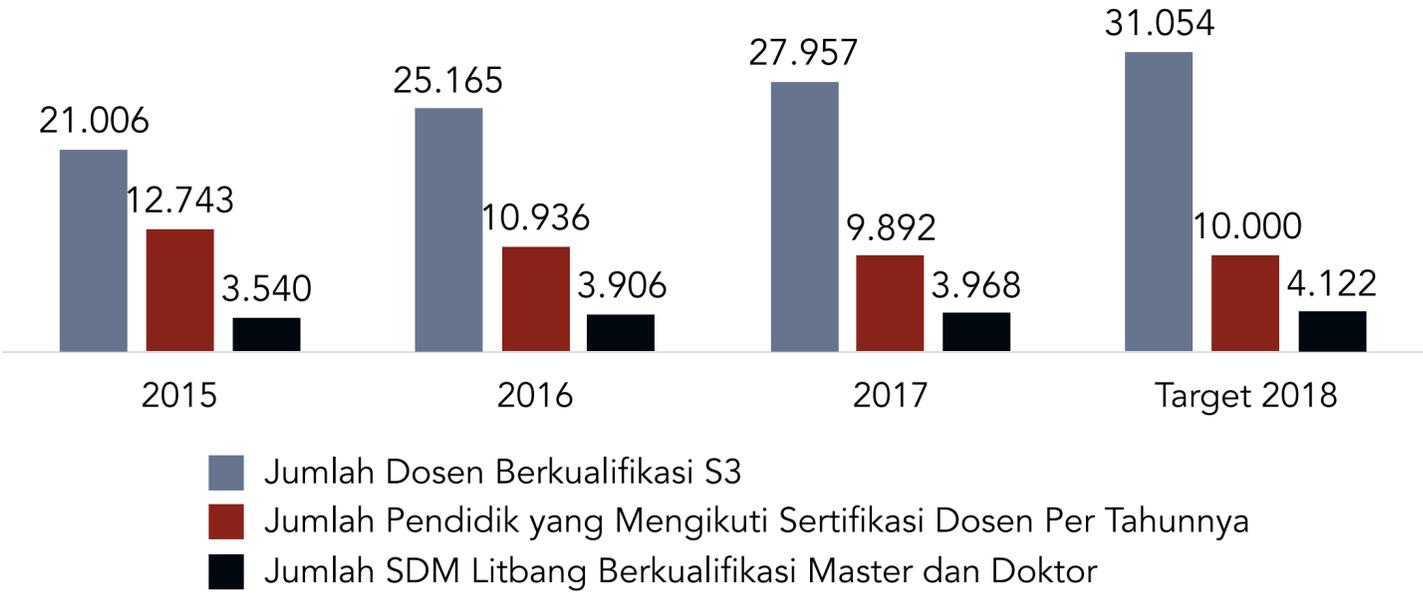
Jumlah SDM Industri Kompeten dan Bersertifikat yang Terserap di Dunia Kerja (orang)



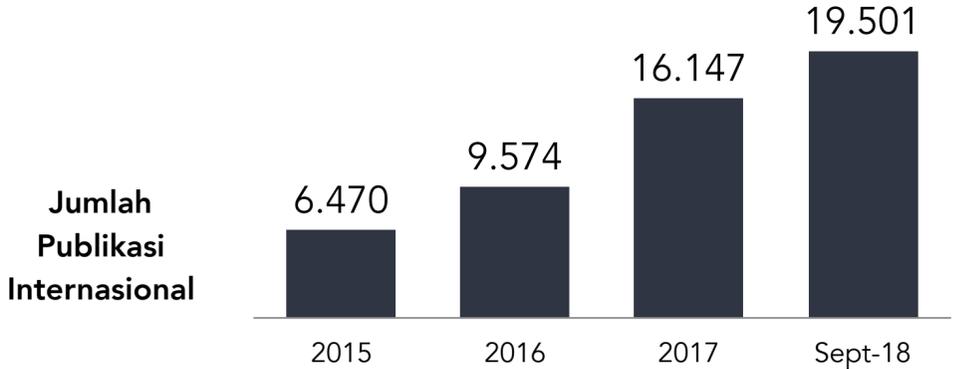
Pengembangan Riset dan Teknologi

Riset dan pengembangan teknologi menjadi pilar meningkatkan daya saing sebuah bangsa. Pemerintah terus membenahi, termasuk memperbaiki sumber daya dan tata kelola penyelenggaraan riset.

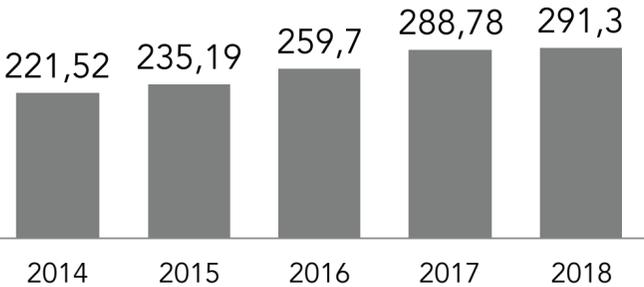
Jumlah SDM Riset dan Teknologi



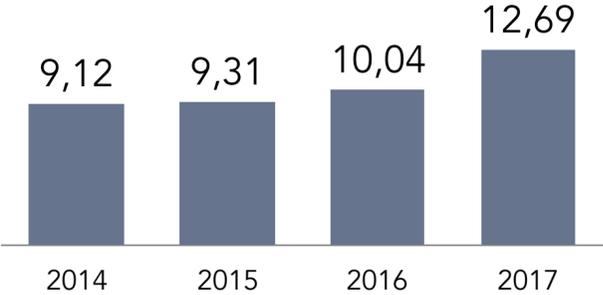
Jumlah output yang dihasilkan



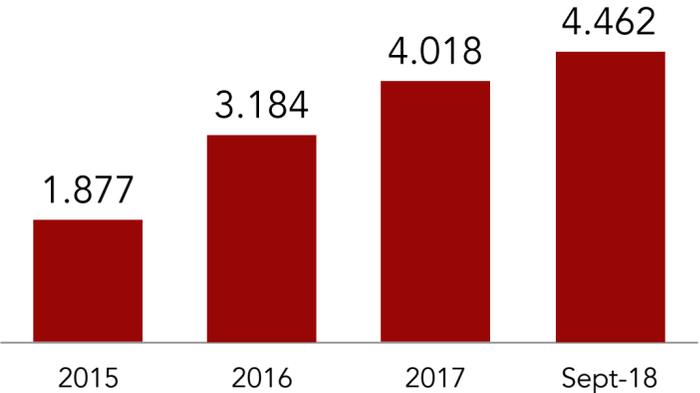
Jumlah Dosen (Ribuan Orang)



Jumlah Peneliti (Ribuan Orang)



Jumlah HKI yang Didaftarkan



Sumber: Kemenristekdikti

Penguatan Strategi Pemasaran Produk Indonesia

Indonesia secara konsisten meningkatkan perdagangan dengan negara sahabat melalui diplomasi ekonomi. Mengelar berbagai acara pameran dan festival seperti *trade expo*, Indonesia Fair, Festival Indonesia.



Penetrasi ke pasar non-tradisional terus dilakukan. **Untuk pertama kalinya dalam sejarah**, Indonesia menyelenggarakan Indonesia-Africa Forum yang menghasilkan transaksi sejumlah US\$ 586,56 juta.



Transaksi dengan Bangladesh meraih kesepakatan sebesar Rp3,76 Triliun, dan dengan negara-negara lain seperti: Papua Nugini, Palestina, El Salvador, Serbia jumlahnya terus meningkat.



Festival Indonesia dan Trade Expo Indonesia yang diselenggarakan di Moscow tahun 2017 dan 2018 menghasilkan transaksi untuk berbagai komoditi seperti kopi, sawit, mencapai lebih dari US\$ 2,5 juta

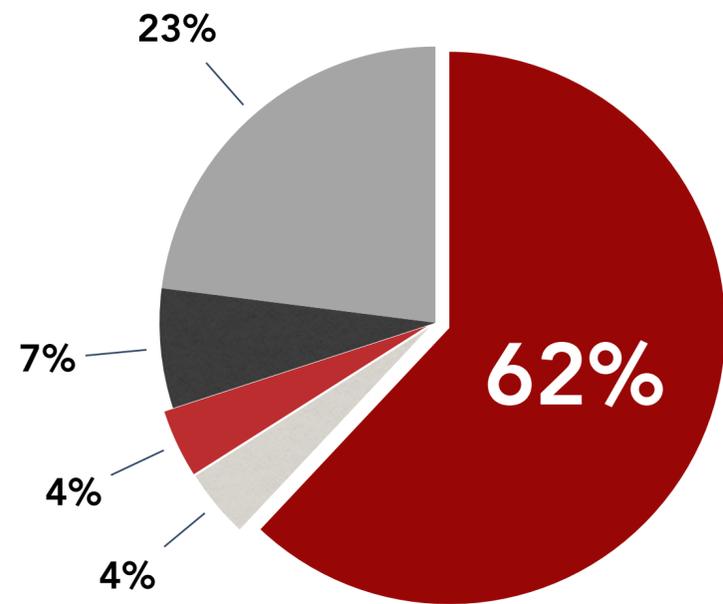
Nilai Ekspor 2016 - 2018 (dalam ribu USD)

Produk	Produsen	Nilai Ekspor
Tambang dan Logam	PT INALUM, PT Krakatau Steel	5.989.070
Farmasi	PT Biofarma, PT Kimia Farma	249.996
Transportasi dan Persenjataan	PT INKA, PT Dirgantara Indonesia, PT Barata Indonesia, PT Pindad	208.664
Semen	PT Semen Baturaja, PT Semen Indonesia	215.360
BBM, Migas dan Pupuk	PT Pertamina Group, PT Pupuk Indonesia Holding	4.653.079
Perkebunan	PT PTPN III Holding	701.432

Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan

Pemerintah terus berkomitmen meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dalam mendukung ketahanan energi nasional.

70 kontrak untuk Energi Baru Terbarukan sebesar 1.214 MW ditandatangani tahun 2017



- Air
- Surya
- Minihidro
- Biogas & Biomassa
- Panas Bumi

PLTB Sidrap



*PLTB skala komersial pertama di Indonesia



Kapasitas

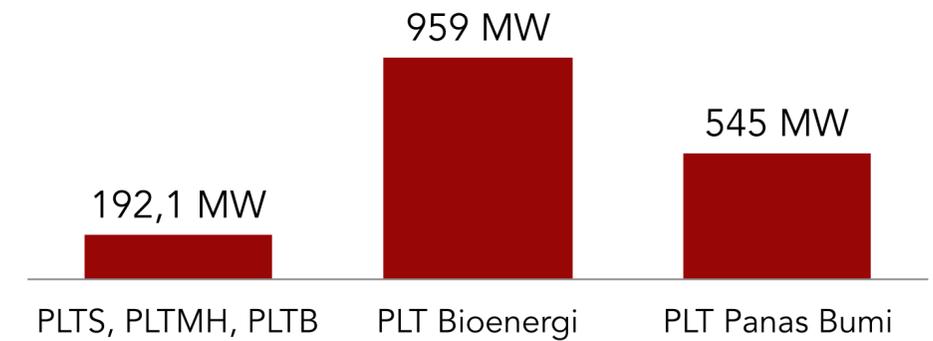


Nilai Investasi



Tenaga Kerja

Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik yang Bersumber dari EBT (2015 - Semester I 2018)

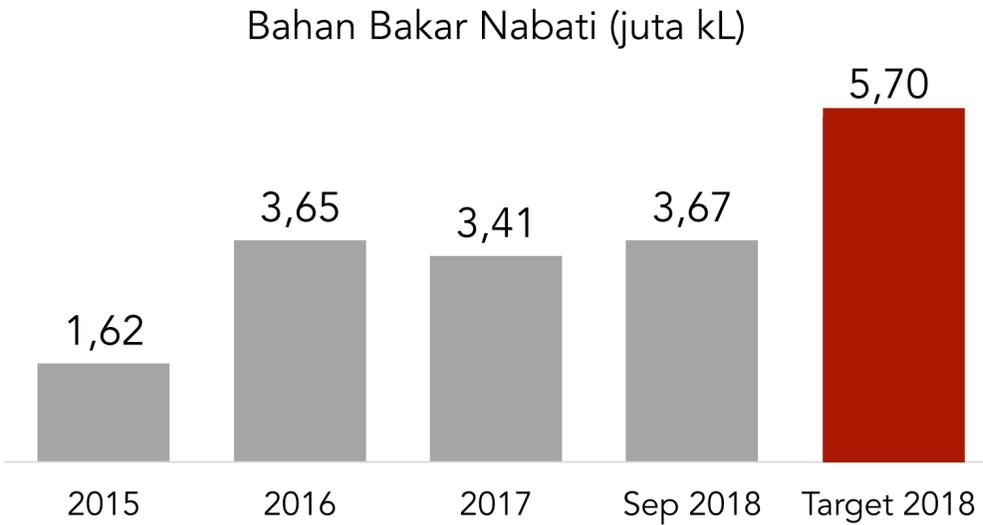


Sumber: Kementerian ESDM

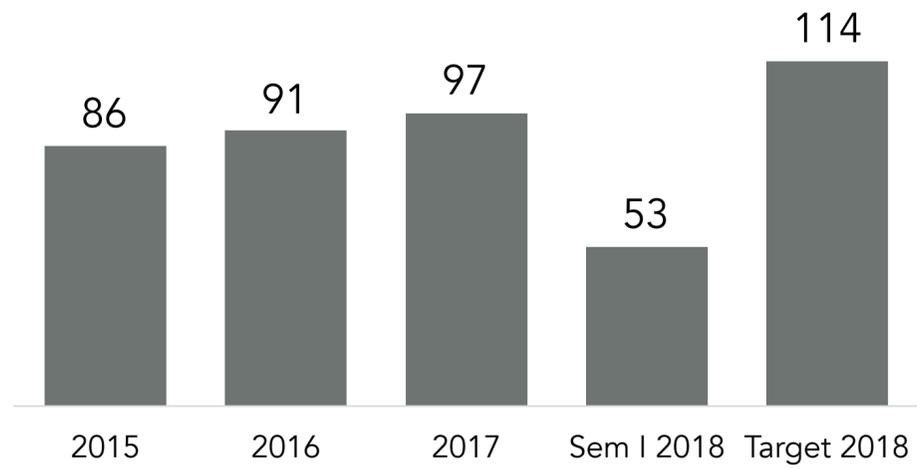
Pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk Kepentingan Nasional

Pemerintah menetapkan harga jual batu bara sehingga harga listrik tetap terjangkau. Demi mengurangi impor minyak, pemerintah juga menetapkan kebijakan mandatori bahan bakar nabati khususnya minyak kelapa sawit.

Kebijakan Mandatori Bahan Bakar Nabati B20/Biodiesel (Peraturan Presiden No. 66/2018)



Pemanfaatan Batu Bara untuk Keperluan Domestik (Juta Ton)



- ▶ Memperbaiki neraca perdagangan dengan mengurangi impor minyak sebesar 20%.
- ▶ Menguntungkan para petani karena harga komoditas kelapa sawit akan merangkak naik
- ▶ Memberikan insentif bagi produsen yang menjual biodiesel ke sektor non-PSO



Harga jual batu bara untuk pembangkit listrik untuk kepentingan umum ditetapkan:

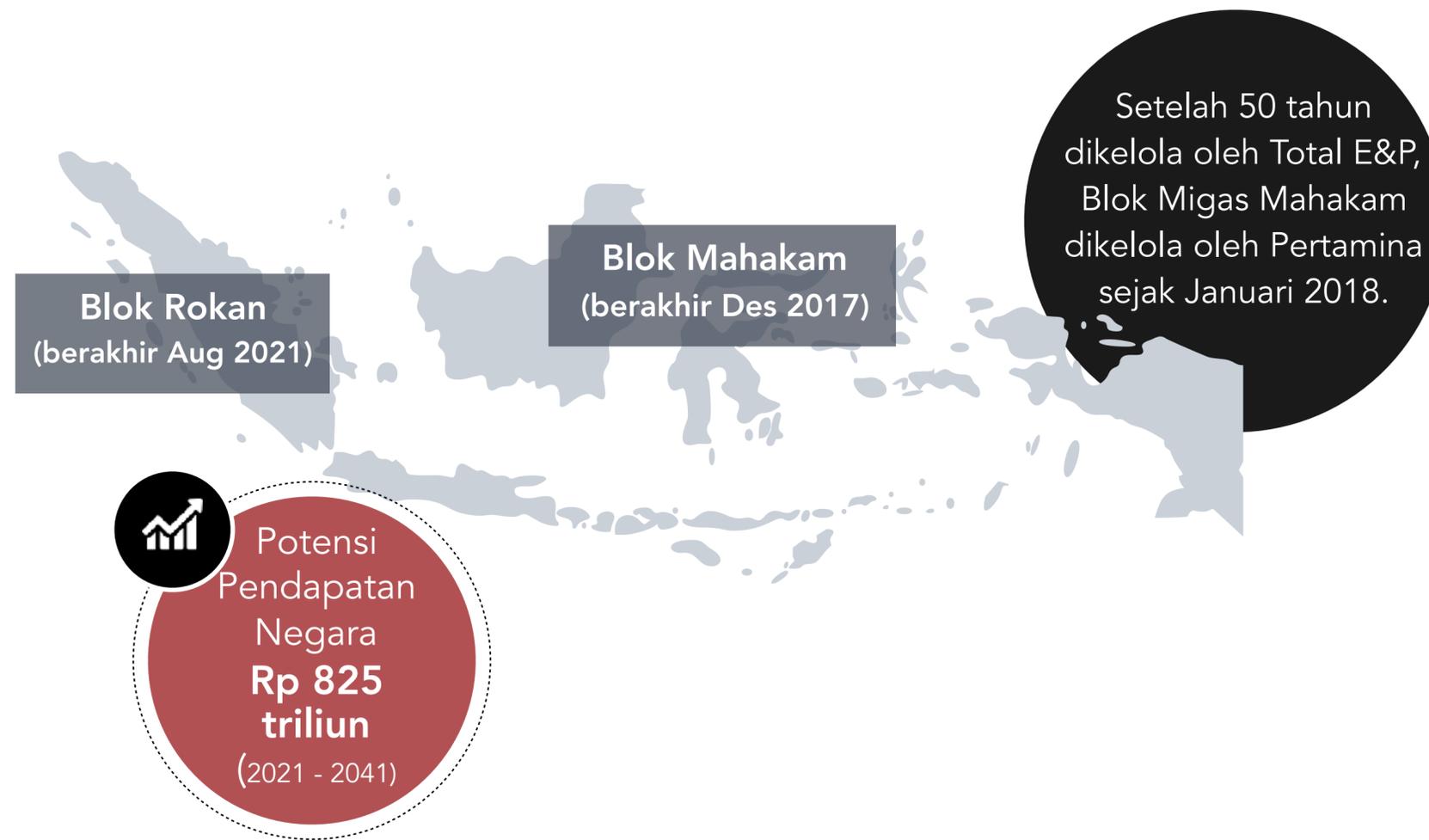
US\$ 70/ton

Sumber: Kementerian ESDM

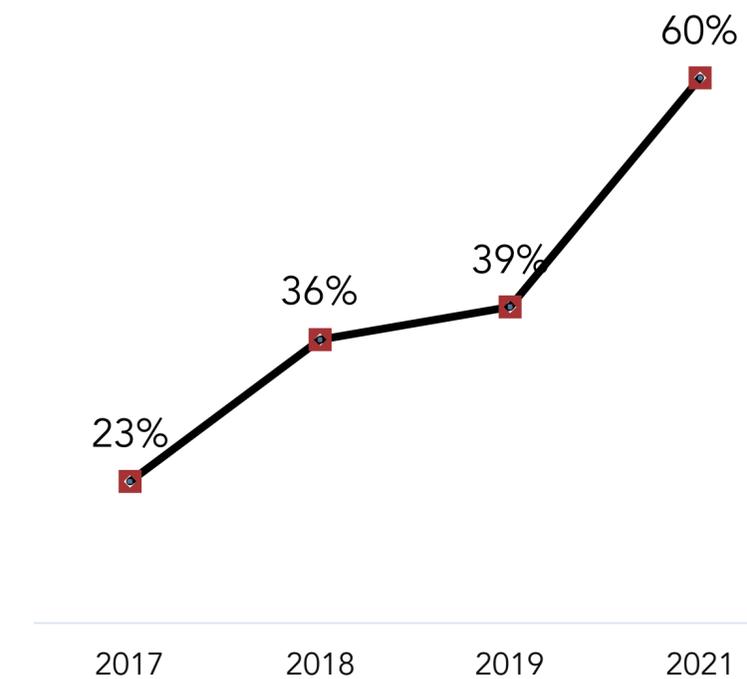
Penguasaan Blok-blok Migas Besar

Pemerintah mengambil alih blok-blok migas besar dan menyerahkannya kepada Pertamina. Demi kuatnya ketahanan energi nasional.

Pengalihan Pengelolaan Blok-blok Migas Besar yang Habis Kontrak Kepada Pertamina 2018



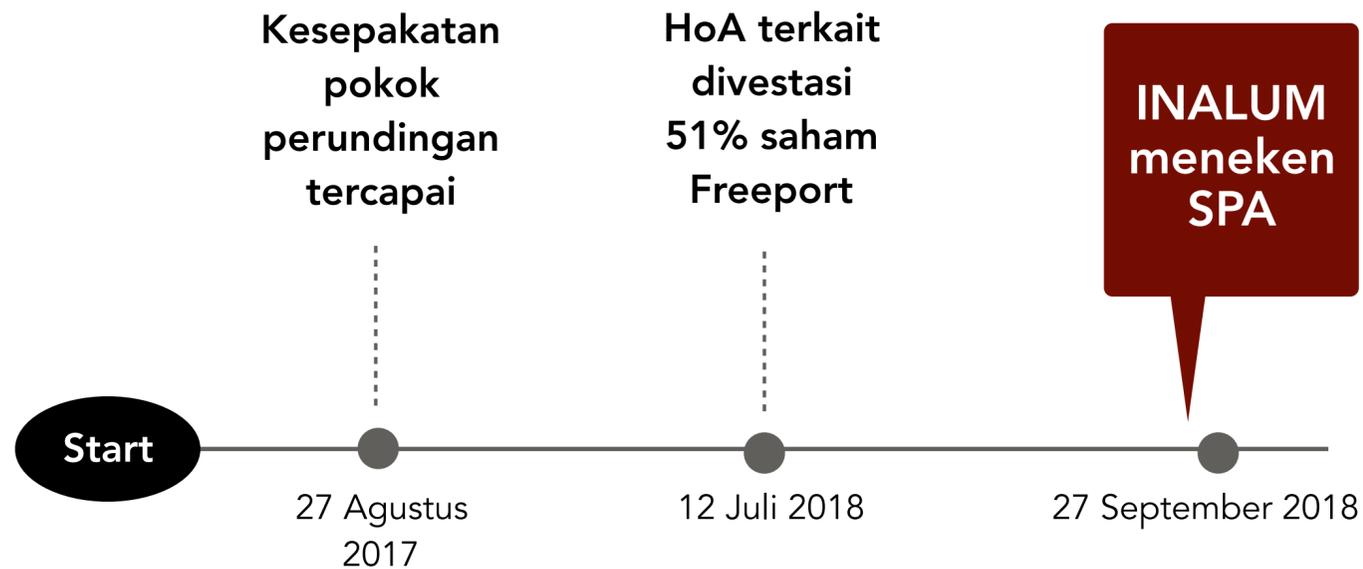
Kontribusi Produksi Minyak Pertamina Meningkat



Pada tahun 2021, 60% produksi migas nasional akan dikontribusikan oleh Pertamina

Divestasi Freeport

Setelah 50 tahun dimiliki pihak asing, Indonesia akhirnya menguasai 51 persen saham Freeport.
Negosiasi panjang demi anak-anak negeri.

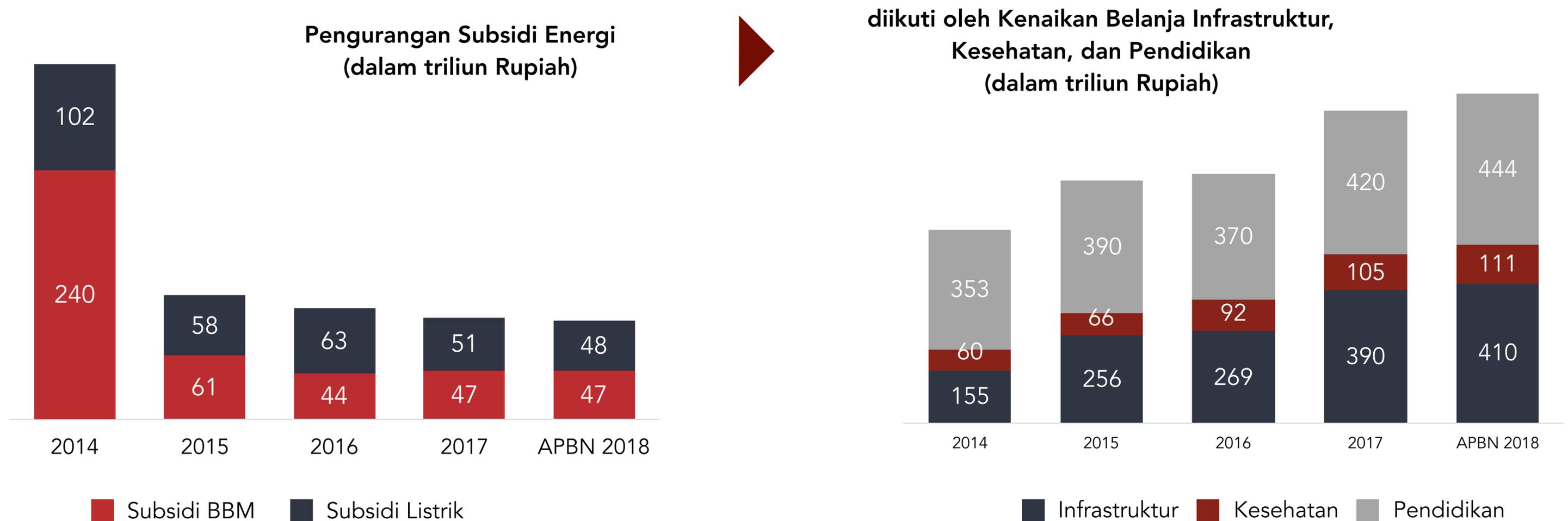


Dampak Positif

- ▶ Kelangsungan operasi PTFI (aktivitas ekonomi Papua)
- ▶ Pendapatan negara meningkat
- ▶ Terciptanya multiplier effect (smelter + TKDN)
- ▶ Transfer teknologi pengelolaan tambang paling kompleks
- ▶ Divestasi saham 51% yang lebih efisien
- ▶ Menghindari pengadilan arbitrase

Realokasi Subsidi untuk Belanja yang Lebih Produktif

Pemerintah secara bertahap mengurangi alokasi subsidi energi dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hasil penghematan dialihkan untuk kegiatan produktif, diantaranya infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Sebuah upaya mendorong peningkatan produktivitas dan pemerataan ekonomi.



Sumber: Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan

Perbaiki Statistik Pangan

Melalui kebijakan satu peta dan satu data, Pemerintah mengambil langkah strategis memperbaiki Statistik Pangan sebagai dasar pengambilan kebijakan.



Pemutakhiran Luas Baku Sawah Nasional

Kementerian ATR/BPN mengeluarkan **Kepmen ATR/Kepala BPN No 399/KEP-23.3/X/2018** tentang Penetapan Luas Baku Sawah Nasional 2018.

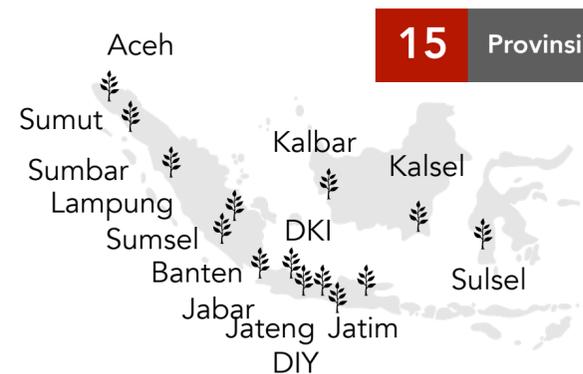
Luas baku sawah:



Pemetaan Sawah Beririgasi

Peta sawah beririgasi adalah hasil sinkronisasi peta laban baku sawah dan peta daerah irigasi

Diintegrasikan di

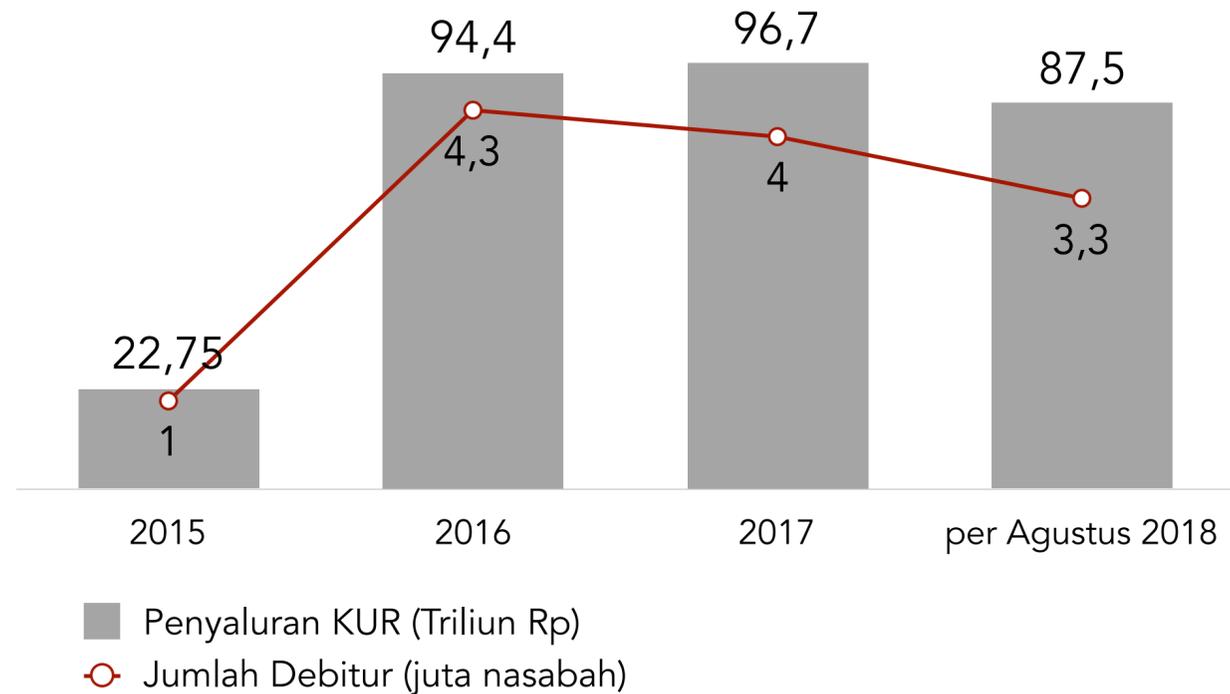


Penerapan Metode Kerangka Sampel Area (KSA) untuk estimasi produksi padi

- ▶ Dalam rangka memperbaiki data produksi padi dan beras nasional, pada tahun 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerapkan metode Kerangka Sampel Area (KSA) untuk menghasilkan luas panen padi yang selanjutnya dijadikan dasar untuk menghitung produksi padi.
- ▶ Metode teruji KSA cocok untuk karakter lahan sawah di Indonesia yang mayoritas berpetak kecil.
- ▶ Metode ini sudah diakui oleh lembaga internasional seperti IRRI, FAO, dan IFPRI. Selain itu, metode ini telah direkomendasikan oleh Forum Masyarakat Statistik (FMS).

Akses Permodalan

Pemerintah bekerja sama dengan Perbankan untuk meningkatkan penyaluran KUR sekaligus terus memperbaiki skema penyaluran. Demi memperluas akses permodalan bagi masyarakat.



Poin Perubahan KUR Tahun 2018

1. Kelompok usaha menjadi penerima KUR
2. Skema KUR khusus untuk perkebunan, peternakan, dan perikanan rakyat
3. Suku bunga KUR tahun 2018 menjadi 7%
4. Skema KUR multisektoral
5. Mekanisme pembayaran panen dan grace period
6. Perubahan istilah KUR ritel menjadi KUR kecil
7. Plafon KUR mikro untuk sektor produksi: rp25 juta/siklus. Di luar sektor produksi maks. Rp100 juta
8. Struktur biaya KUR penempatan TKI
9. Pengaturan porsi penyaluran minimum ke sektor produksi
10. KUR untuk masyarakat perbatasan
11. KUR untuk optimalisasi KUBE
12. Penyaluran KUR bersamaan dengan kredit lain (KUR, KPR, KKB, SSRG)

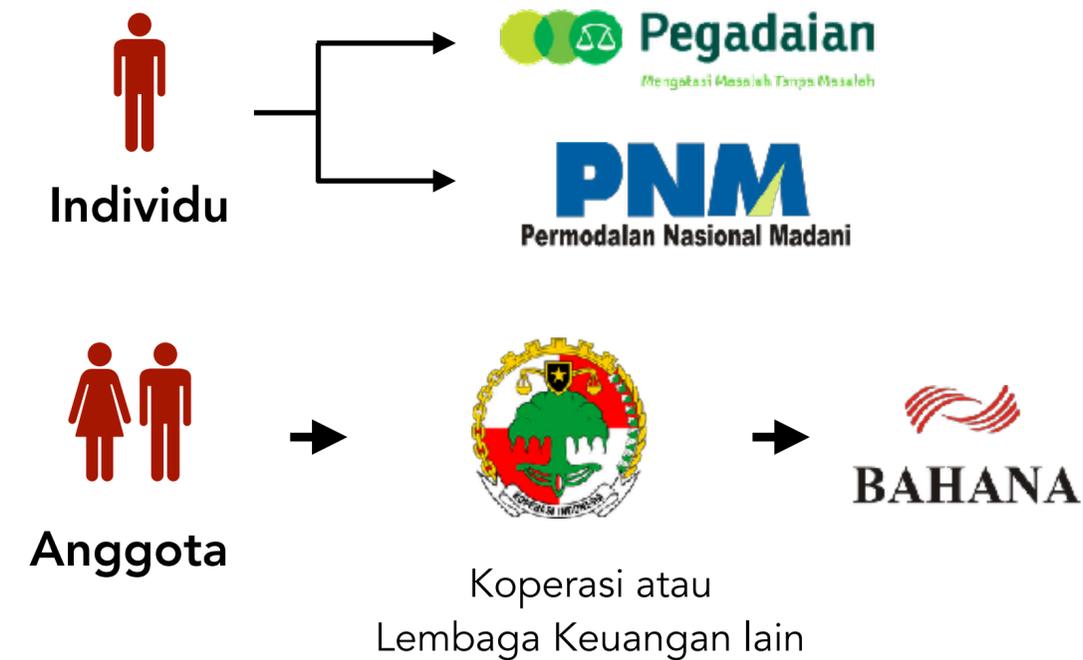
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pembiayaan untuk Mereka yang Tak Terjangkau Perbankan

Pemerintah memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tak bisa dijangkau oleh fasilitas pembiayaan perbankan.
Maksimal pinjaman Rp 10juta/orang untuk usaha produktif.

Program Ultra Mikro (UMi)

UMi didapatkan melalui:



Telah melayani di



>500
kab/kota



>50%
Kabupaten tertinggal

2017

Alokasi Dana sebesar **Rp 1,5 triliun**
Bekerja sama dengan **3 BUMN** sebagai penyalur utama dan **7 koperasi** sebagai *linkage*
Tersalur ke lebih dari **307ribu debitur** sebanyak **Rp 750 miliar**

2018

Alokasi Dana sebesar **Rp 2,5 triliun**
Bekerja sama dengan **3 BUMN** sebagai penyalur utama dan **16 koperasi** sebagai *linkage*
Tersalur ke lebih dari **400ribu debitur** sebanyak **Rp 1 triliun.**



Ekonomi Maritim

Kekuatan ekonomi maritim adalah fondasi utama bagi terwujudnya cita-cita Indonesia sebagai negara Poros Maritim dunia. Penguatan ekonomi maritim adalah bagian penting dari upaya pencapaian kemakmuran dan kejayaan laut Indonesia.

Langkah awal penguatan ekonomi maritim dilakukan dari penegakan hukum untuk menjaga kedaulatan laut agar memberikan nilai tambah bagi nelayan dalam peningkatan produksi dan industri perikanan.

Langkah selanjutnya adalah pembangunan konektivitas melalui pembangunan tol laut guna menekankan disparitas harga dan meningkatkan daya saing bangsa, serta menyempurnakan berbagai prasyarat penting untuk menciptakan tata kelola laut, termasuk di antaranya tata ruang laut.

Tak kalah penting dari itu adalah pengembangan budaya maritim di Indonesia. Budaya ini dapat dibentuk melalui pendidikan, khususnya kurikulum kemaritiman.

Beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sudah dilakukan, antara lain: penyiapan sumber daya manusia nelayan dan pendirian Bank Mikro Nelayan untuk mengembangkan aspek kewirausahaan nelayan.■

Peningkatan Kualitas SDM Maritim

Upaya jangka panjang untuk peningkatan sumber daya manusia maritim adalah melalui pendidikan, sekaligus dalam rangka menciptakan budaya maritim yang berkesinambungan mulai dari anak-anak hingga dewasa.



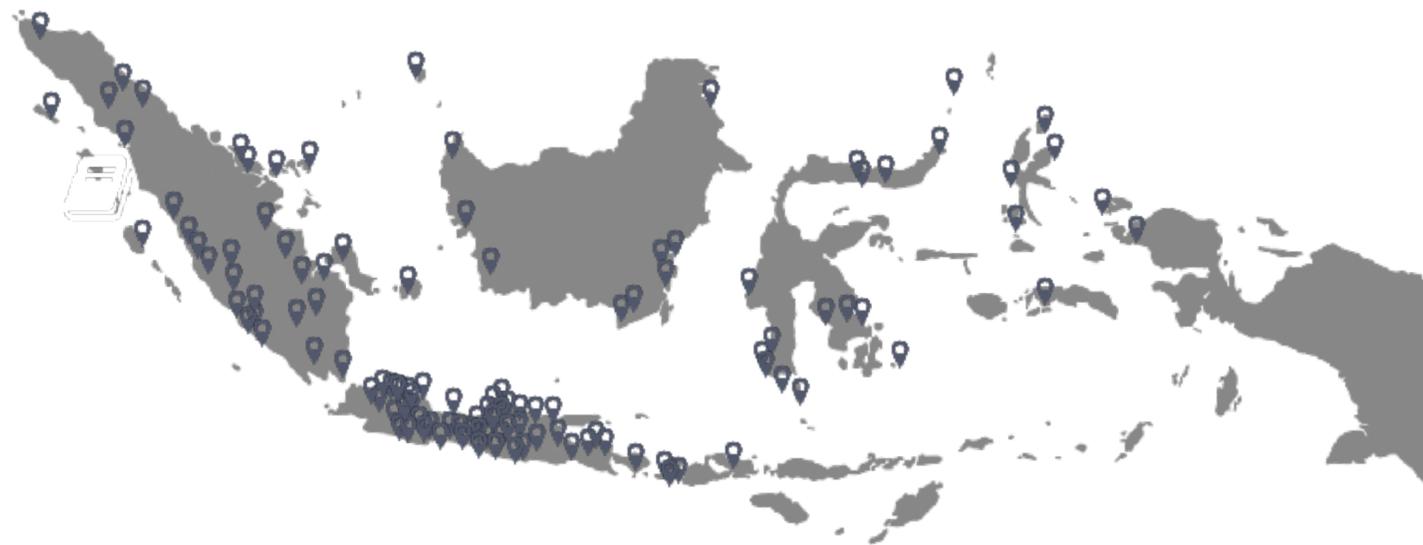
49% siswa SUPMN adalah Anak Nelayan

Keterangan:

- Sekolah Tinggi Perikanan
- Politeknik Kelautan & Perikanan
- Sekolah Usaha Perikanan Menengah Negeri
- Balai Pelatihan & Penyuluhan Perikanan
- Balai Diklat Aparatur
- Balai/Loka Riset

Bank Mikro Nelayan

Pembiayaan mikro ini berbentuk Badan Layanan Umum - Lembaga Pengelolaan Modal Usaha Kelautan Perikanan (BLU-LPMUKP) sebagai solusi mudah permodalan berbagai usaha kelautan dan perikanan, untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.



Bunga 3%
per tahun



9.535
Penerima Manfaat

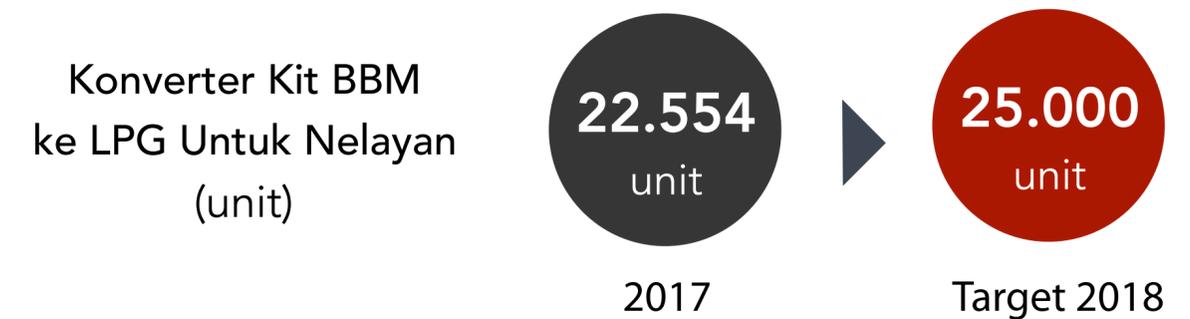


107
Kabupaten/Kota

Sumber: KKP

Penyediaan Akses Bahan Bakar Nelayan

Penyediaan konverter kit BBM ke LPG dapat mempermudah akses nelayan untuk mendapatkan bahan bakar serta mampu menurunkan biaya melaut.



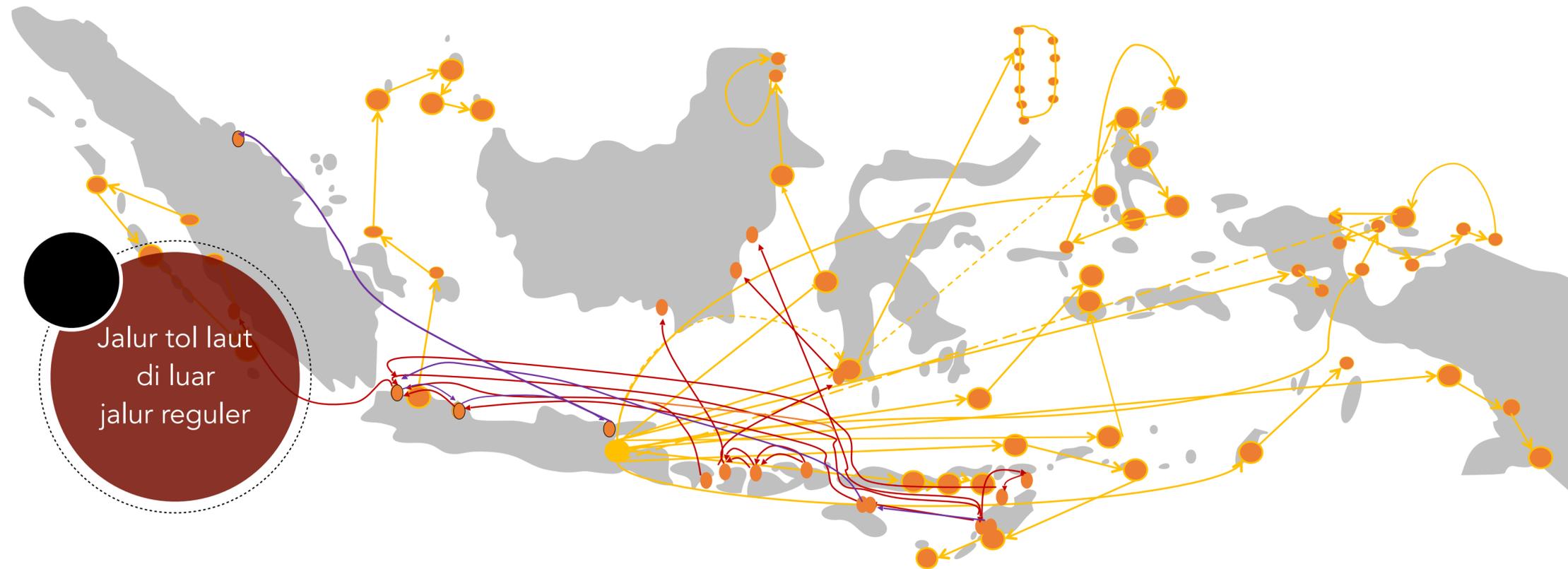
- ▶ Biaya operasional berkurang Rp30.000-Rp50.000/hari.
- ▶ Mengurangi konsumsi BBM.
- ▶ Energi lebih bersih dan aman.



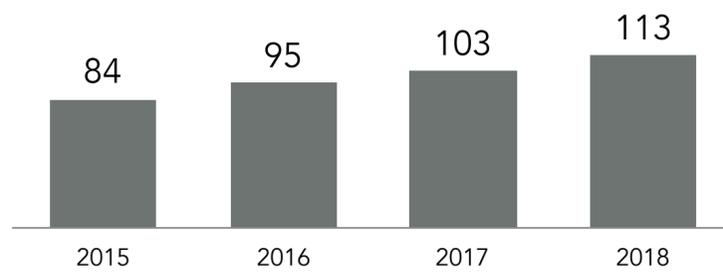
Sumber: Kementerian ESDM

Pembangunan Infrastruktur Konektivitas Laut

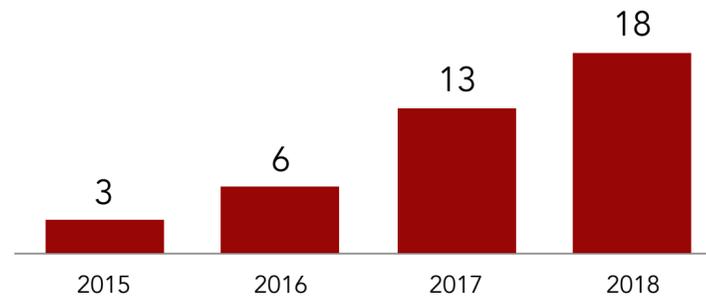
Manfaat tol laut terus diperbesar dengan pembangunan dan pengembangan pelabuhan laut serta terus meningkatkan trayek kapal tol laut, kapal perintis, kapal ternak, dan kapal pelayaran rakyat.



Trayek Kapal Perintis



Trayek Tol Laut



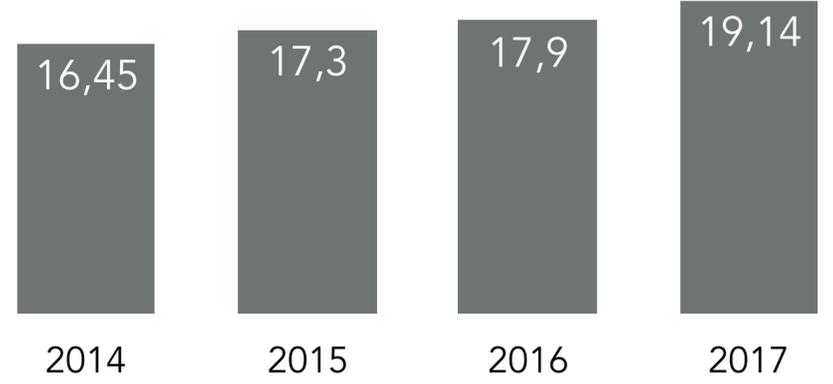
Trayek Kapal Ternak



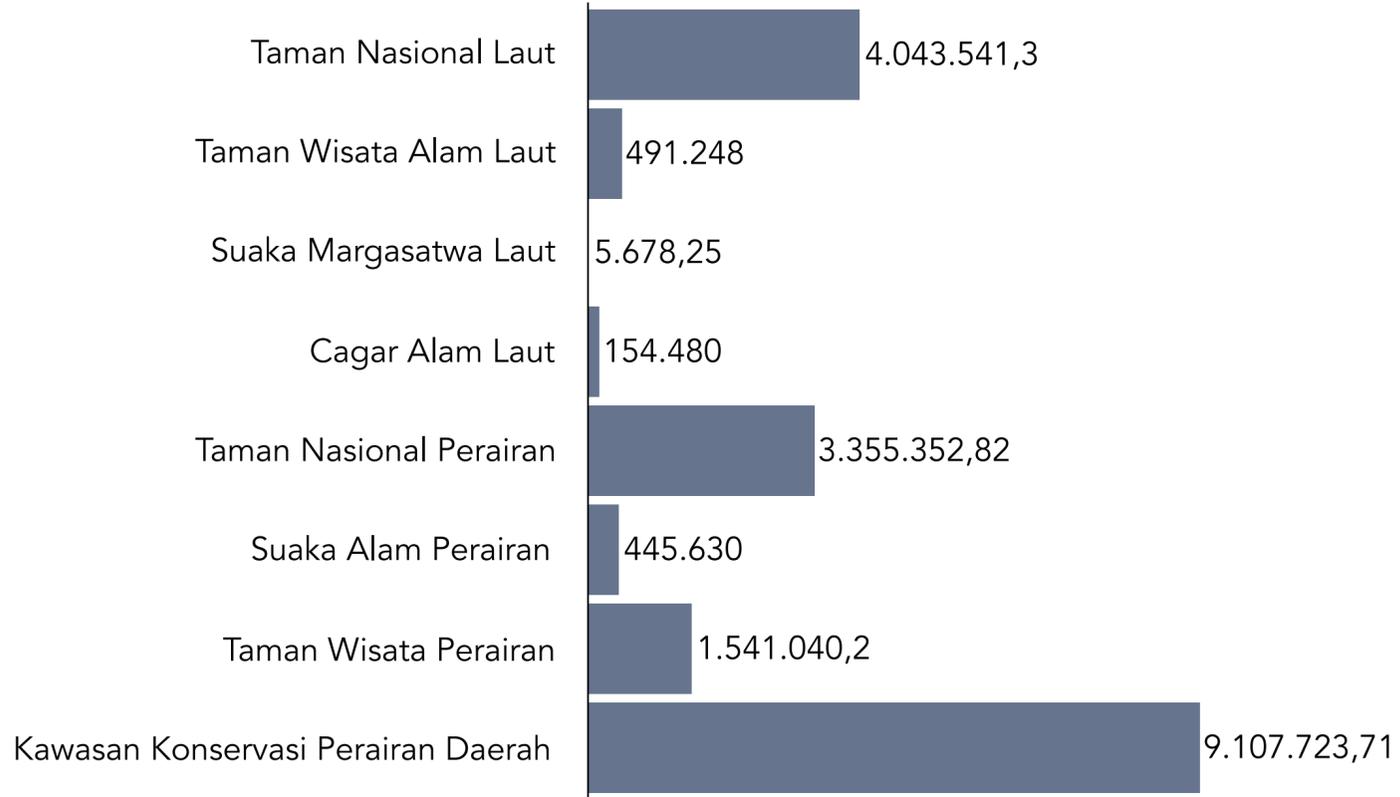
Luas Kawasan Konservasi Perairan Laut Terus Meningkat

Pemerintah berkomitmen penuh untuk melestarikan laut dan pesisir, sehingga kawasan perairan semakin terlindungi, daya dukung lingkungan perariran semakin meningkat dan sumberdaya ikan terjaga.


Luas Kawasan Konservasi (dalam Juta Hektar)



Tipe Kawasan Konservasi Tahun 2017 (dalam juta hektar)



Sumber: KKP

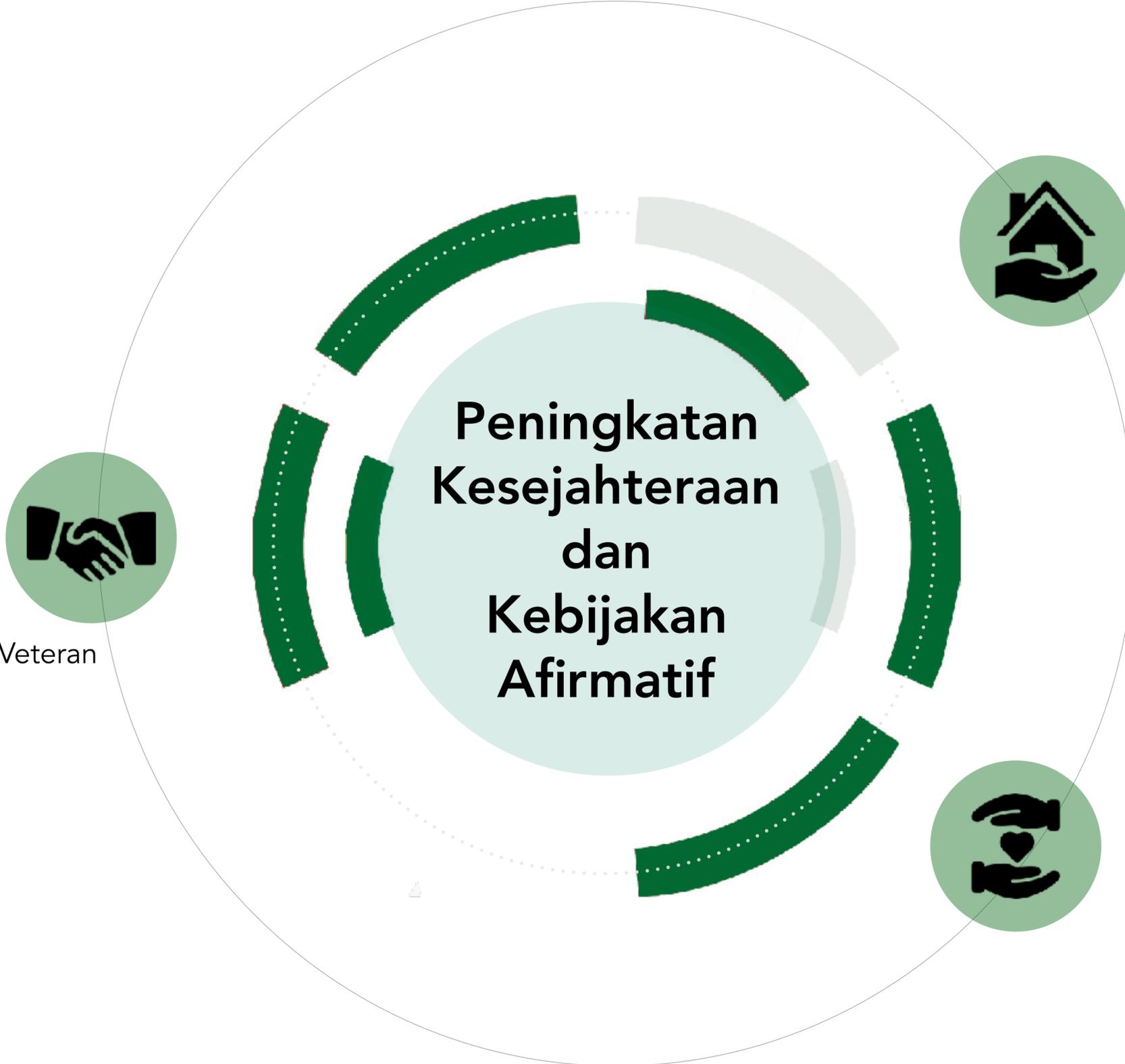
KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PENYERAHAN KARTU INDONESIA PINTAR (KI) KEPADA SISWA YATIM/PANTI



Bagian II

**Peningkatan Kesejahteraan
dan Kebijakan Afirmatif**



**Peningkatan
Kesejahteraan
dan
Kebijakan
Afirmatif**

Keberpihakan

- Pembangunan Pedesaan
- Pelayanan Haji
- Kesejahteraan Pensiunan dan Veteran

Pemenuhan Kebutuhan Dasar

- Pelaksanaan Bantuan Sosial
- Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- Peningkatan Pelayanan Pendidikan
- Perlindungan Sosial

Pemberdayaan

- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA)
- Kebijakan terhadap Disabilitas
- Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS)



Peningkatan Kesejahteraan dan Kebijakan Afirmatif

Salah satu aspek terpenting dalam pembangunan manusia adalah peningkatan kesejahteraan. Upaya ini dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia Indonesia serta perhatian pada kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

Kepastian pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan insentif kepada keluarga tidak mampu menjadi kunci utama program peningkatan kesejahteraan Pemerintah di tahun keempat.

Program yang dilakukan adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

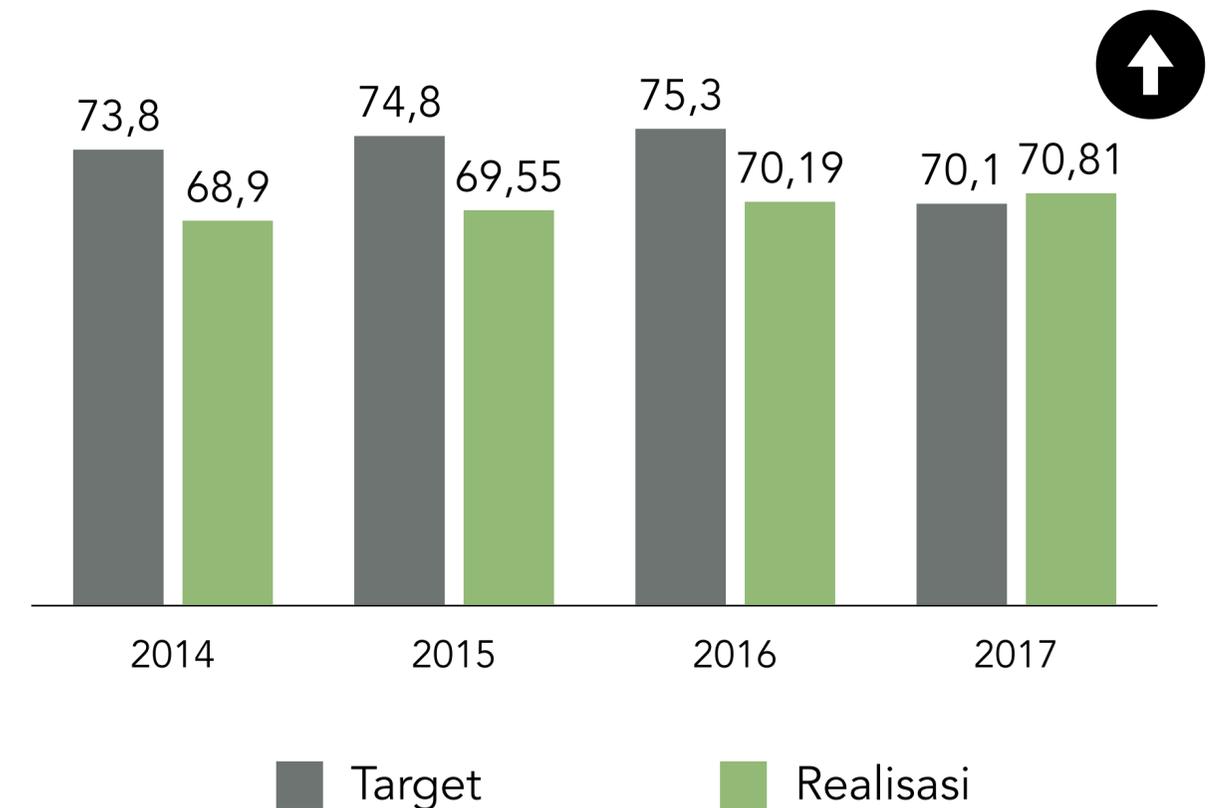
Pemerintah juga melaksanakan Jaminan Sosial bagi seluruh warga dan pekerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk pemberdayaan, Pemerintah menjalankan program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta berbagai program untuk penyandang disabilitas.

Dalam konteks keberpihakan, Pemerintah memiliki program penyaluran Dana Desa, memperbaiki pelayanan haji dan peningkatan kesejahteraan para veteran dan pensiunan PNS. ■

Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas hidup manusia yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren meningkat. Pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki angka-angka ini agar bisa lebih baik lagi.





Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Ketersediaan pangan, papan, pakaian, pendidikan, serta kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia bagi setiap manusia. Jika tidak terpenuhi kebutuhan ini, maka sulit mengharapkan manusia Indonesia untuk maju dan menjadi pemenang di berbagai bidang.

Pendidikan dan kesehatan memiliki peran yang sentral dalam pembangunan manusia, sebab dengan pendidikan dan kesehatan, manusia dapat memiliki pengetahuan dan kemampuan serta kebugaran untuk bertahan hidup dan mengembangkan segenap potensinya.

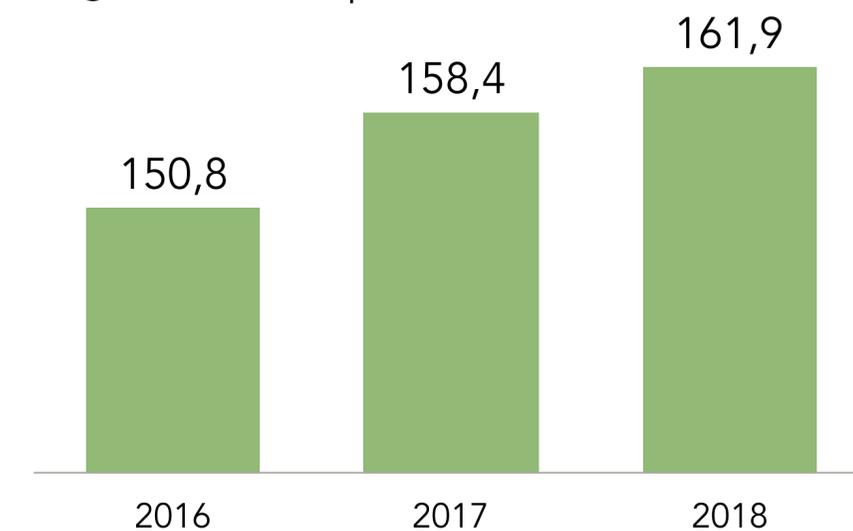
Dalam empat tahun Pemerintahan, terdapat tiga hal penting yang menjadi perhatian, yakni: Bagaimana kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, sanitasi, air minum, perumahan, serta bagaimana menjalankan perlindungan sosial, di antaranya memastikan rakyat mendapatkan Jaminan Sosial.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan cepat melakukan transformasi dari hanya untuk rumah tangga miskin menjadi mencakup seluruh rakyat Indonesia. ■

Pelaksanaan Jaminan Sosial

Dalam 4 tahun Pemerintah pemenuhan kebutuhan dasar yang dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan insentif bagi keluarga yang tidak mampu.

Anggaran Perlindungan Sosial yang terus Meningkat (triliun rupiah)



Pelaksanaan Bantuan Sosial

Pemerintah terus meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat melalui bantuan pendidikan, kesehatan, dan berbagai bentuk jaminan sosial lainnya.



Kartu Keluarga Sejahtera

Anggaran	Rp 17,4 Triliun
Target	10 Juta Keluarga
Capaian	9,8 Juta Keluarga

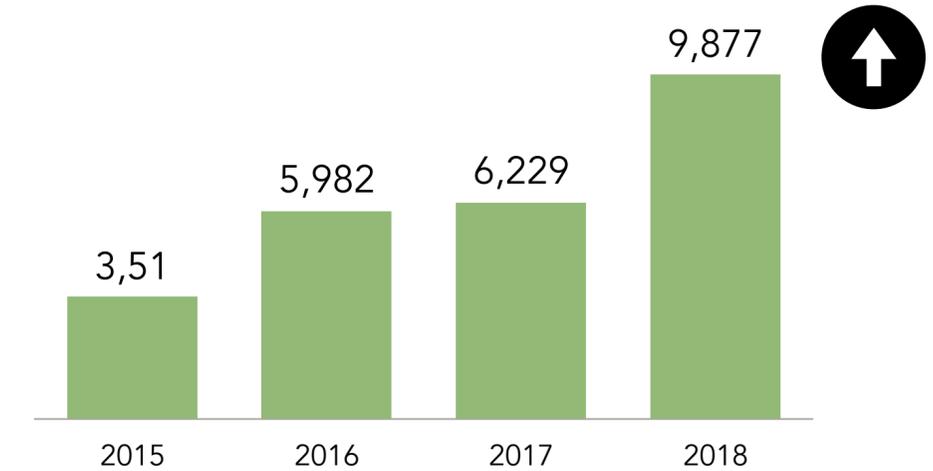


Kartu Indonesia Sehat

Anggaran	Rp 25,5 Triliun
Target	92,4 Juta Orang
Capaian	92,2 Juta Orang



Penerima PKH
(dalam juta rumah tangga)



Kartu Indonesia Pintar

Anggaran	Rp 12,5 Triliun
Target	18,9 Juta Siswa
Capaian	13,2 Juta Siswa



Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) merupakan sarana untuk menyalurkan Bansos dan Subsidi Pemerintah.



KKS mempunyai fungsi ganda yaitu menjadi Tabungan dan Dompet (e-wallet).

Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Badan Pengelolaan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan

Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pemerintah memberikan perlindungan kesehatan masyarakat dengan melaksanakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara berkeadilan.

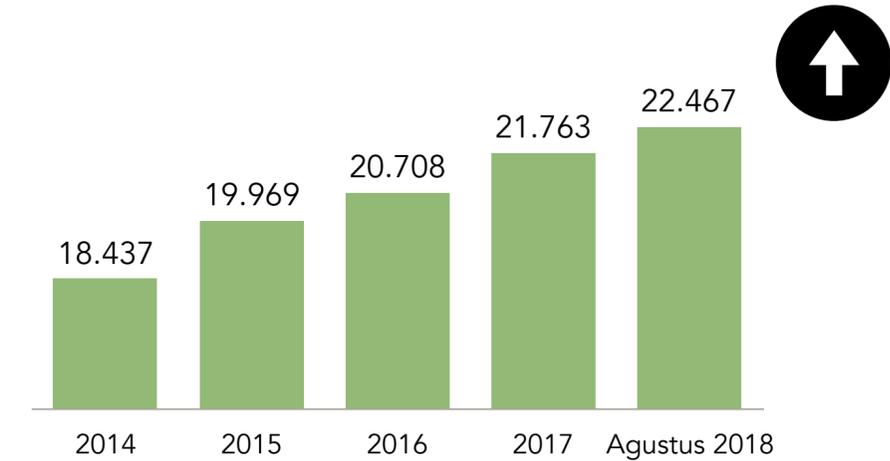


92.244.075

Jumlah penerima Kartu Indonesia Sehat yang dibebaskan dari iuran (s.d. Oktober 2018)



Jumlah FKTP Provider JKN (unit)

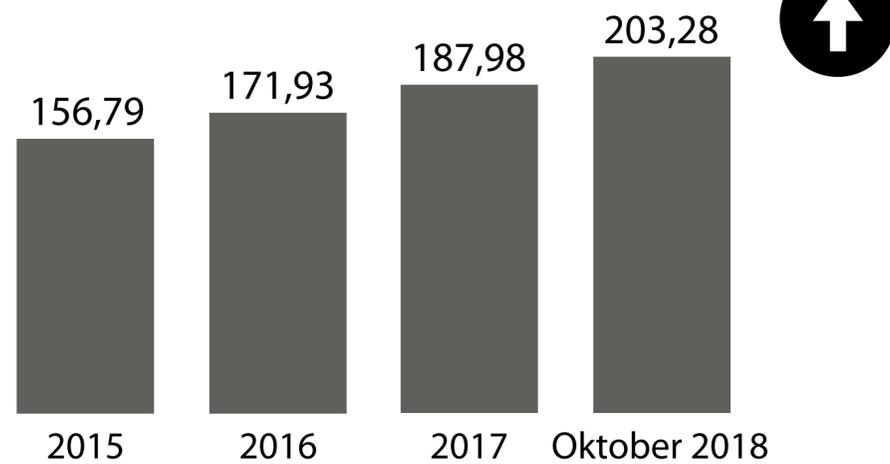


*FKTP: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

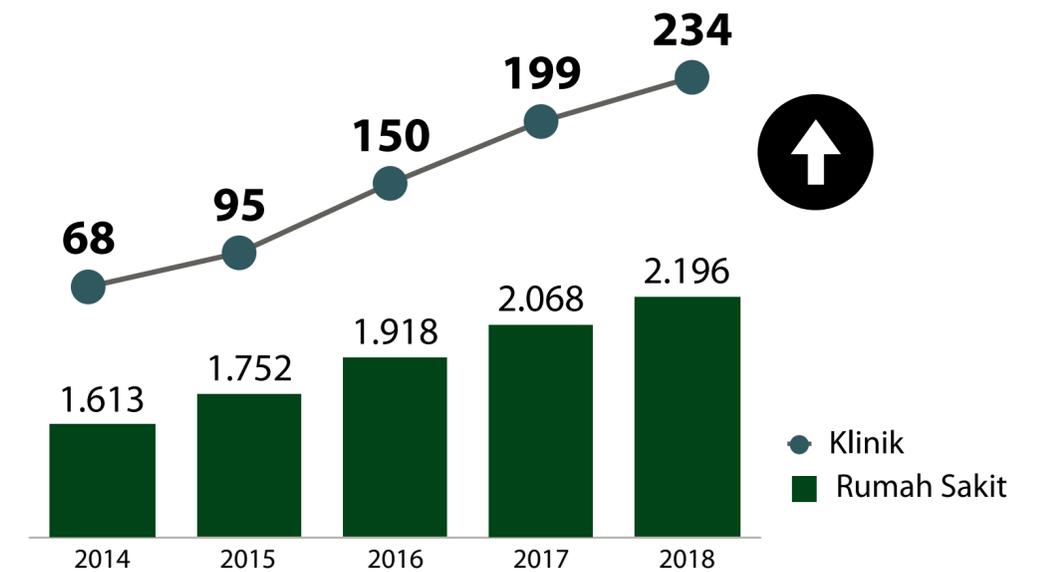


Peserta JKN (Dalam Juta Jiwa)

*JKN: Jaminan Kesehatan Nasional



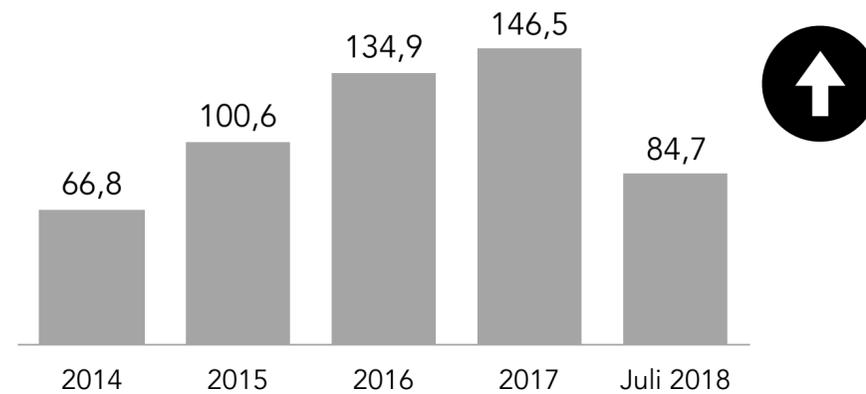
Jumlah FKRTL (unit)
*FKRTL: Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut



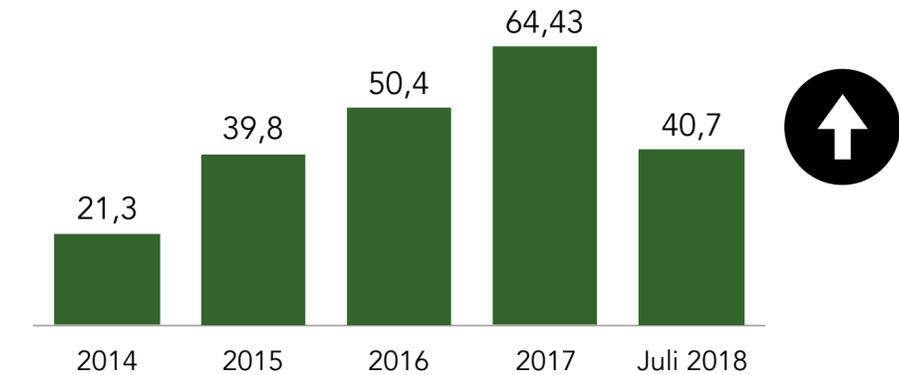
Peningkatan Akses terhadap Fasilitas Kesehatan

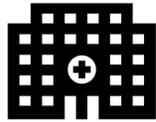
Dari tahun ke tahun, pemanfaatan pelayanan kesehatan melalui JKN terus meningkat, baik untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rumah sakit.

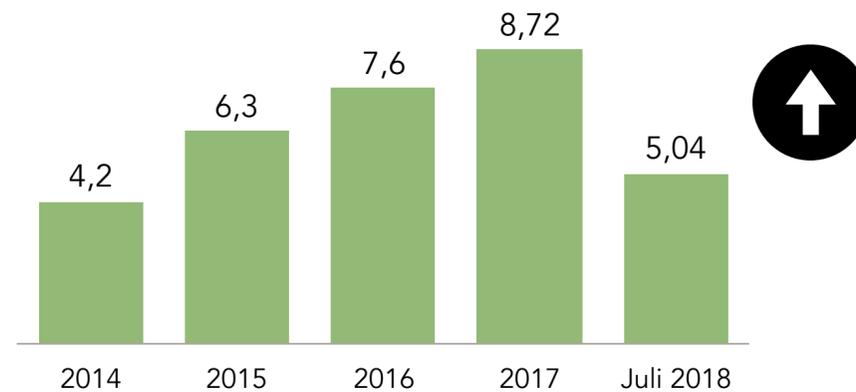

Pemanfaatan FKTP
(juta orang)




Pemanfaatan Poliklinik RS
(juta orang)




Pemanfaatan Rawat Inap RS
(juta orang)



Mengabdikan Melalui Pelayanan Kesehatan

Ketimpangan pelayanan kesehatan di berbagai wilayah perlu diatasi dengan penyediaan fasilitas kesehatan dan yang terpenting adalah tenaga kesehatan yang berkomitmen melayani sepenuh hati.



Penempatan Nusantara Sehat



Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)

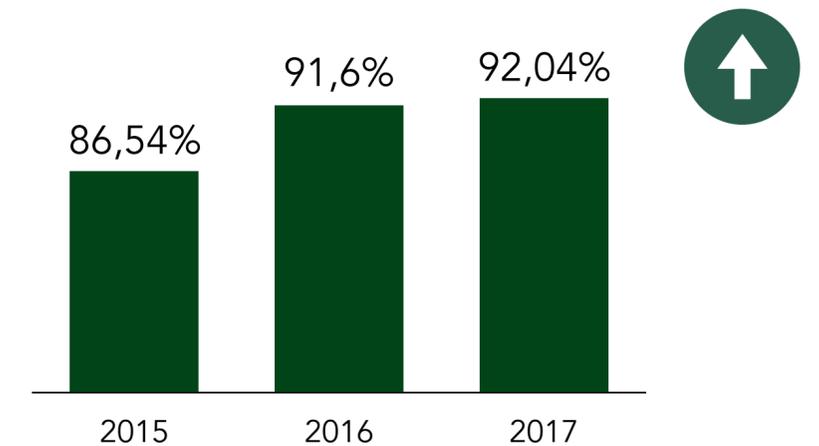
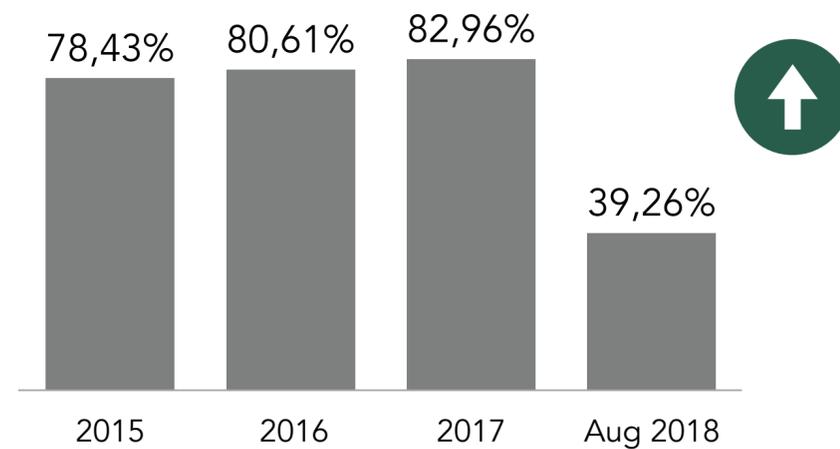
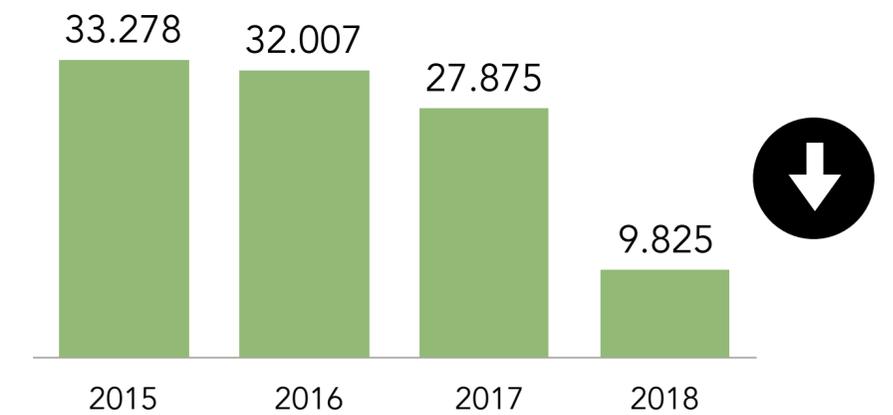
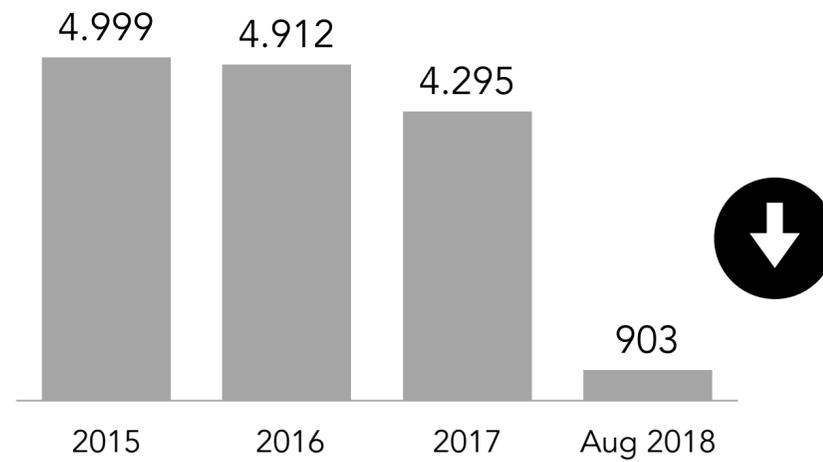


 : 638 Rumah sakit

 : 439 kab/kota di 34 provinsi

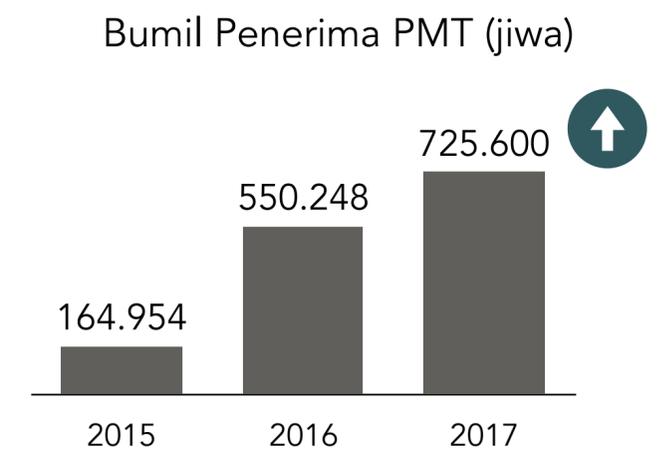
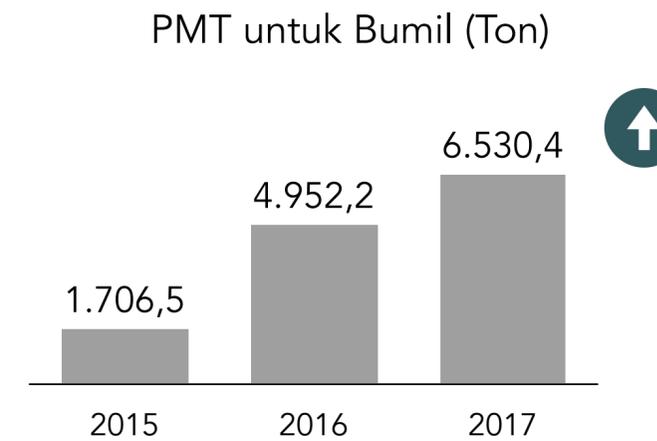
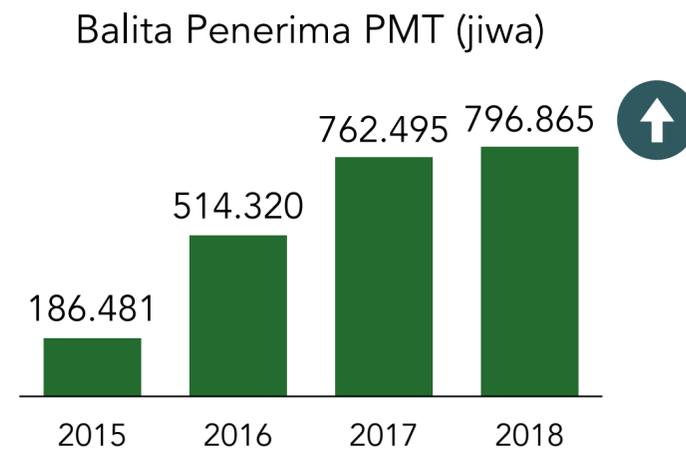
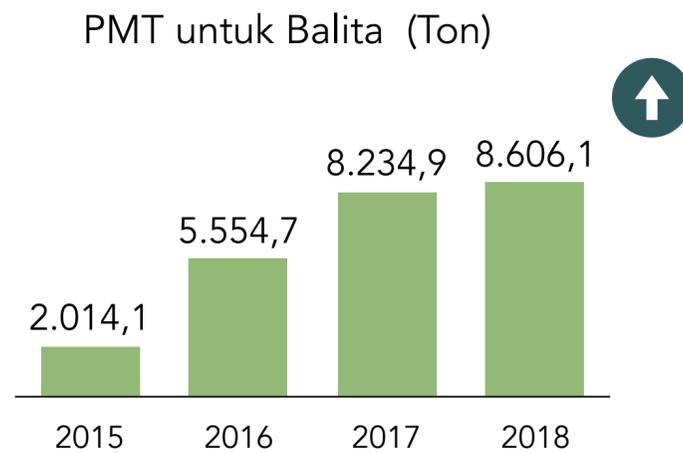
Perbaiki Kualitas Kesehatan Ibu dan Anak

Pemerintah berhasil menurunkan angka kematian ibu dan anak, memastikan persalinan dibantu oleh tenaga kesehatan dan cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) meningkat.



Kesehatan untuk Generasi Mendatang

Peningkatan gizi dan pencegahan stunting menjadi fokus utama Pemerintah dalam memastikan generasi masa depan yang unggul dan berdaya saing

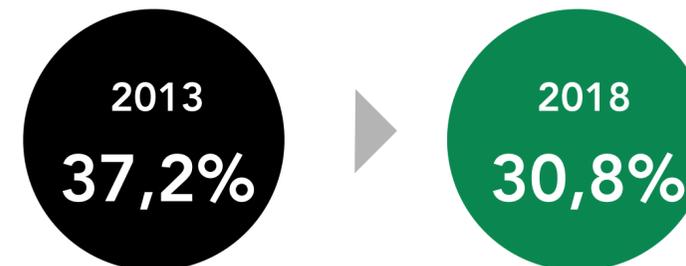


***PMT: Pemberian Makanan Tambahan** adalah program intervensi Pemerintah bagi balita yang menderita kurang gizi dimana tujuannya untuk meningkatkan status gizi anak.

***BUMIL** : Ibu Hamil



Penurunan Jumlah Balita Prevalensi Stunting

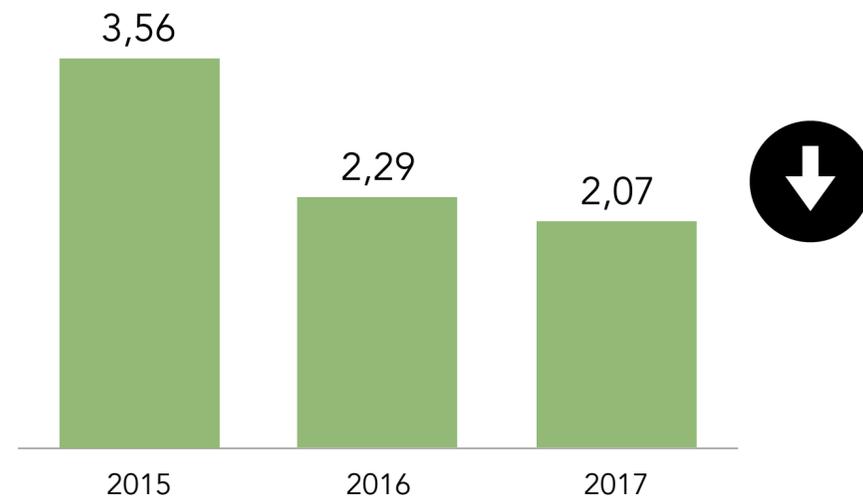


Ket: Data diambil berdasarkan survei 5 tahunan oleh Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) Kementerian Kesehatan.

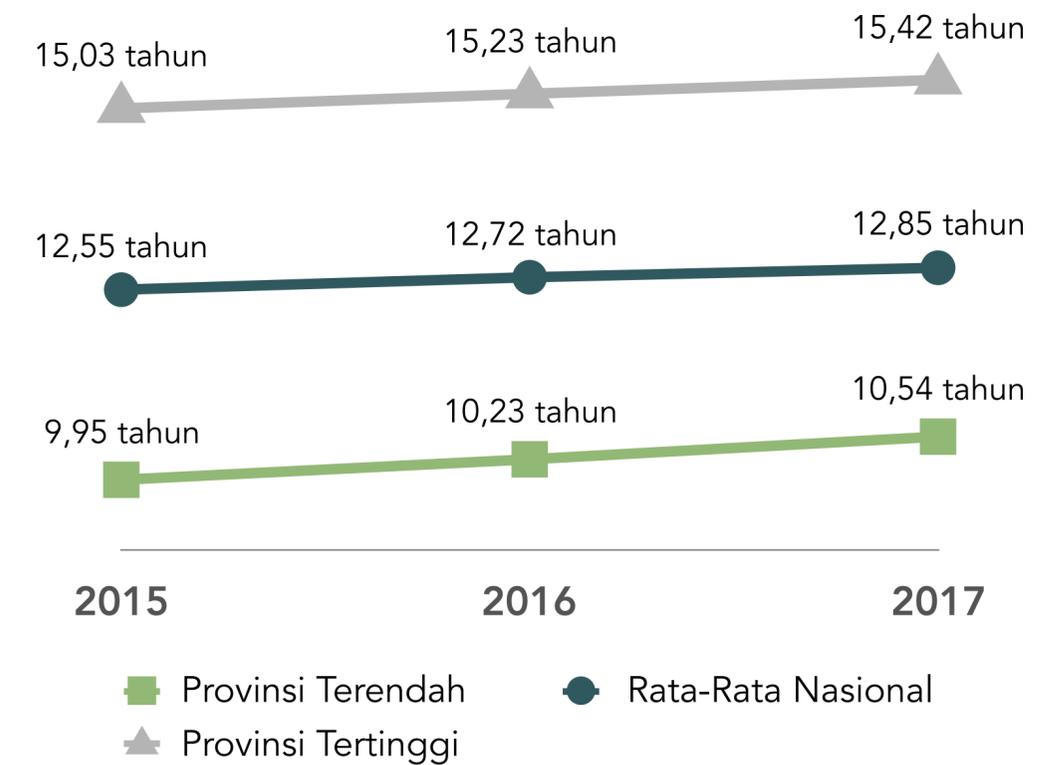
Peningkatan Kualitas Pendidikan

Pendidikan yang mendukung pengembangan karakter dan kepribadian utuh sebagai bangsa pemenang menjadi fokus kerja Pemerintah dalam membenahi layanan pendidikan.

Angka Buta Aksara nasional terus menurun



Harapan Lama Sekolah meningkat dengan Kesenjangan antar daerah mengecil

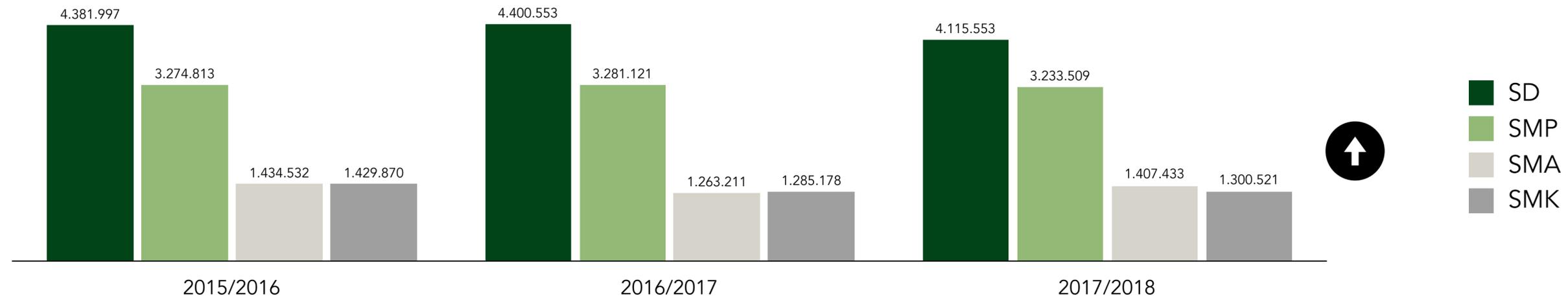


Pengendalian Jumlah Kelulusan dan Putus Sekolah

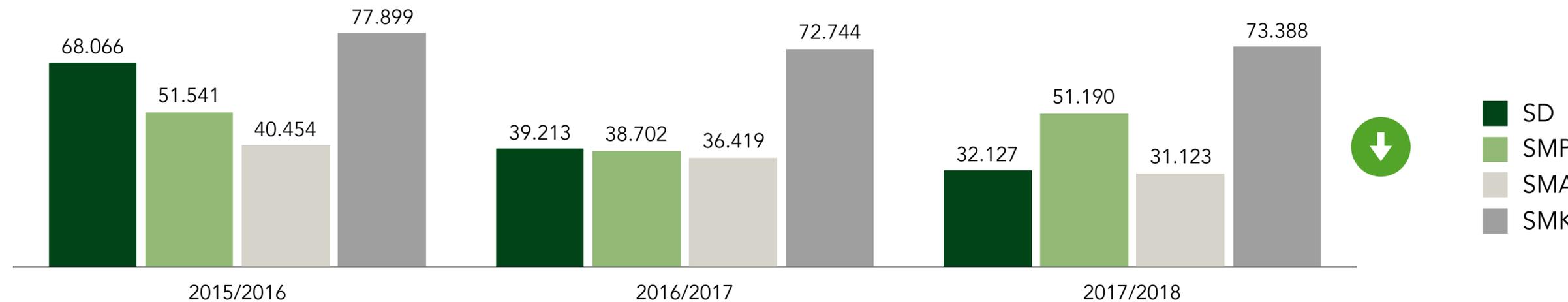
Pemerintah berusaha mengendalikan agar tren jumlah kelulusan meningkat dan jumlah putus sekolah menurun.



Jumlah Lulus Sekolah

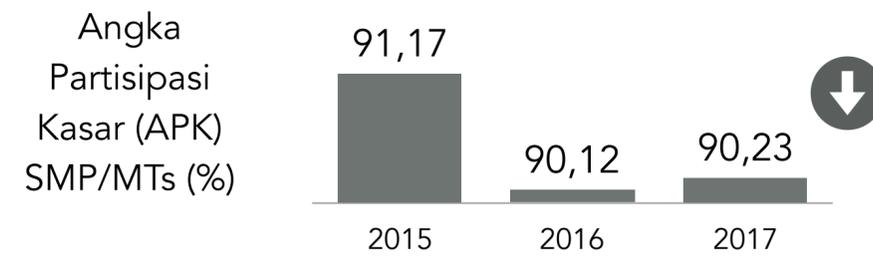
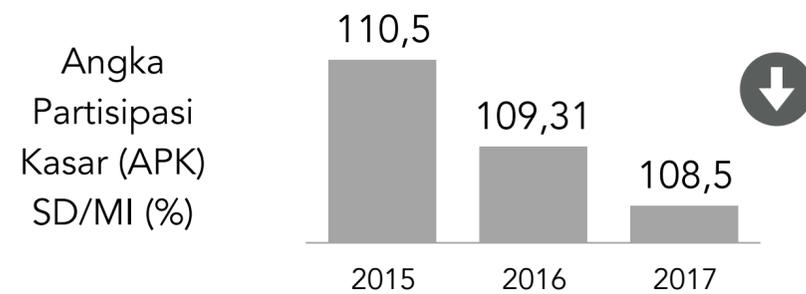


Jumlah Putus Sekolah

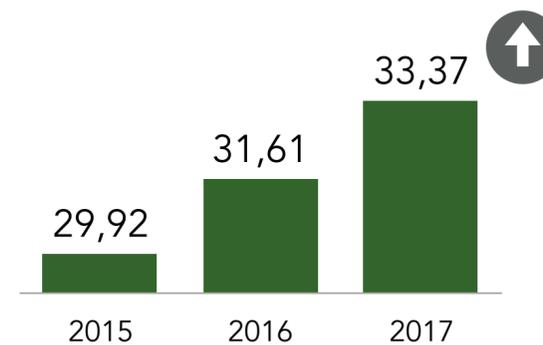
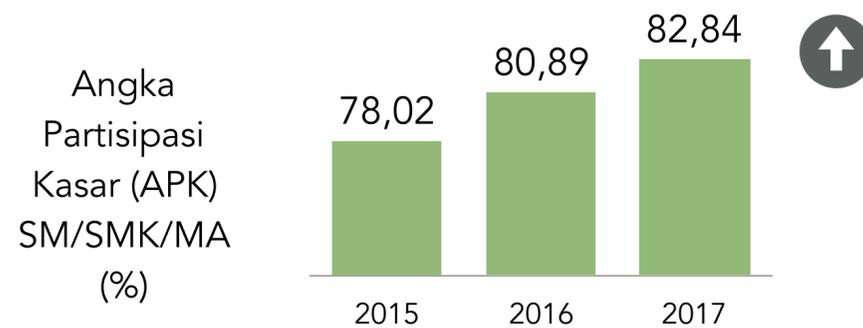


Partisipasi Pendidikan Meningkat

Angka partisipasi sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi meningkat secara nasional.



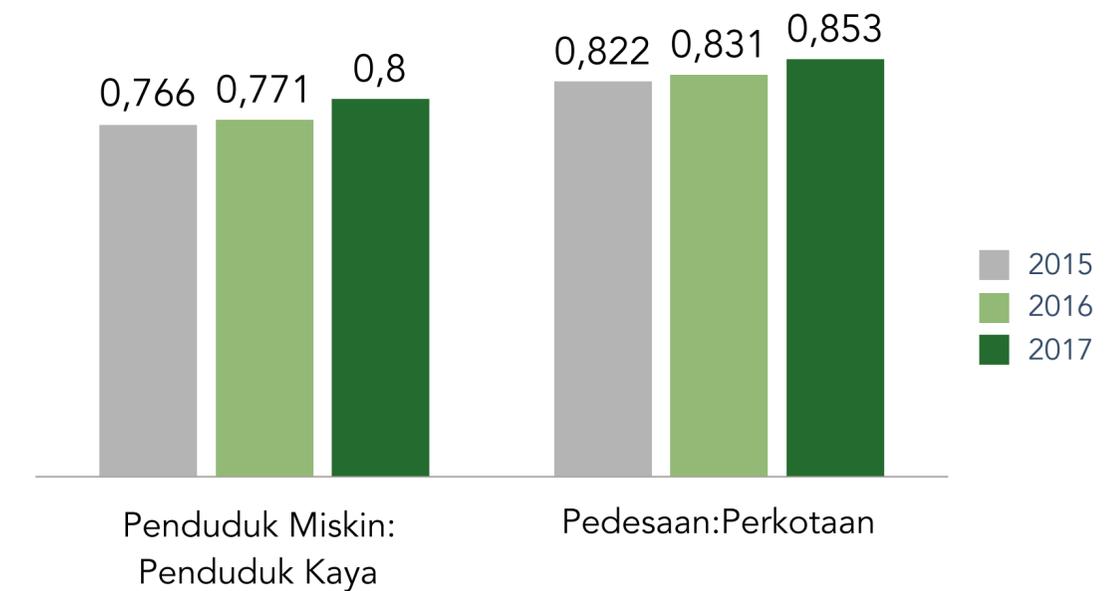
Ket: Jumlah siswa di bawah umur 7 tahun semakin sedikit



*APK: Persentase jumlah aktual siswa yang bersekolah dalam jenjang tertentu (SD, SMP, SMA dan PT) terhadap total penduduk berusia sekolah pada jenjang tersebut.

Pemerataan Pendidikan

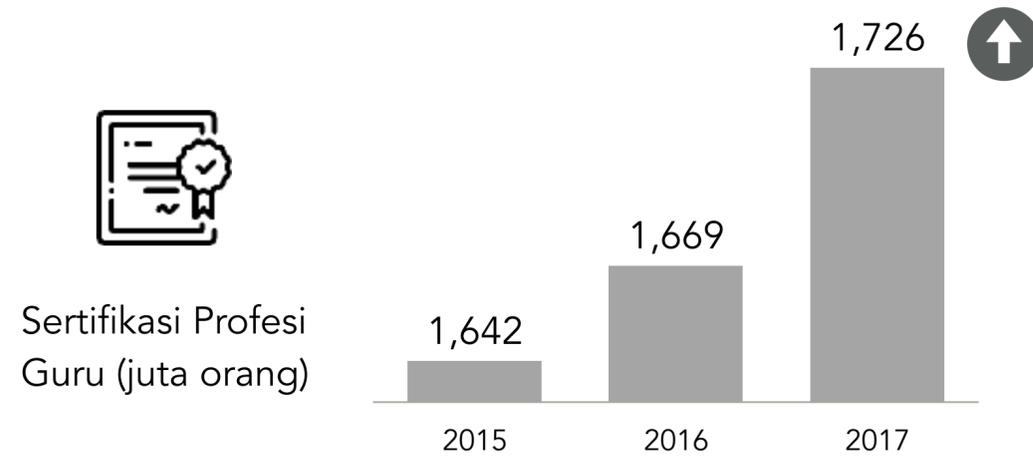
Pemerataan pendidikan menengah antara penduduk miskin dan penduduk kaya serta antara penduduk pedesaan dan perkotaan semakin baik.



Ket: Makin mendekati angka 1,00 maka semakin merata

Pembenahan Kualitas Guru

Pemerintah terus meningkatkan kualitas guru melalui program sertifikasi profesi, pelatihan keahlian ganda dan memastikan tersedianya guru di daerah tertinggal, terdepan, terluar.



PP No. 19/2017 tentang Guru

Permendikbud No. 15/2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru



Sasaran:

- Tunjangan profesi guru non-PNS: 210.269 orang
- Tunjangan khusus guru non-PNS: 23.751 orang

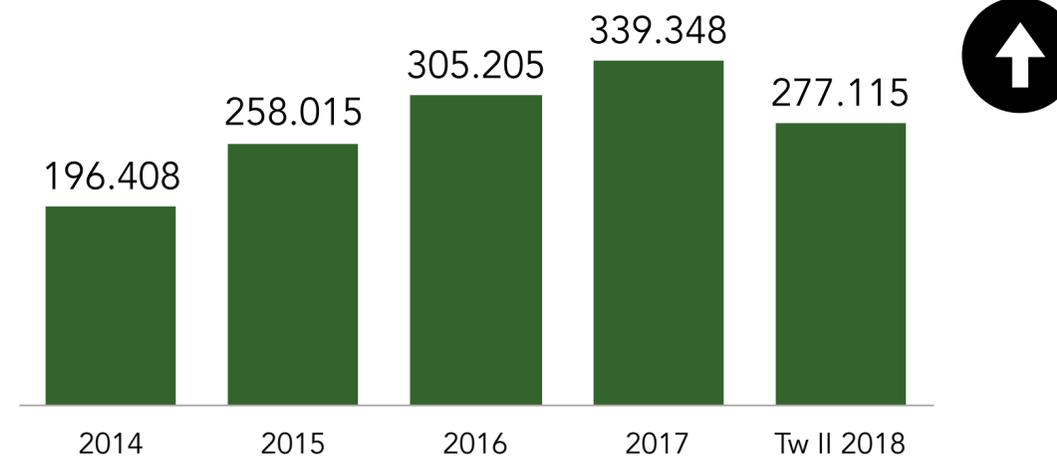


Beasiswa untuk Mahasiswa Kurang Mampu yang Berprestasi

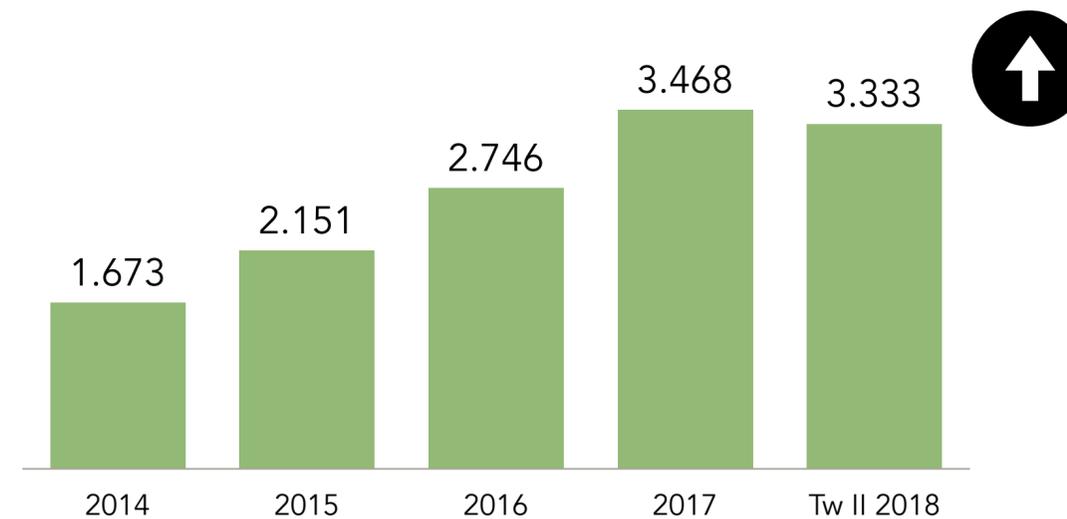
Akses pendidikan tinggi diberikan melalui bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu (Bidikmisi) dan program Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) bagi mahasiswa Papua dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).



Mahasiswa Penerima Bidikmisi terus meningkat setiap tahun



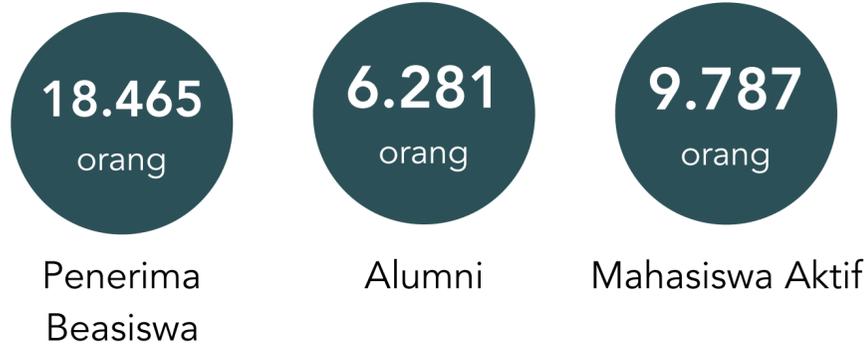
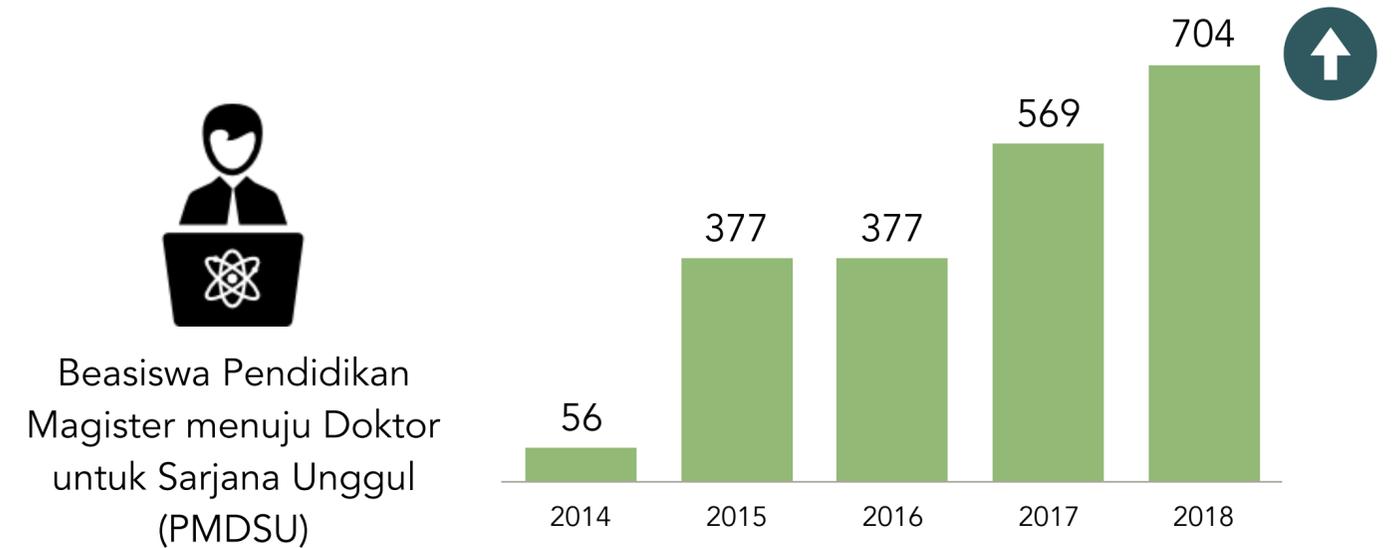
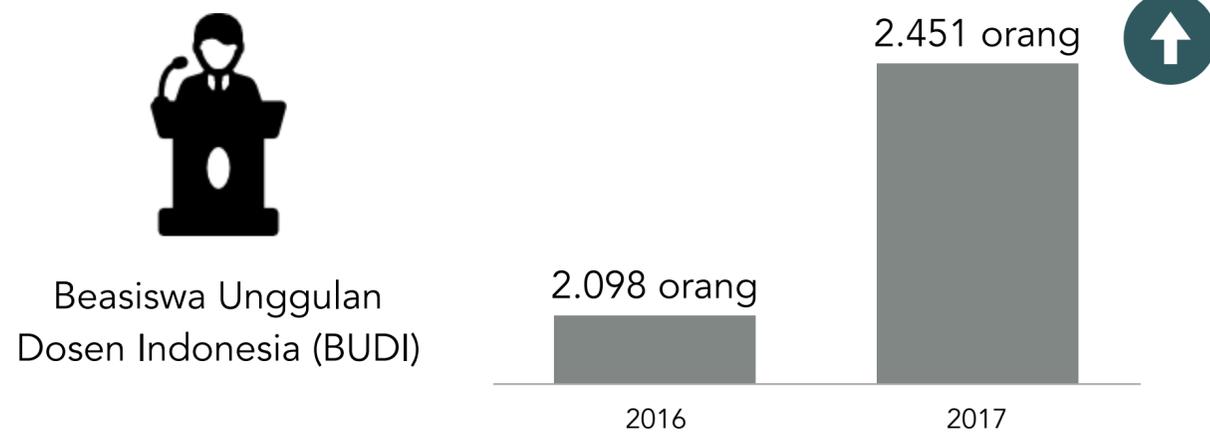
Mahasiswa Penerima Beasiswa ADik Papua dan 3T



Sumber: Kemenristekdikti

Dukungan Beasiswa Pendidikan Tinggi

Dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia, Pemerintah memberikan dukungan beasiswa kepada mahasiswa, dosen, peneliti, dan sarjana unggul



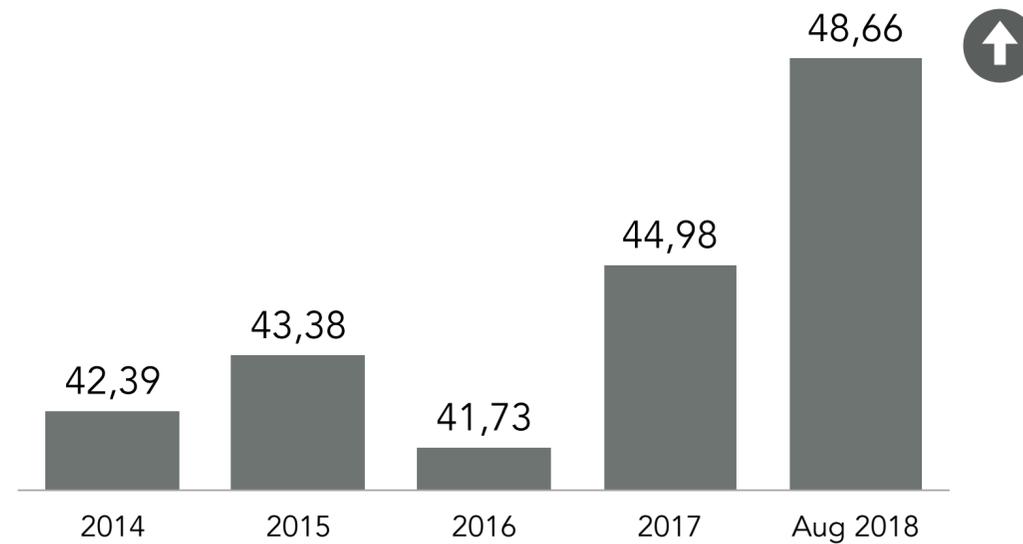
PMDSU merupakan program percepatan pendidikan untuk sarjana unggul guna mencapai pendidikan Doktor (S3) dalam waktu 4 tahun.

Jaminan Ketenagakerjaan bagi Pekerja dan Buruh Migran

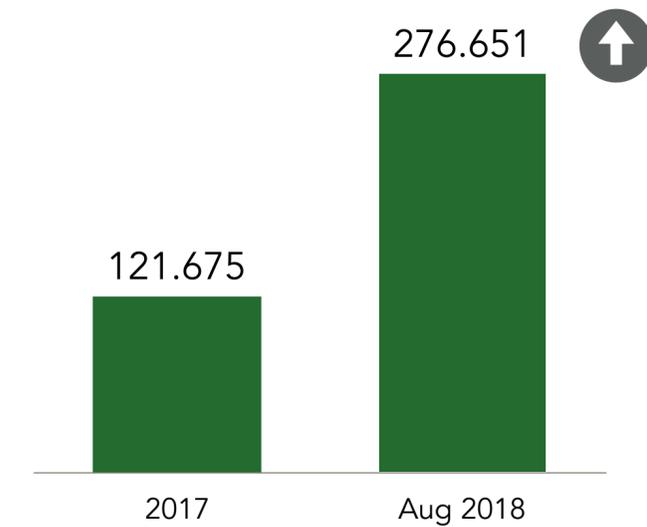
Pemerintah melindungi masyarakat dari risiko akibat kerja, seperti kecelakaan kerja dan kematian melalui Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian serta Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.



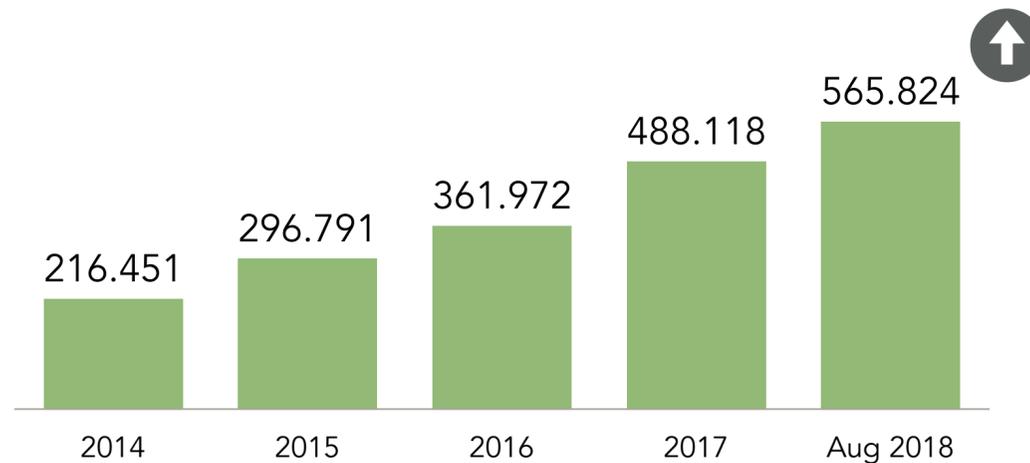
Peserta BPJS Ketenagakerjaan (dalam juta jiwa)



Peserta Buruh Migran (dalam juta jiwa)



Pemberi Kerja/ Badan Usaha Aktif



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan

Menyediakan Hunian Layak untuk Rakyat

Kualitas hidup yang baik, ketersediaan hunian layak merupakan syarat yang harus dipenuhi, meliputi perumahan, ketersediaan sanitasi, dan ketersediaan air bersih.

Capaian Pembangunan Perumahan



Rumah Susun

31.488 unit



Rumah Khusus

17.808 unit



Rumah Swadaya

292.865 unit



**FLPP & SSB/
SSM***

514.782 unit



SBUM**

282.729 unit

Pengembangan Infrastruktur Pemukiman (capaian hingga 2017)



Pembangunan Sistem
Penyediaan Air Minum

20.438 lt/dt



Penanganan Kawasan
Pemukiman Kumuh

11.565 Ha



Sanitasi dan Persampahan

9.616.334 KK

*FLPP: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
SSB/SSM: Subsidi Selisih Bunga/ Subsidi Selisih Margin
**SBUM: Subsidi Bantuan Uang Muka



Pemberdayaan

Kualitas manusia Indonesia secara kolektif akan meningkat apabila terjadi penguatan berbagai komponen masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah memberi perhatian kepada petani miskin dan masyarakat adat, perempuan dan anak serta para penyandang disabilitas.

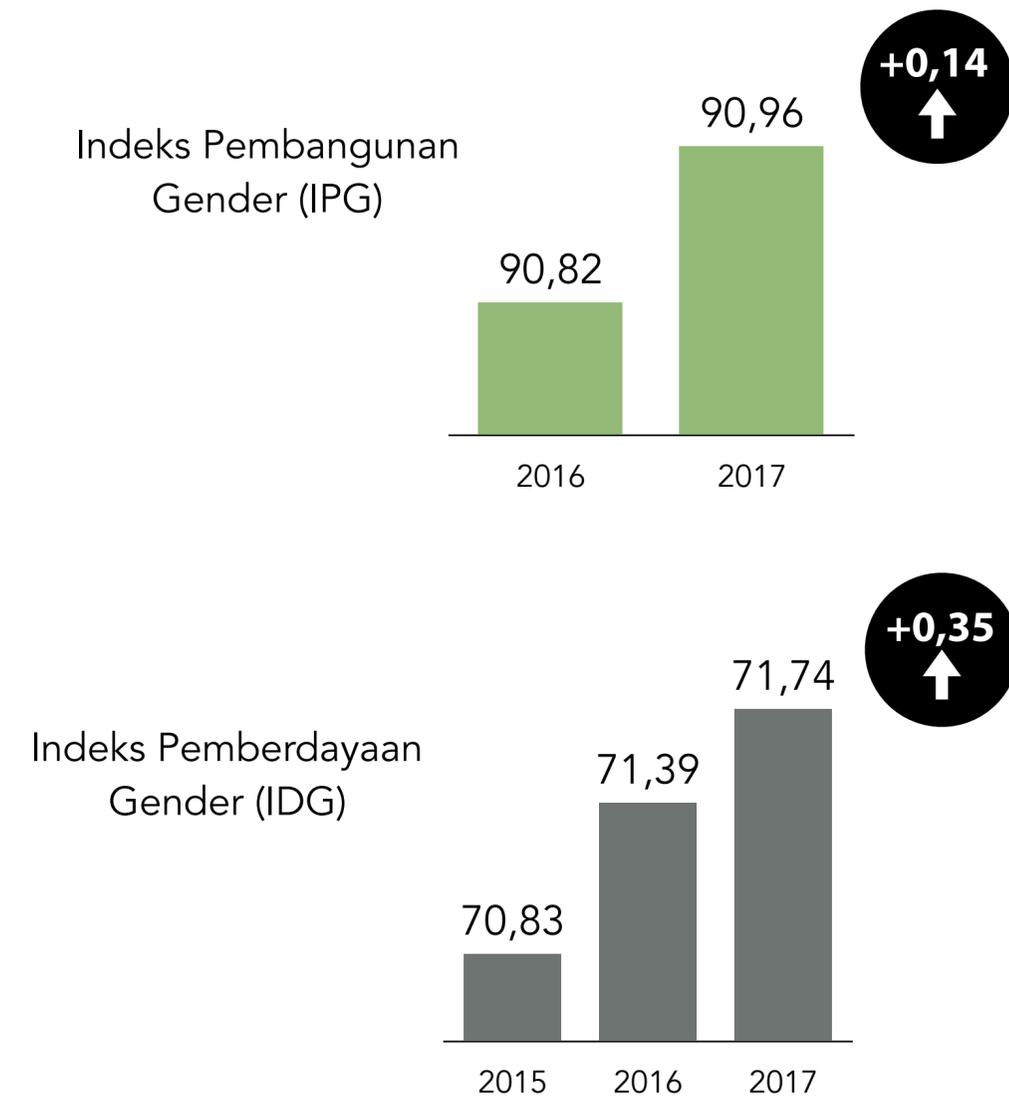
Legalisasi pertanahan, distribusi sertifikat tanah dan optimalisasi lahan perhutanan adalah bagian dari proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat adat dan petani.

Kaum perempuan dan anak adalah salah satu kelompok yang paling memerlukan perlindungan dan pemberdayaan dalam konteks memajukan manusia Indonesia untuk menjadi bangsa pemenang. Hal ini karena proses regenerasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh eksistensi keduanya.

Selain itu, Pemerintah memastikan bahwa kelompok disabilitas juga mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan. Langkah yang ditempuh adalah pembuatan payung hukum yang melindungi kelompok ini serta rencana pembentukan komite nasional yang memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas. ■

Pembangunan dan Pemberdayaan Gender Kian Meningkat

Pemerintah memiliki komitmen untuk terus meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan secara umum.



Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Perempuan Menjadi Pelaku Ekonomi

Pemerintah terus memperbaiki kemandirian ekonomi perempuan melalui perluasan akses dan kapasitas ekonomi perempuan akar rumput.



3.507

industri rumahan
diperuntukkan
untuk perempuan
pelaku usaha

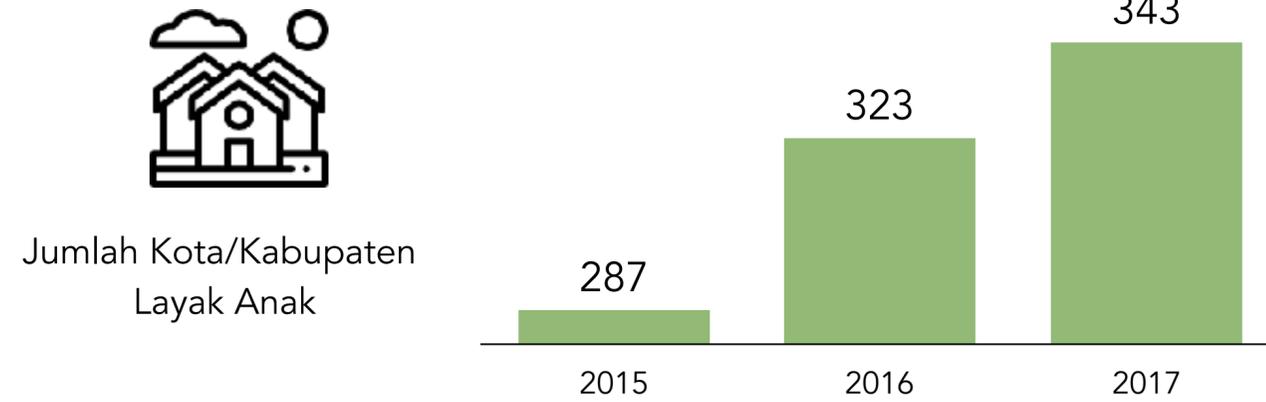


- 46 desa/kelurahan
- 15 provinsi
- 20 kabupaten/kota
- 26 kecamatan



Ruang Perlindungan Anak

Ruang-ruang untuk fasilitasi tumbuh kembang anak semakin membaik dan merata di seluruh wilayah Indonesia.



466

Forum Anak



87 unit

Pusat Kreativitas Anak



719 unit

Puskesmas Ramah Anak



81 unit

Pusat Pembelajaran Keluarga



10.210 unit

Sekolah Ramah Anak

Penanganan Perdagangan Orang dan Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak

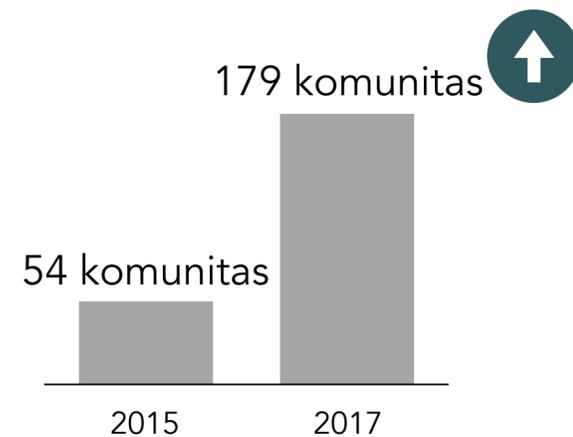
Negara hadir melindungi rakyatnya dari kejahatan perdagangan orang dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemerintah bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan berbagai komunitas untuk menekan kejahatan tersebut.



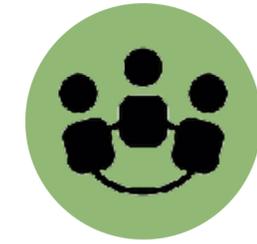
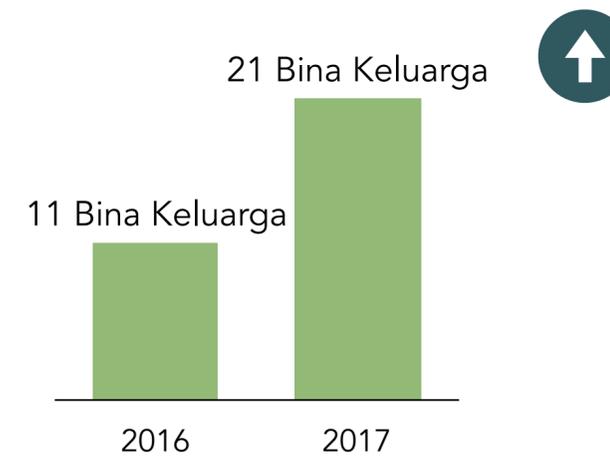
Terbentuknya GT (Gugus Tugas) TPPO di 32 provinsi dan 192 kab/kota.



Peningkatan jumlah komunitas anti perdagangan orang.



Peningkatan jumlah kelompok BK (Bina Keluarga)-TKI di 21 kab/kota.



Hingga April 2018, Pemerintah telah menyediakan 263 tempat pengaduan dan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (P2TP2A)

Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Negara hadir memastikan pemenuhan dan perlindungan hak asasi penyandang disabilitas.



Program Asistensi
Penyandang
Disabilitas Berat
71.448 orang



Program Keluarga
Harapan (Penyandang
Disabilitas) 73.932
orang



Alat Bantu Penyandang
Disabilitas 3.164 orang

Komitmen Pemerintah untuk Implementasi UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas :

Keppres No. 9 tahun 2018 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Sudah Memasukkan 4 RPP yaitu

1. RPP tentang Rehabilitasi dan Habilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
2. RPP tentang Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
3. RPP tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
4. RPP tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Paket Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Pemerintah mengakselerasi pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk mewujudkan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam ditekankan melalui Paket Kebijakan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial.

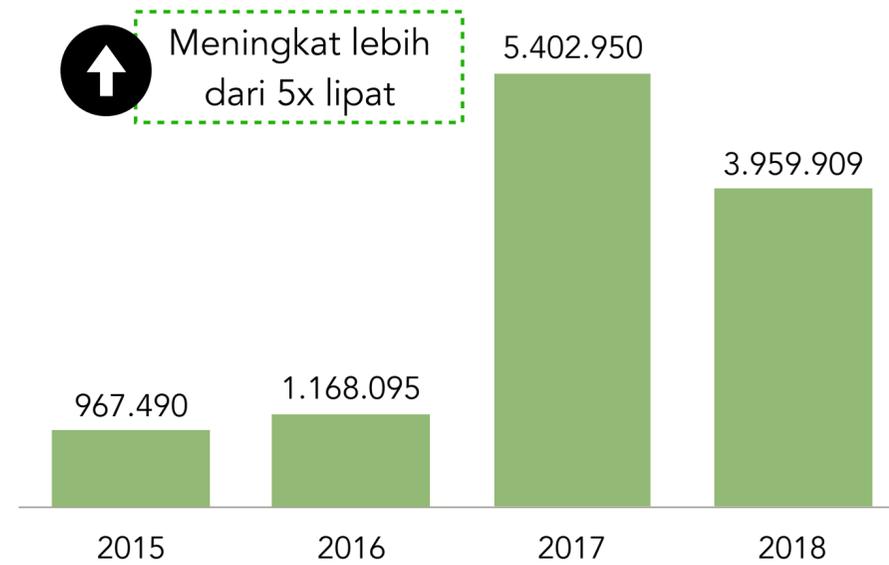


Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial

Pemerintah terus berupaya untuk memberikan hak dan akses lahan kepada masyarakat kurang mampu.



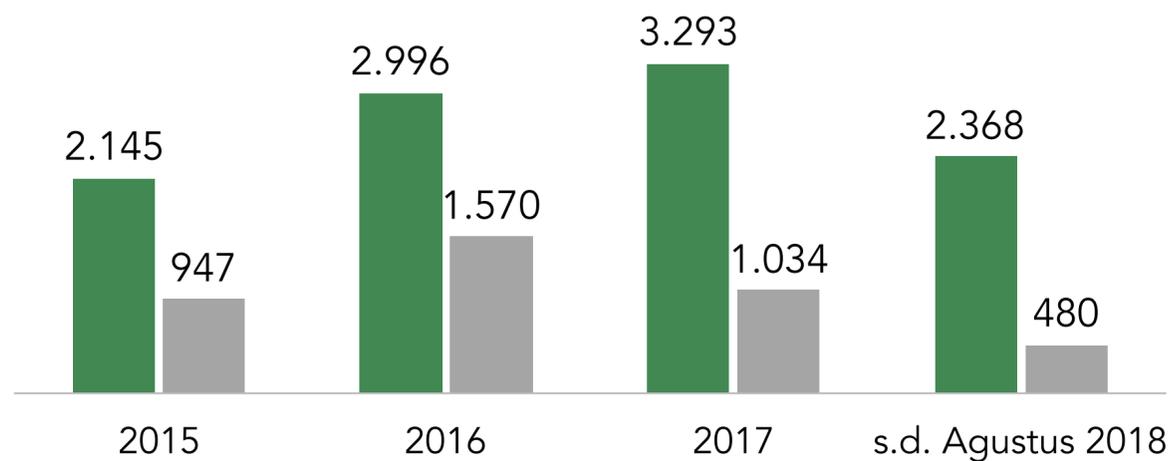
Capaian Sertifikasi Tanah Masyarakat



Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)

Penanganan Konflik Reforma Agraria

Pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan konflik/ sengketa agraria, sejalan dengan melakukan legalisasi/ sertifikasi lahan yang sudah *clean and clear*



■ Jumlah sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang ditangani
 ■ Jumlah sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang selesai

Penyelesaian Tata Ruang Untuk Mendukung Infrastruktur Strategis Nasional

Pemerintah menyelesaikan rancangan tata ruang sehingga dapat mendukung 79% dari 376 Proyek Strategis Nasional



Pembangkit Listrik
35 GW

83 | 69



Jalan Tol

64 | 5



Jaringan Jalur Kereta Api

44 | 3



Waduk

55 | 1



Bandar Udara

21 | 1



Pelabuhan & Feeder Tol Laut

29 | 1



Keberpihakan

Pemerintah melakukan kebijakan yang bersifat universal. Diperlukan kebijakan afirmatif atau keberpihakan untuk memastikan dan membantu sektor dan kelompok masyarakat tertentu agar terlindungi dan tidak tertinggal dari yang lain.

Pedesaan merupakan salah satu sektor penting untuk dimajukan agar masyarakat desa tidak tertinggal dari masyarakat di perkotaan. Kemajuan di desa akan menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi solusi untuk mencegah urbanisasi.

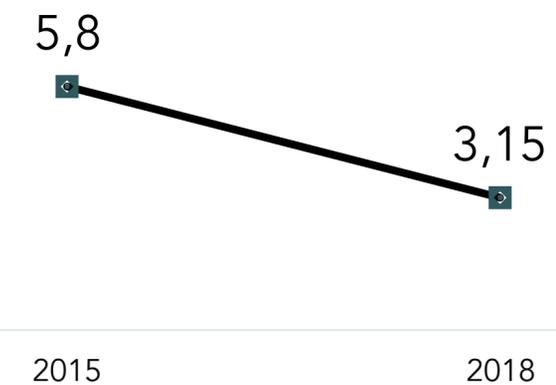
Pemerintah juga memberi perhatian khusus terhadap perbaikan tata kelola dan pelayanan haji mengingat cukup besarnya jumlah jemaah yang menjalankan ibadah haji dari tahun ke tahun. Penurunan biaya haji merupakan salah satu hal yang terus diupayakan oleh Pemerintah.

Selain itu, di tahun keempat Pemerintahan, kesejahteraan pensiunan PNS dan veteran mendapatkan perhatian khusus. Bentuknya adalah kenaikan gaji dan pemberian tunjangan hari raya (THR). ■

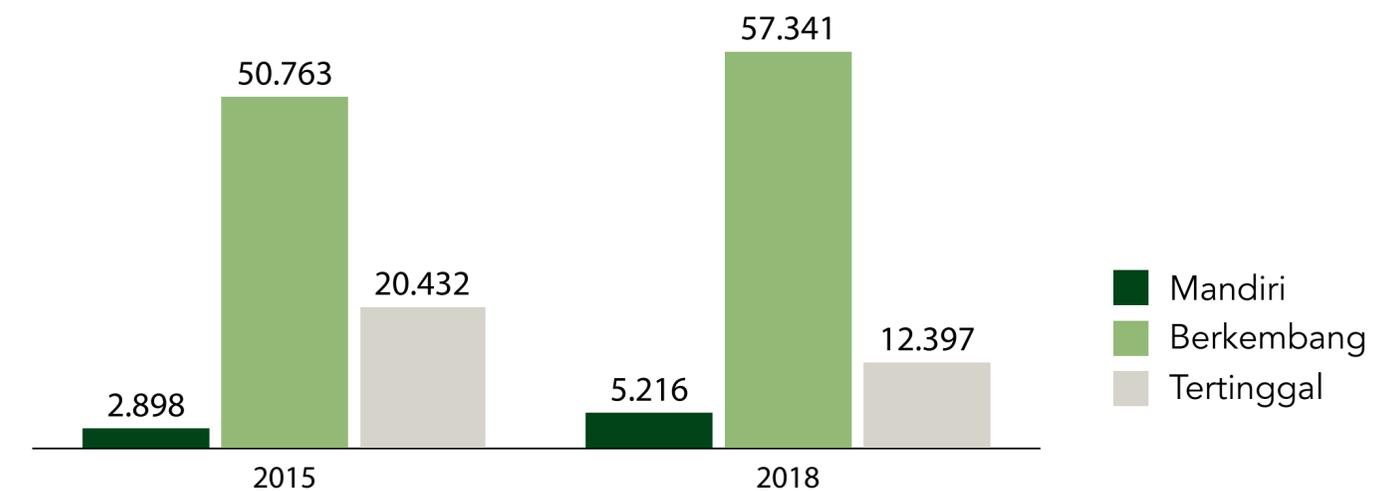
Desa Semakin Makmur

Program Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan meningkatkan kemakmuran rakyat di desa, angka kemiskinan turun, inflasi turun, sehingga meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa.

Inflasi di Pedesaan Menurun



Mengurangi Jumlah Desa Tertinggal



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes)

Meningkatkan Kegiatan Ekonomi dan Kualitas Hidup Masyarakat

Rakyat memanfaatkan Dana Desa semakin efektif sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatkan produktivitasnya dan memperbaiki kualitas hidup di desa.

Menunjang Kegiatan Produktif

Menunjang Kualitas Hidup



Jalan Desa
158.691 km



Jembatan
1.028.225 m



Tambatan Perahu
4.711 unit



BUMDES
14.770 kegiatan



Pasar Desa
6.932 unit



Penahan Tanah
179.625 unit



Air Bersih
942.927 unit



Irigasi
39.351 unit



POSYANDU
18.477 unit



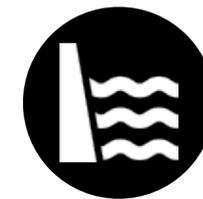
Drainase
24.005.604 m



MCK
178.034 unit



PAUD/TK
48.694 unit



Embung
3.026 unit



Sumur
37.662 unit



POLINDES
8.028 unit

Perbaiki Tata Kelola Dana Desa

Dana Desa terus dioptimalkan untuk membangun infrastruktur, guna meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat desa.



Mempersingkat Mekanisme Pencairan

- Memangkas Tahapan Pencairan dari 3 Tahap menjadi 2 Tahap.
- Memangkas Jumlah Dokumen Untuk Pertanggungjawaban



Meningkatkan Afirmasi untuk Desa Tertinggal

Reformulasi Dana Desa menjadi:

- Rasio ketimpangan distribusi DD turun dari 0.51 (2017) menjadi 0.48 (2018).
- DD per kapita di DT dan DST di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan sebesar Rp1.348,3 ribu lebih besar dibandingkan daerah lainnya sebesar Rp224.4 ribu.
- DD untuk Daerah Tertinggal dan Daerah Sangat Tertinggal mengalami peningkatan dari Rp36,7 triliun menjadi Rp37,3 triliun.



Meningkatkan Mekanisme Pendampingan dan Pengawasan

- Membentuk Satgas Dana Desa.
- Menyediakan advokasi Pemdes dan Peningkatan Kapasitasnya.
- Meningkatkan efektifitas Pendampingan mulai dari sistem rekrutment (manual ke online), dari Terpusat menjadi terdesentralisasi.
- Kerja sama pemantauan dengan POLRI

Menciptakan Lapangan Kerja di Desa

Program desa padat karya tunai ditujukan untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat di 10 kabupaten percontohan.



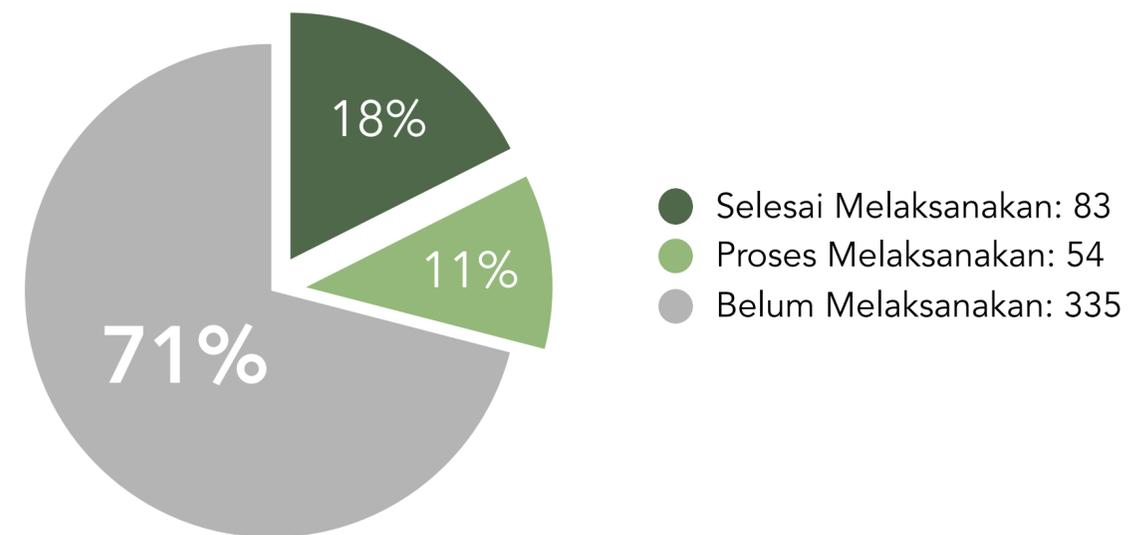
10 Kabupaten
Alokasi Dana Desa:

Rp 106.436.030.941

Anggaran Desa Padat Karya Tunai

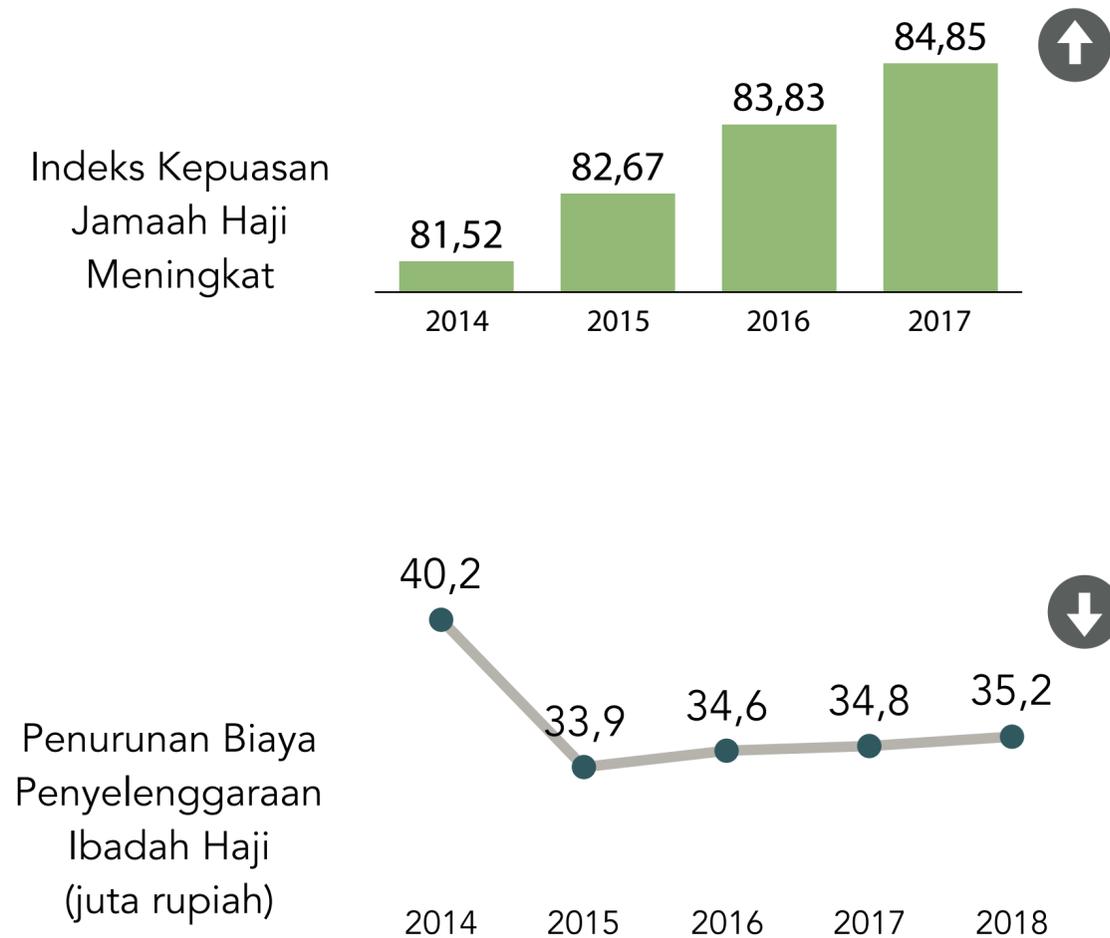
Tahap I	: 21.287.206.188 (20%)
Tahap II	: 42.574.412.377 (40%)
Tahap III	: 42.574.412.377 (40%)

Total Kegiatan Padat Karya Tunai Desa yang dilaksanakan telah menciptakan 80.313 Hari Orang Kerja (HOK) dan sebanyak Rp. 9,86 Miliar Upah telah diberikan kepada Masyarakat Desa



Pelayanan Haji

Pemerintah terus berbenah untuk memastikan umat Islam yang menjalankan ibadah haji mendapatkan pelayanan terbaik sehingga baik pula kualitas ibadahnya, sekaligus menjadi duta bangsa Indonesia.



Peningkatan layanan hotel dan penyederhanaan wilayah pemondokan (dari 9 menjadi 6)

Penyederhanaan pendaftaran haji (memangkas administrasi dari 4 menjadi 2 langkah)

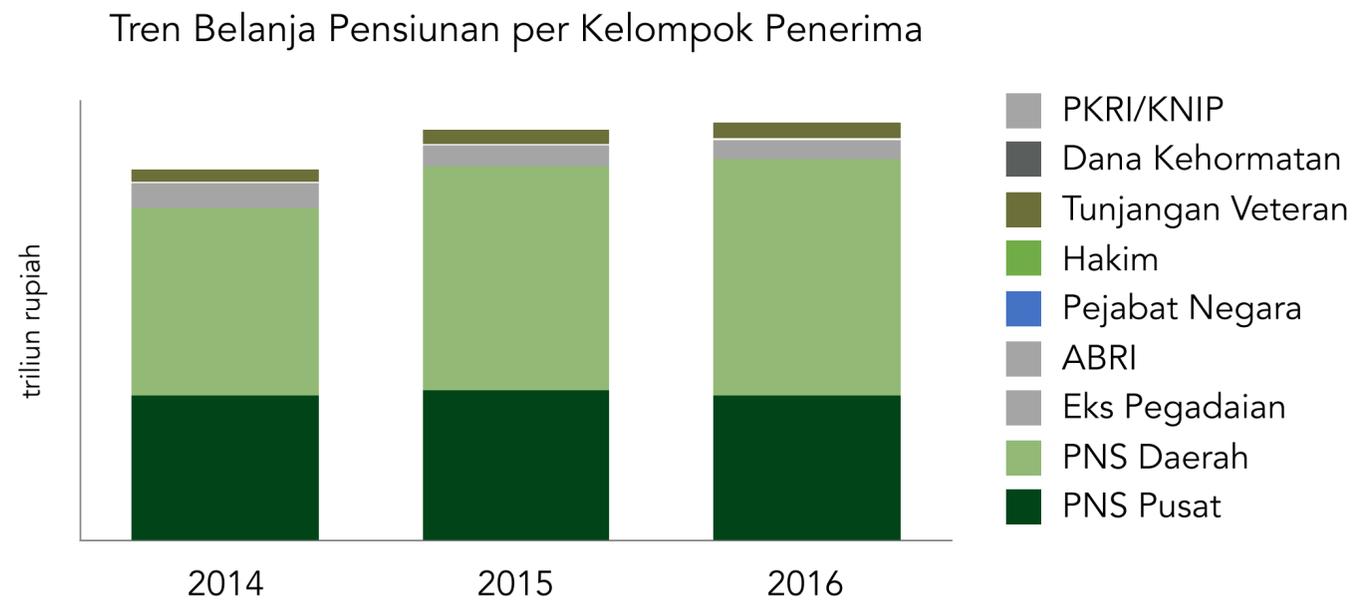
Revitalisasi 30 Asrama Haji menggunakan Rp 1,37T SBSN

Penyederhanaan Rute Perjalanan Haji

Integrasi Sistem Layanan Haji Pelopor penerapan *e-hajj*

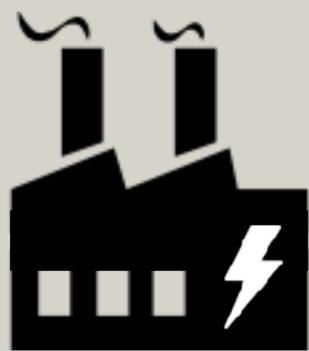
Kesejahteraan Veteran dan Pensiunan PNS

Pemerintah memberikan penghargaan pada veteran dan pensiunan PNS yang selama puluhan tahun membaktikan diri untuk melayani negeri.



- Sejak tahun 2018 pensiunan pejabat negara, PNS, TNI, Polri, dan Veteran mendapat tambahan satu kali gaji pokok/tunjangan.
- Kenaikan tunjangan pensiunan PNS rata-rata sekitar 5%.
- Dalam rangka peningkatan kesejahteraan veteran dan keluarganya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2018 yang menaikkan tunjangan antara Rp.938.000 – Rp. 2.000.000.

Tahun 2016,
Pemerintah
mengalokasikan
Rp 76,15
triliun



Bagian III

Penguatan Indonesia Sentris

Pembangunan Papua

- Peningkatan Kualitas Hidup Rakyat Papua
- Pembangunan Infrastruktur Papua
- Meningkatkan Produktivitas Papua

Tata Kelola Lingkungan Hidup Berkelanjutan

- Penanganan Karhutla
- Pengelolaan Taman Nasional dan Kuasa Pengelola Hutan
- Konservasi Flora dan Fauna

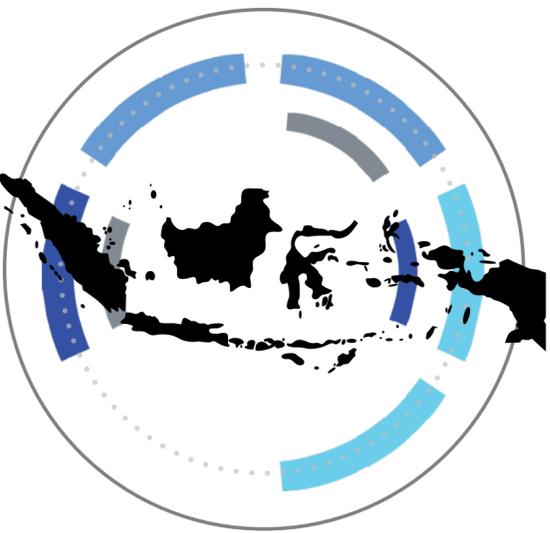


Pemerataan Pembangunan Wilayah

- Persebaran Infrastruktur dan PSN
- Pembangunan Daerah Tertinggal
- Pembangunan Perbatasan

Energi Berkeadilan

- Listrik Menjangkau Seluruh Rakyat
- Mewujudkan Harga BBM yang Berkeadilan



Penguatan Indonesia Sentris

Menggeser orientasi pembangunan di daerah yang dengan skala ekonomi besar dan penduduk padat ke daerah pinggiran dengan skala ekonomi kecil, akses yang susah, serta penduduk yang jarang adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Empat tahun yang lalu, pembangunan lebih berpusat di Pulau Jawa. Selama empat tahun ini, Pemerintah terus berupaya menggeser pendulum pembangunan ke pinggiran baik secara wilayah maupun substansinya.

Wilayah pinggiran tersebut seperti menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Indonesia yang bermartabat. Menjadikan daerah-daerah tertinggal semakin melaju kinerja pembangunannya sehingga rakyatnya pun semakin makmur.

Menjadikan papua semakin terpenuhi infrastruktur sosial dasar, aksesibilitas, hingga pada peningkatan kualitas kemakmuran rakyatnya secara berkelanjutan. Menjadikan rakyat-rakyat di pinggiran mendapatkan energi yang mudah, murah, itulah energi berkeadilan. Meningkatkan kualitas lingkungan dengan penataan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. ■

Proyek Strategis Nasional (PSN)

Pembangunan di wilayah pinggiran, belum maju, berbiaya mahal di pelosok tanah air demi terwujudkan keadilan untuk kemakmuran rakyat Indonesia.



Sumber: Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPIP)



Pemerataan Pembangunan Wilayah

Pembangunan wilayah secara merata merupakan salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan Indonesia Sentris di tahun keempat Pemerintahan. Perhatian pada pembangunan wilayah akan membawa dampak pemerataan kesempatan bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di belahan barat dan timur, maupun utara dan selatan.

Berbagai proyek infrastruktur yang tersebar di berbagai wilayah menjadi penanda penting komitmen Pemerintah untuk terus memacu daya saing dan produktivitas. Tentu saja butuh waktu tidak singkat untuk menyelesaikan berbagai proyek fisik semacam ini. Namun dampak berantainya bagi kesejahteraan rakyat pun diharapkan bisa lebih berkesinambungan.

Secara khusus, Pemerintah memberikan perhatian bagi daerah-daerah tertinggal melalui pendekatan pembangunan wilayah. Berbagai program yang dilakukan di sana diharapkan dapat menggerakkan perekonomian, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan pada akhirnya.

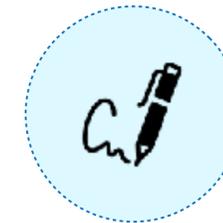
Perhatian juga diberikan untuk pembangunan di berbagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga kita. Pembangunan di wilayah perbatasan selain akan memperkuat kedaulatan negara, pada saat yang sama juga dapat menjadi pendorong kegiatan ekonomi lokal. ■

Menegakkan Kedaulatan di Perbatasan

Negara hadir untuk memastikan kedaulatan di kawasan perbatasan dengan meningkatkan diplomasi di perbatasan, mengembangkan PLBN terpadu, dan membangun pos militer.



- Densifikasi RI-PNG Menancapkan 45 Pilar Batas Tambahan



- Penandatanganan MoU No.20 mengenai Survey dan Demokrasi Batas Darat RI-Malaysia



- Ratifikasi Perjanjian ZEE RI-Filipina (UU 4/2017)
- Laut Wilayah Segmen Timur Selat Singapura (UU 1/2017)



- Penempatan 2.000 prajurit di pos-pos militer perbatasan

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN)

Pemerintah membangun kawasan perbatasan selain untuk mengawasi arus keluar-masuk orang dan barang, juga sebagai lokasi pariwisata.



PLBN Entikong



PLBN Badau



PLBN Aruk



PLBN Skouw



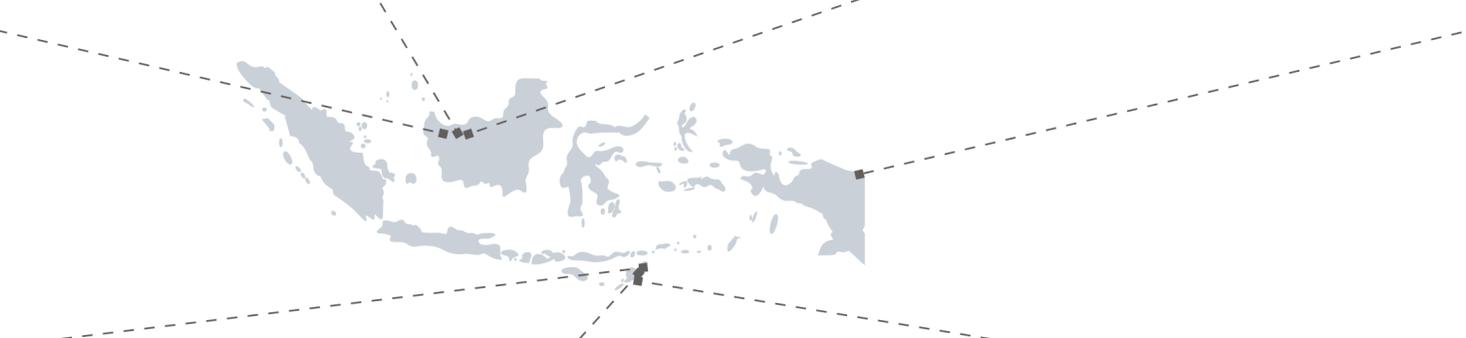
PLBN Motaain



PLBN Wini



PLBN Motamasin



3	7	7
Provinsi	Kabupaten/ Kota	Lokasi

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) adalah bangunan yang berfungsi sebagai gerbang keluar masuknya masyarakat dari Indonesia ke negara tetangga, atau pun sebaliknya.

Menembus Keterisolasian Rakyat

Saudara kita di kawasan perbatasan terlampaui lama tidak merasakan kemudahan bepergian, terangnyanya lampu, dan mudahnya berkomunikasi. Menembus keterisolasian adalah suatu keharusan.

1. Memperpendek Waktu Tempuh Rakyat di Perbatasan

2. Membuka Pelabuhan dan Bandara di Kawasan Perbatasan

3. Rakyat Mudah dan Murah Mendapatkan BBM



Membangun 21 SPBU di kabupaten perbatasan untuk memastikan BBM tersedia dan terjangkau untuk rakyat

4. Broadband Perbatasan



Meningkatkan Akses Data Di Desa-Desa Kawasan Perbatasan sampai dengan Tahun 2018 menjadi 137 Desa



8 Bandara Baru
Miangas, Letung,
Tebeliang, Maratua,
Morowali, Namniwel,
Weru, Koroway Batu



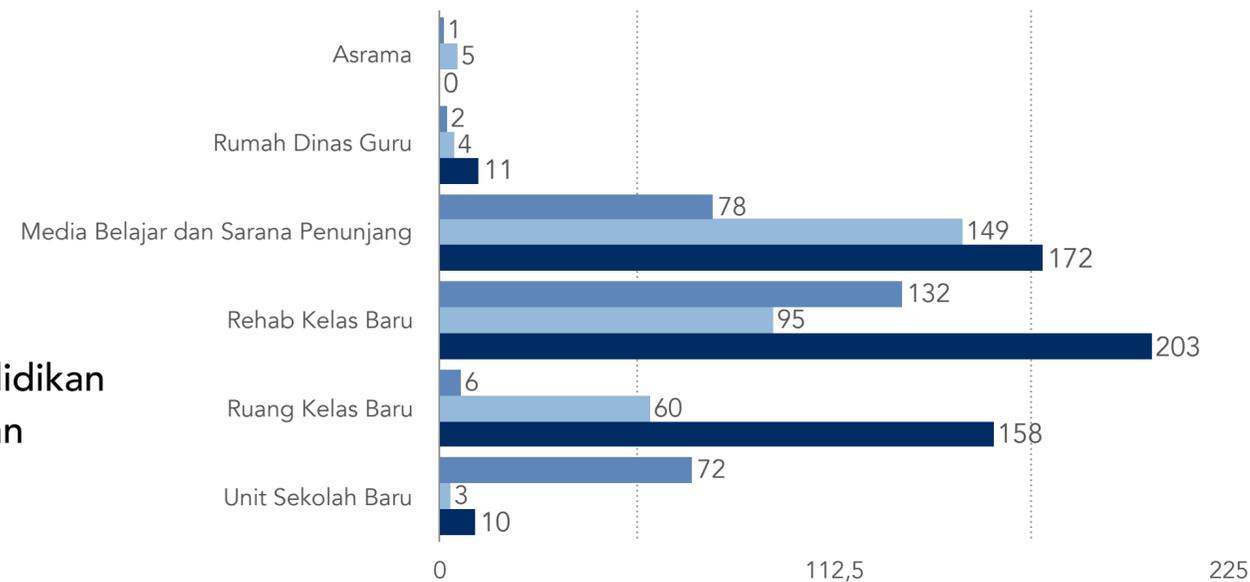
17 Pelabuhan diperbaiki/
dibangun untuk
memperlancar arus
barang dan orang di
kawasan perbatasan

Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Perbatasan

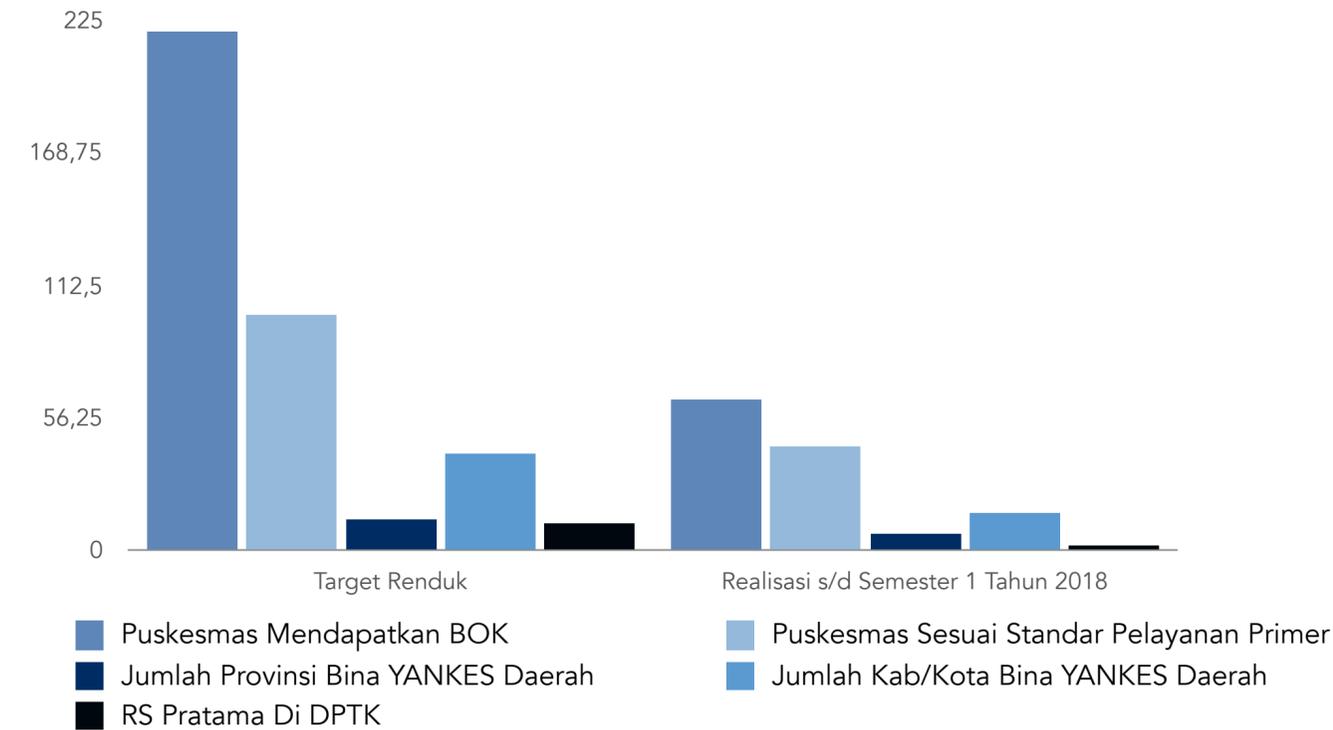
Pemerintah berupaya menyejahterakan rakyat di perbatasan dengan menyediakan sarana pendidikan dan kesehatan serta merevitalisasi pasar rakyat.



Sarana Pendidikan di Perbatasan



Mempermudah Akses Rakyat Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

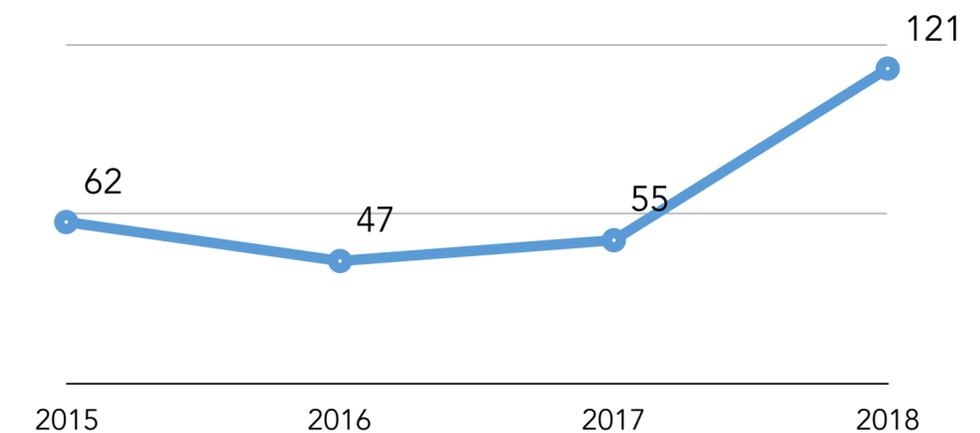


Memastikan Rakyat Mudah Untuk Belajar Dengan Layak

Jenis Sarana Pendidikan	SD	SMP	SMA
Unit Sekolah Baru	10	3	72
Ruang Kelas Baru	158	60	6
Rehab Kelas Baru	203	95	132
Media Belajar dan Sarana Penunjang	172	149	78
Rumah Dinas Guru	11	4	2
Asrama	0	5	1



Revitalisasi Pasar Rakyat di Perbatasan



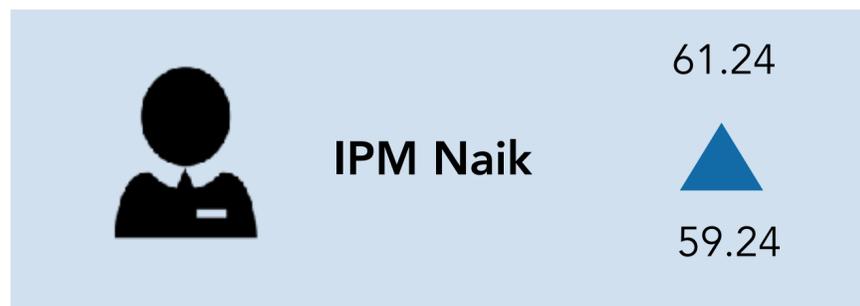
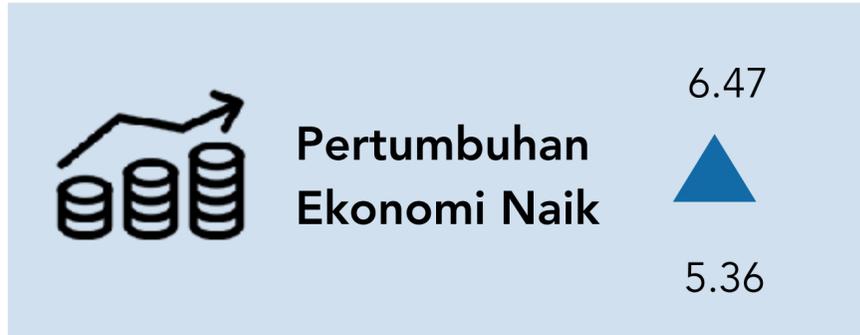
Pemerataan Proyek Strategis Nasional

Komitmen Pemerintah mewujudkan Indonesia sentris tercermin melalui pembangunan proyek-proyek strategis nasional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur.



Memajukan Daerah Tertinggal

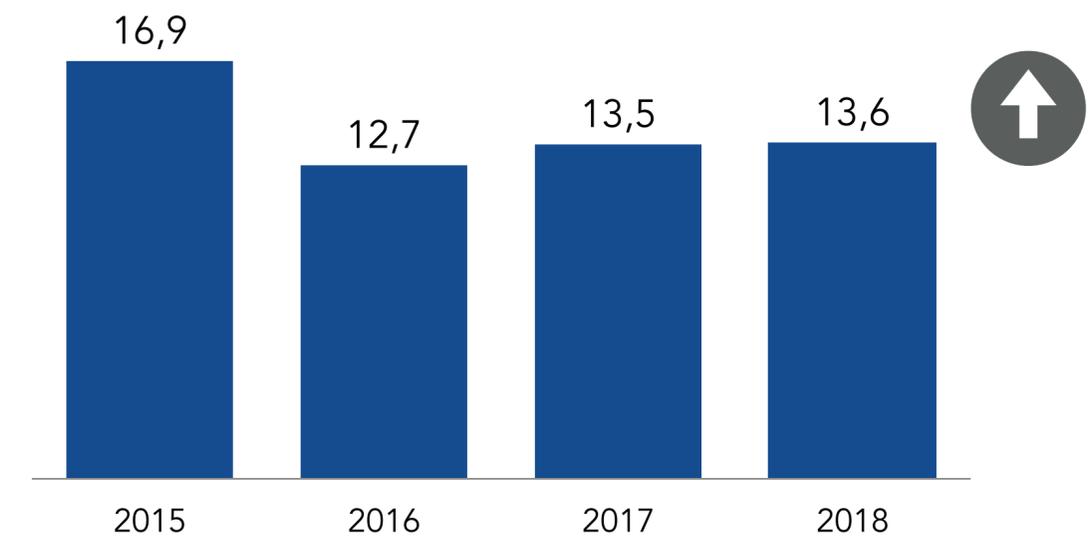
Pemerintah terus meningkatkan pembangunan di daerah tertinggal. Mulai dari ketersediaan infrastruktur, akses terhadap pelayanan dasar dan peningkatan produktivitas.



Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

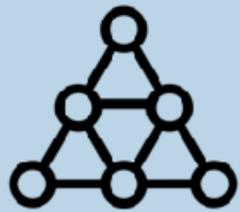
Terdapat 16 Kementerian/Lembaga yang secara terus-menerus bersinergi mengalokasikan kegiatan pembangunan di daerah tertinggal.

Alokasi Anggaran Ke Daerah Tertinggal Per Tahun

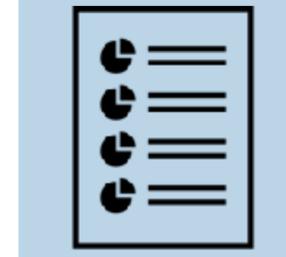


Terobosan untuk Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Membangun daerah tertinggal membutuhkan kerja-kerja tidak biasa. Pemerintah melakukan terobosan kebijakan dan implementasinya, termasuk mengajak dan memfasilitasi peran serta korporasi nasional.



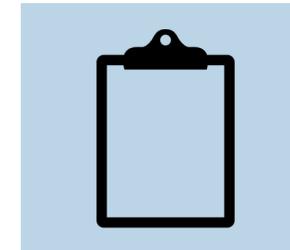
Pengembangan ekonomi digital dengan menggandeng perusahaan-perusahaan *start up* yang bergerak di bidang *e-commerce* (Pasarlaut.com, Growpal, kitabisa.com, limakilo.com, regopantas.com)



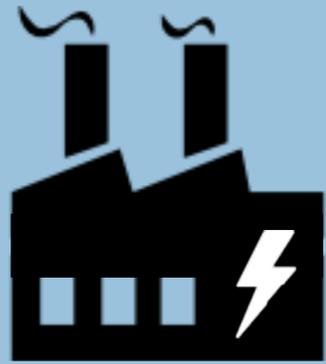
Menerbitkan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas PPDT) melalui Perpres Nomor 21 Tahun 2018



Membangun kerja sama skema CSR (*corporate sosial responsibility*) untuk membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Base Transceiver Station (BTS) Tenaga Surya



Menerbitkan Pedoman Rencana Aksi Nasional (RAN) melalui Perpres No 22 Tahun 2018



Mewujudkan Energi Berkeadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Salah satu faktor penting untuk menciptakan pemerataan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia adalah dengan menyediakan energi secara terjangkau. Dengan adanya energi yang murah, maka produktivitas rakyat pun akan meningkat.

Bagi masyarakat yang selama ini jauh dari perkotaan dan pusat-pusat ekonomi lainnya, ketersediaan energi memberi mereka kesempatan untuk mengejar ketertinggalannya. Bahkan memungkinkan mereka untuk menjadi maju, dengan meningkatnya produktivitas dalam berbagai bidang.

BBM Satu Harga, merupakan contoh kebijakan Pemerintah untuk memastikan masyarakat di berbagai daerah dapat merasakan kemudahan yang selama ini dinikmati masyarakat perkotaan. Kebijakan ini membawa dampak menurunnya beban pengeluaran masyarakat secara umum.

Hal yang sama juga dilakukan Pemerintah dengan terus meningkatkan elektrifikasi atau akses masyarakat pedesaan terhadap energi listrik. Elektrifikasi selama Pemerintahan Jokowi-JK tiap tahun terus meningkat dan diharapkan mencapai 100% hingga akhir periode Pemerintahan saat ini.

Listrik Untuk Rakyat

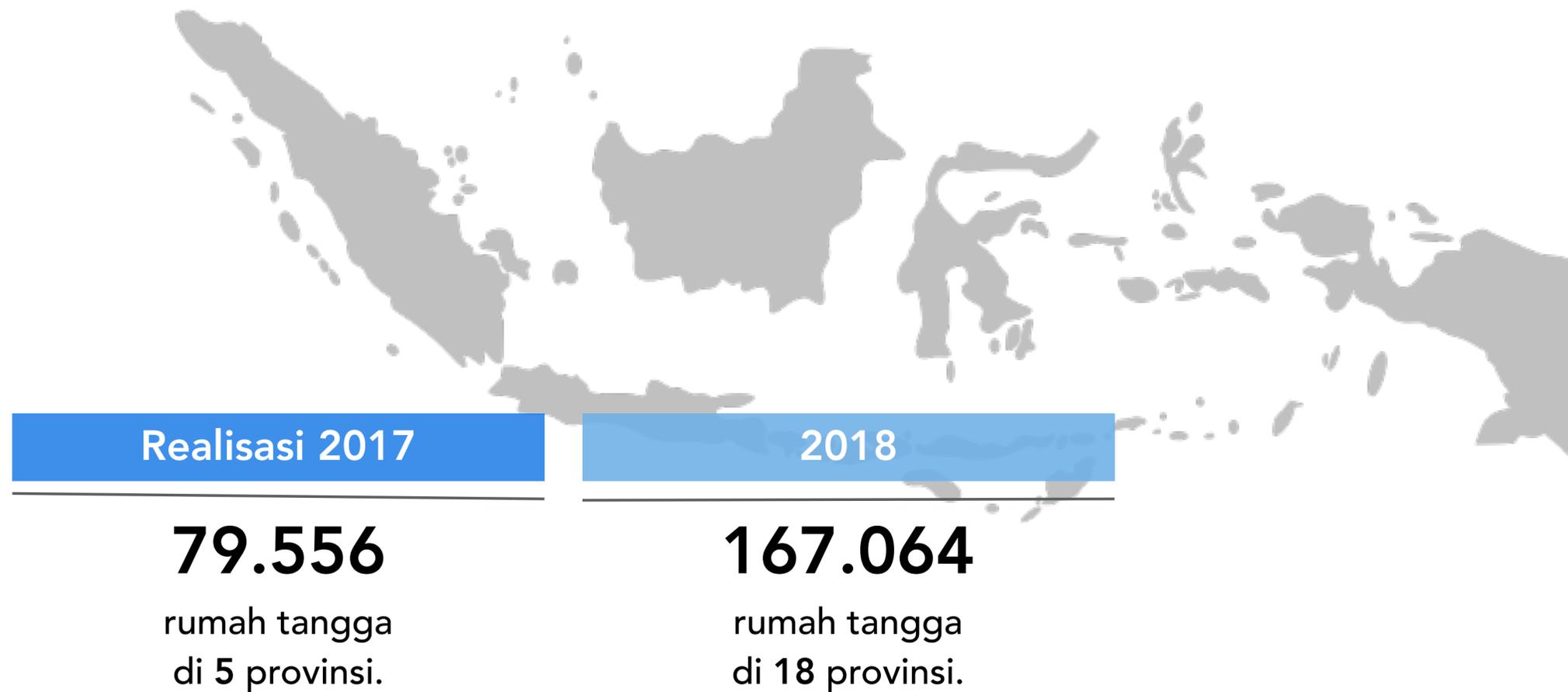
Pemerintah terus meningkatkan akses listrik untuk rakyat hingga ke seluruh pelosok tanah air.

RASIO ELEKTRIFIKASI (%) Status Semester I 2018



Lampu Surya Gratis untuk Rakyat

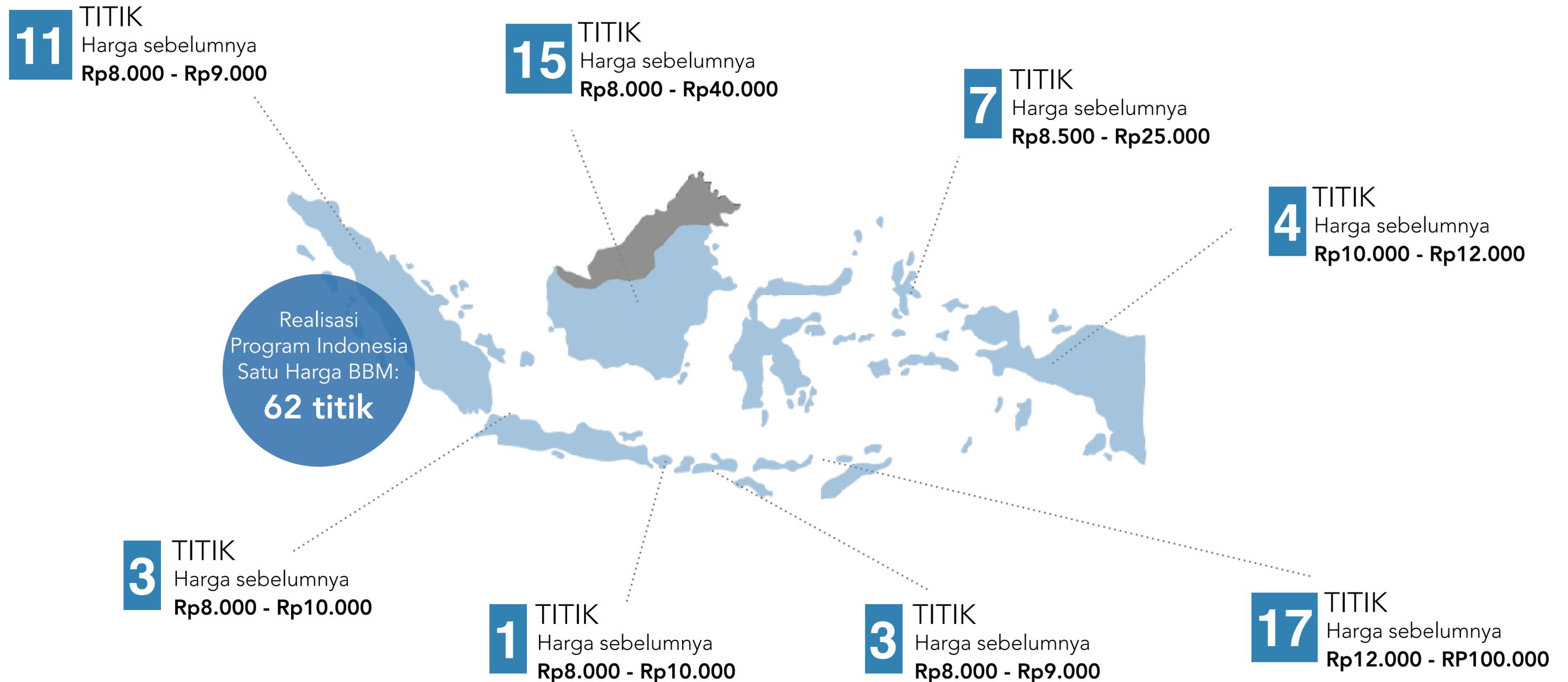
Pemerintah menyediakan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) untuk memberikan akses penerangan dan listrik terbatas di berbagai desa yang belum memiliki akses jaringan listrik.



LTSHE dapat menyala 6-12 jam atau maksimum hingga 60 jam dalam satu kali pengisian baterai.

Mewujudkan BBM Berkeadilan

Pemerintah memastikan ketersediaan energi terjangkau di seluruh wilayah melalui program BBM Satu Harga.





Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Berpihak pada Rakyat

Pemerintah terus berupaya menjaga arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup agar tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat pada masyarakat sekitar.

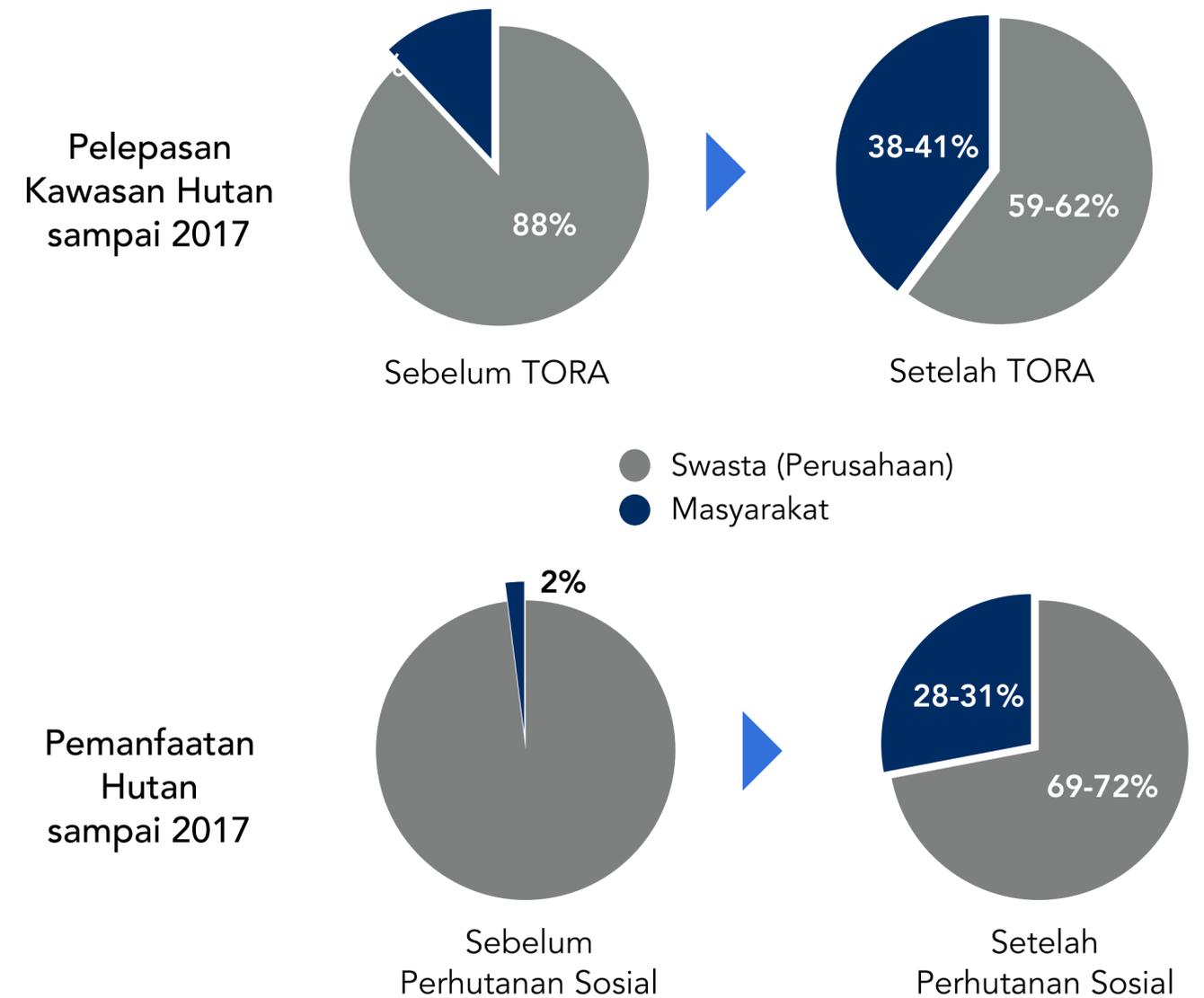
Pemerintah meyakini bahwa pembangunan manusia dapat dilakukan tanpa merusak lingkungan hidup lingkungan hidup harus terus dijaga karena merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan keseharian dan masa depan manusia.

Pengelolaan taman nasional dan konservasi lahan gambut yang dilakukan di berbagai wilayah dirasakan penting untuk dilakukan sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah untuk menjaga masa depan alam dan lingkungan Indonesia. Tanggung jawab inilah yang harus diwariskan dari generasi ke generasi.

Penegasan penindakan kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) terus dilakukan Pemerintah dalam upaya membasmi pelaku-pelaku pembakaran yang merugikan rakyat. Penyelesaian masalah karhutla membutuhkan sinergi antara Pemerintah, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan warga sekitar.

Pengelolaan Hutan Secara Berkelanjutan

Dalam rangka pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan, Pemerintah meningkatkan penguasaan kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat sekitar hutan.

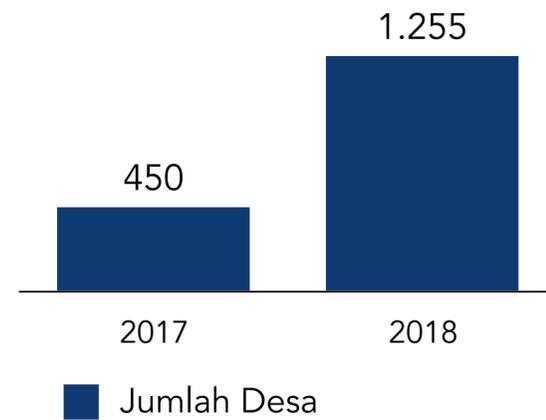


Menangani Kebakaran Hutan dan Lahan

Pemerintah berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan dimulai dari pengawasan dini, penerapan sanksi hingga penegakan hukum.



Patroli Terpadu



56 Sanksi

Penerapan sanksi administratif



11 Perusahaan

Penegakan hukum perdata



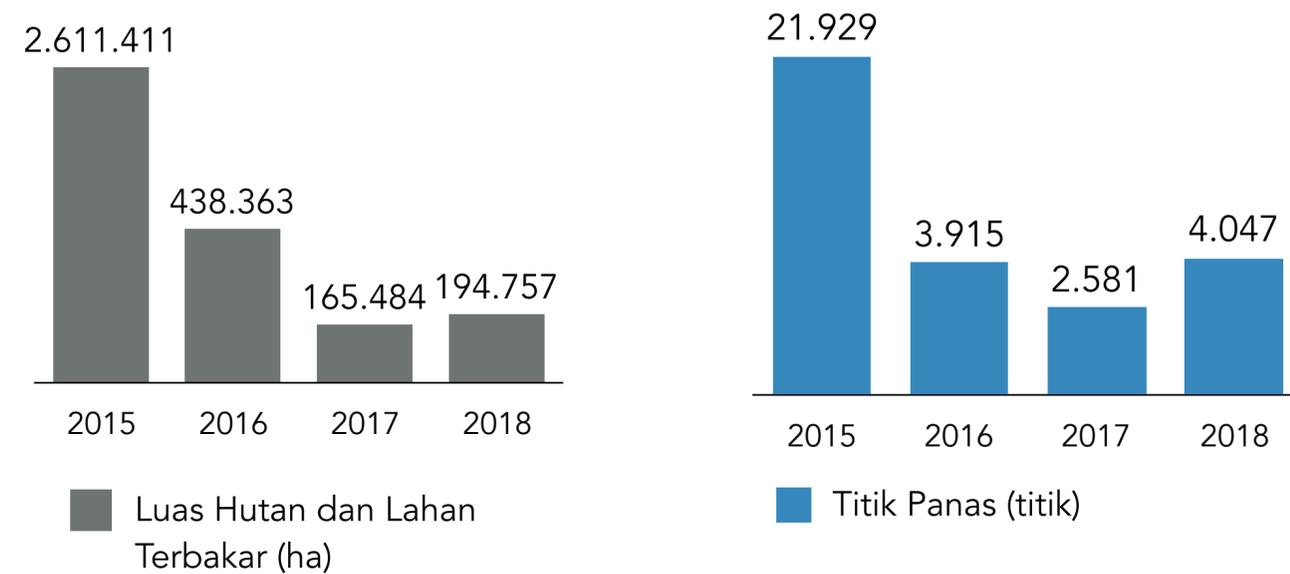
82 Kasus

Penegakan hukum pidana



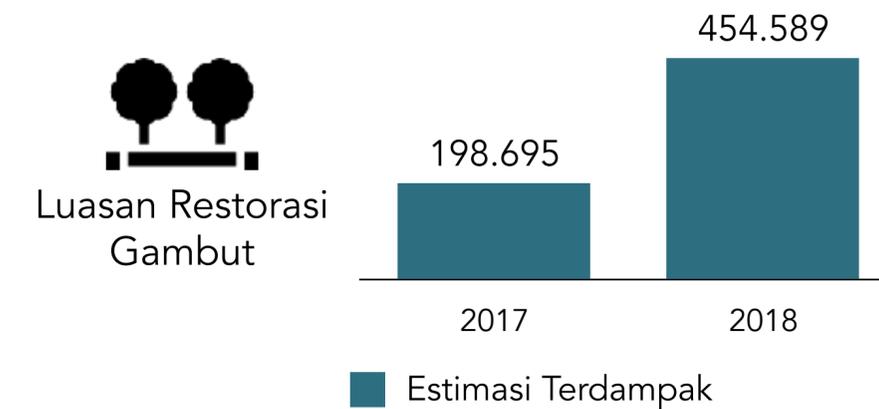
Penurunan Jumlah Titik Panas

Bertahun-tahun kebakaran hutan dan lahan selalu menjadi masalah dengan kerugian yang sangat besar. Saat ini pengendalian yang dilakukan Pemerintah telah menunjukkan hasil yang signifikan.



Upaya Restorasi Gambut

Melalui BRG, Pemerintah mengembalikan ekosistem gambut untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan melakukan pemberdayaan kapasitas sosial ekonomi desa.



Luas areal kebakaran hutan dan lahan menurun 92,5%, dibandingkan kebakaran hutan dan lahan tahun 2015.

Jumlah titik panas tahun 2018 menurun 81,5% dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016.



Sumber: KLHK (Olahan dari Satelit TERRA dan Satelit Landsat)

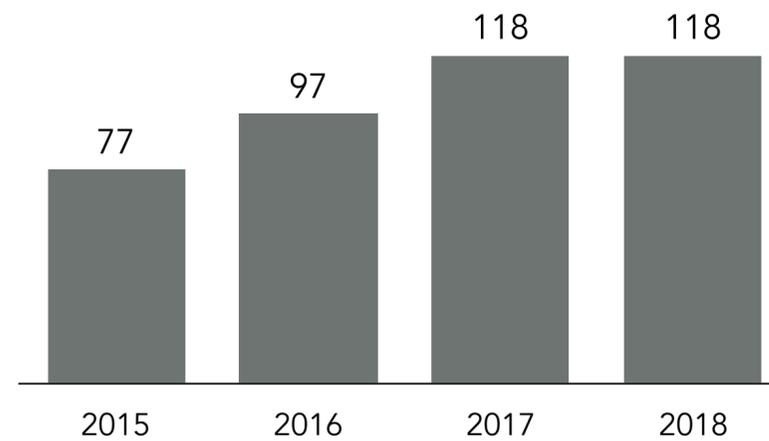
Sumber: Badan Restorasi Gambut

Mengelola Taman Nasional Bersama Masyarakat

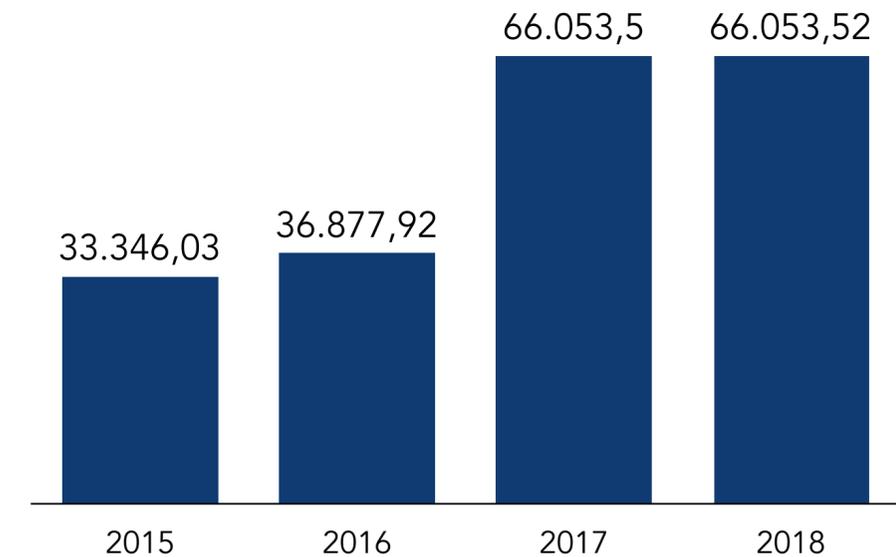
Pemerintah berupaya menjalankan kebijakan pengelolaan Taman Nasional secara berkelanjutan yang secara bersamaan meningkatkan partisipasi dan kemakmuran masyarakat.



Jumlah Daerah yang Dibina di Daerah Penyangga (kumulatif)




Luas Kawasan Hutan Konservasi Pada Zona Tradisional yang Dikelola Melalui Kemitraan dengan Masyarakat (Ha)



Melalui hutan konservasi, Pemerintah melibatkan masyarakat untuk menjaga hutan dengan membuka ruang kelola hutan konservasi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengembangkan wisata alam dan memanfaatkan potensi ragam hayati.

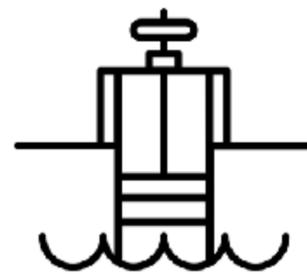
Tata Kelola dan Pemulihan Lahan Gambut

Pemerintah mendorong swasta memperbaiki tata kelola lahan gambut dan mengajak masyarakat menjaga fungsi lahan gambut.

Partisipan Perbaikan Tata Kelola Lahan Gambut



109 perusahaan perkebunan membangun 9.054 sekat kanal, 778 pintu air dan 229 embung untuk memperbaiki tata kelola air, setara dengan 0,822 juta ha.



39 perusahaan membangun 6.482 sekat kanal dan 287 pintu air setara dengan 1,675 juta ha.



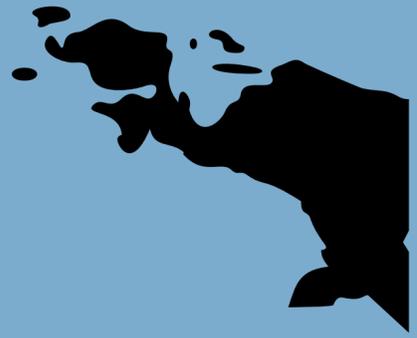
Luas Pemulihan Ekosistem Gambut Hutan Tanaman Industri

1.675.322,43
ha



Luas Pemulihan Ekosistem Gambut Usaha Perkebunan

822.944,41
ha



Membangun Papua untuk Kemakmuran Rakyat

Pemerintah menjadikan pembangunan Papua sebagai salah satu perhatian utama sebagai upaya mengakselerasi pemerataan di kawasan timur Indonesia.

Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan visi Indonesia Sentris yang dilaksanakan di Papua secara berkelanjutan. Percepatan pembangunan berfokus pada konektivitas antarwilayah yang masih terisolasi sehingga mempermudah distribusi dan menekan harga bahan pokok, sehingga meningkatkan kesejahteraan.

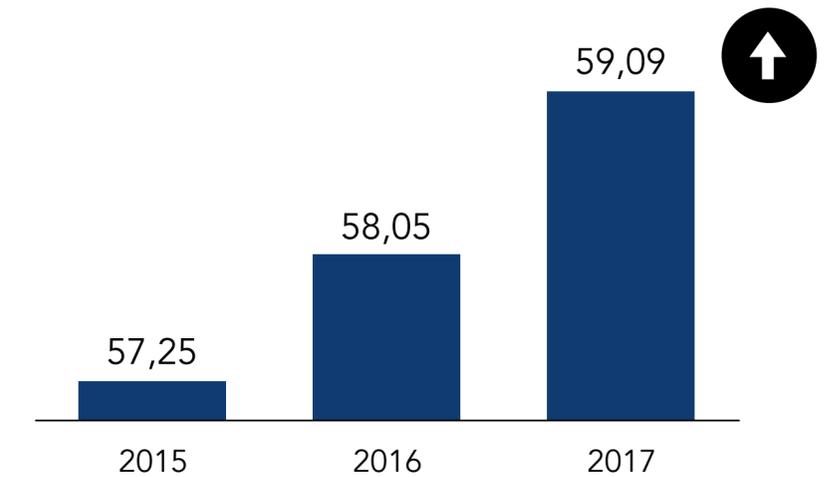
Pengembangan infrastruktur mulai mengarah pada aksesibilitas dari maupun keluar pulau. Terlihat dari pembangunan 2 bandara baru, peningkatan kualitas 5 bandara lama, dan perbaikan akses pelabuhan.

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah juga sudah sampai pada tahapan pemberdayaan dan mendukung kemandirian di tiap daerah. Upaya ini ditunjukkan melalui program pembangunan bagi penguatan fondasi ekonomi daerah dan perbaikan sistem pertanian.

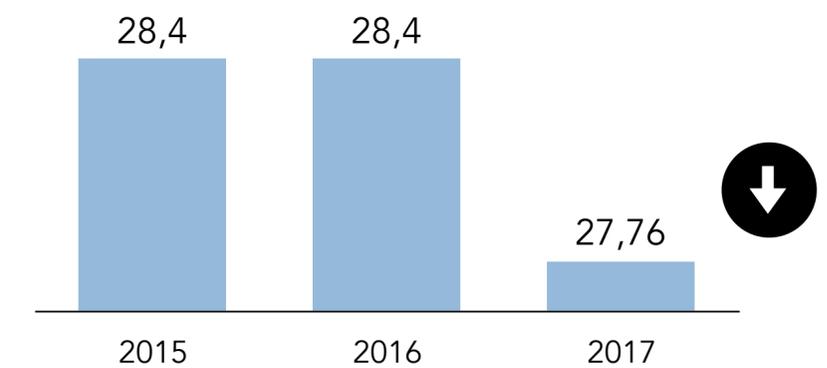
Membangun Papua dan Papua Barat

Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat semakin baik terutama dilihat dari meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan menurunnya angka kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua dan Papua Barat



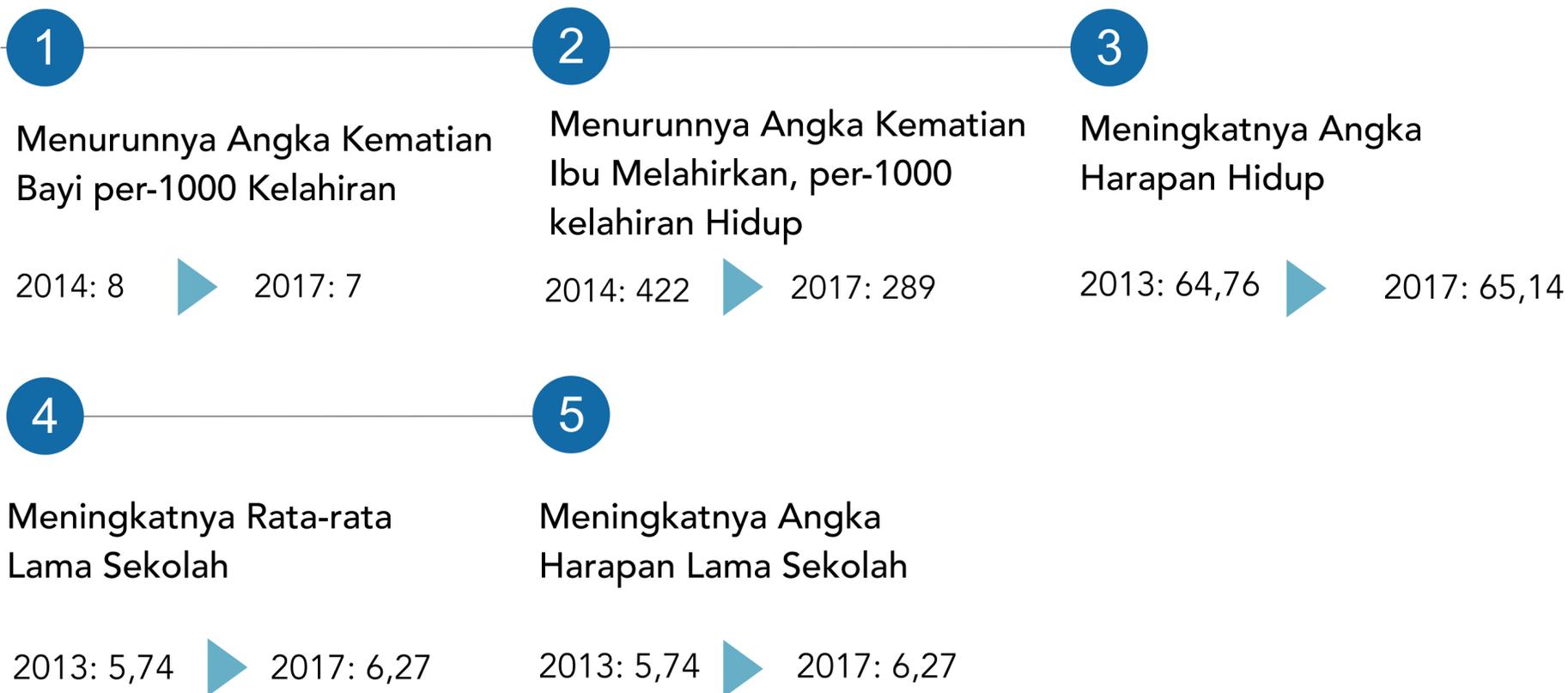
Persentase Penduduk Miskin Papua dan Papua Barat



Peningkatan Kualitas Hidup Rakyat Papua dan Papua Barat

Pemerintah meningkatkan kualitas SDM Papua dan Papua Barat untuk investasi pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan pelayanan di bidang Pendidikan dan Kesehatan.

Mewujudkan Generasi Emas Papua



Meningkatnya PDRB Per-Kapita Tanpa Tambang (Juta Rupiah)

2013 = 24,60
 ▼
 2017 = 37,52



Pemerataan Pendapatan Masyarakat (Gini Ratio)

2013 = 0,440
 ▼
 2017 = 0,398



Menurunnya Angka Kemiskinan

2013 = 31,13
 ▼
 2017 = 27,62



Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

2013 = 3,23%
 ▼
 2018 = 2,91%

Sumber: BPS, Kemenkes, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua

Pengembangan Infrastruktur dan Konektivitas di Papua dan Papua Barat

Percepatan pembangunan ekonomi Papua dan Papua Barat dilakukan dengan membangun infrastruktur dan konektivitas, antara lain jalan Trans Papua, memperbaiki akses udara dan pelabuhan serta mewujudkan program Papua Terang.

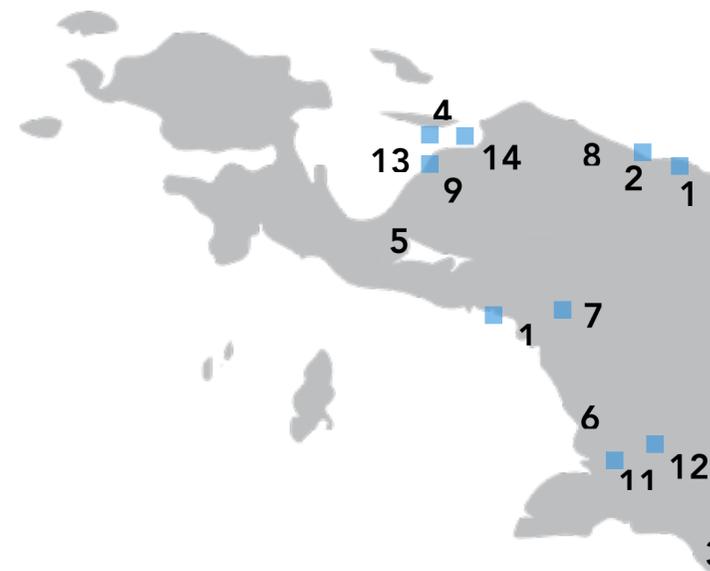


Membuka Keterisolasian Antar Daerah

Papua	Papua Barat
3.259 KM	1.071 KM
Tembus	Tembus
3.103 KM	100%



Pembangunan dan Rehabilitasi di 15 Pelabuhan untuk Mendukung Distribusi Barang dan Kegiatan Ekonomi Lain



Pembangunan Bandara Baru dan Peningkatan Kualitas Bandara Lama

Pengembangan:
 DEO Sorong, Bandara Dekai Yahukimo, Bandara Wamena, Bandara Utarom Kaimana

Bandara Baru:
 Werur
 Koroway Batu



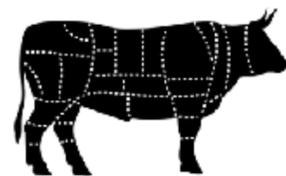
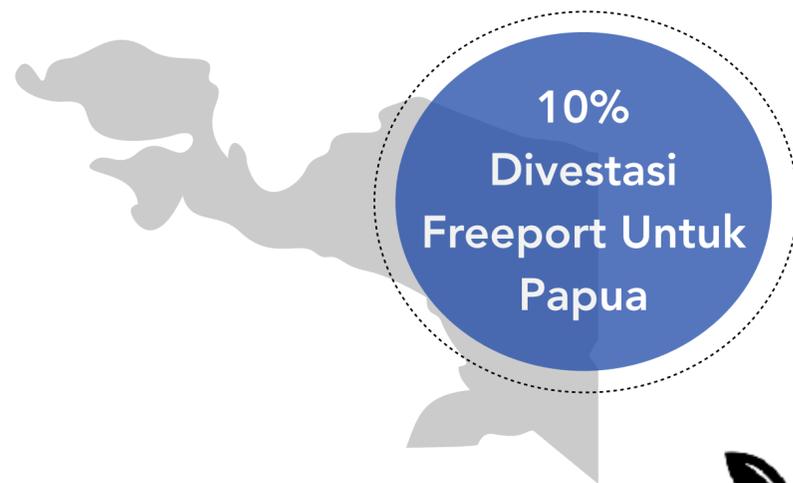
Rasio Elektrifikasi PLN

2013:
 30,48

Semester I 2018:
 72,04

Penguatan Ekonomi dan Produktivitas Papua

Pemerintah mendorong produktivitas ekonomi di Papua dan Papua Barat agar memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, salah satunya dengan divestasi saham Freeport.



Meningkatnya Produksi Daging

2013 = 13,679,890 kg



2017 = 24,040,344 kg



Meningkatnya Produksi Perkebunan Rakyat

2013 = 39,641 ton



2016 = 68,614 ton

Orientasi Pengembangan Sektor Strategis di Teluk Bintuni

Tahap I Pengembangan Kawasan
Zona Industri difokuskan kepada
pengembangan pabrik metanol

- Lokasi - Teluk Bintuni, Papua Barat
- Nilai Investasi - USD 890,000,000
- Skema Pendanaan - KPBU
- Penanggungjawab Proyek Kerja sama - Kementerian Perindustrian
- Target Konstruksi - 2019
- Target Operasi - 2022



Pengembangan Industri Petrokimia di
Teluk Bintani, Papua Barat



Bagian IV

**Peningkatan Stabilitas Politik dan
Keamanan, Penegakan Hukum, dan
Tata Kelola Pemerintahan**

Tata Kelola Pemerintahan

- Pemberantasan Korupsi
- Birokrasi Profesional
- Layanan Publik Berkualitas

Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

- Pemberantasan Narkoba
- Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme
- Kontribusi Industri Pertahanan dan Pemenuhan MED II
- Pembentukan Bela Negara
- Penanggulangan Bencana



Stabilitas Politik

- Politik Dalam Negeri
- Diplomasi Internasional

Penegakan Hukum dan Pemenuhan HAM

- Penegakan Hukum
- Pemenuhan HAM



Peningkatan Stabilitas Politik dan Keamanan, Penegakan Hukum, dan Tata Kelola Pemerintahan

Stabilitas politik dan keamanan, hukum yang memberikan keadilan serta Pemerintahan yang melayani merupakan syarat mutlak untuk pembangunan manusia unggul.

Memastikan perlindungan warga negara, menjamin rasa aman, serta menghadirkan Pemerintahan yang transparan, bersih dan menjaga stabilitas politik merupakan prioritas utama. Untuk itu Pemerintah senantiasa melaksanakan pembaharuan hukum, reformasi birokrasi, dan pencegahan korupsi.

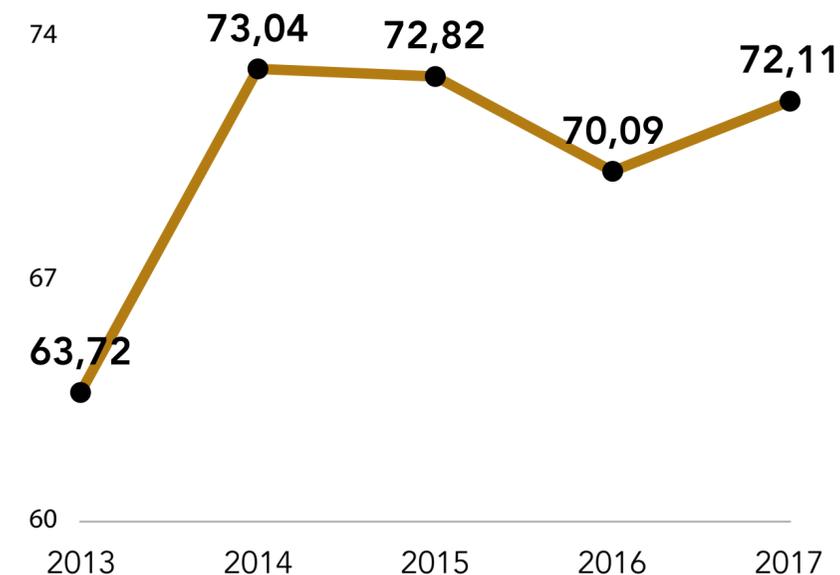
Stabilitas politik dijaga melalui konsolidasi demokrasi dan diplomasi internasional untuk menjaga perdamaian dunia dan keamanan kawasan.

Indeks Negara Hukum dan Indeks Demokrasi Indonesia yang meningkat menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah membuahkan hasil.

Pencegahan terorisme, radikalisme serta upaya-upaya deradikalisasi terus dilaksanakan secara komprehensif melalui berbagai strategi dengan mengombinasikan pendekatan lunak serta penegakan hukum. ■

Indeks Demokrasi Indonesia

Panggung politik di Indonesia sepanjang tahun 2017 mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Meskipun demikian, Indeks Demokrasi Indonesia masih menunjukkan peningkatan.



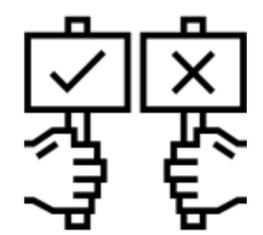
Kebebasan berpendapat

78,75



Lembaga Demokrasi

72,49



Kegiatan Kaderisasi Partai Politik

68,91



Stabilitas Politik Dalam Negeri dan Diplomasi Internasional

Stabilitas politik ditunjukkan dengan adanya kebebasan berbicara dan berserikat dalam sistem demokrasi yang terjaga dari berbagai ancaman serta kemampuan menjaga perdamaian global dan kawasan.

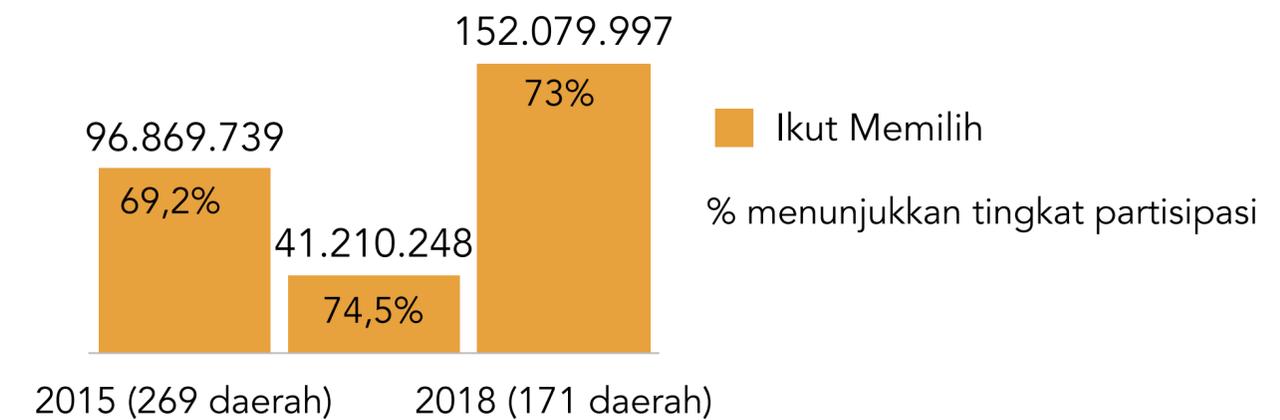
Penyelenggaraan Pilkada serentak sejak tahun 2015 yang selalu berjalan damai dengan tingkat partisipasi yang meningkat dan berkurangnya sengketa menunjukkan bahwa praktik demokrasi semakin dewasa. Hal ini menjadi salah satu faktor utama untuk stabilitas politik di dalam negeri.

Kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi internasional memiliki kontribusi besar dalam menciptakan stabilitas dalam negeri. Terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan 2019-2020 mewakili Asia-Pasifik, dan keaktifan Indonesia dalam mempromosikan perdamaian telah ikut menciptakan stabilitas politik dan keamanan. ■

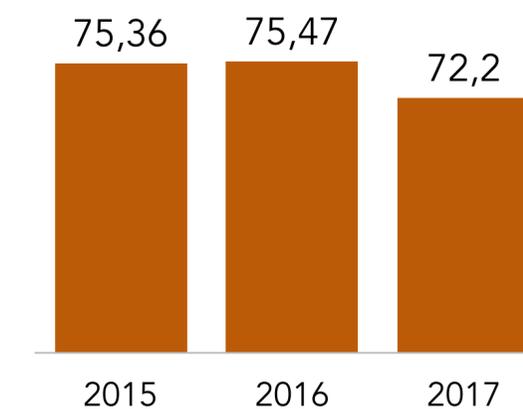
Demokrasi yang Stabil

Demokrasi Indonesia tetap kuat yang ditandai dengan partisipasi pemilih yang cukup tinggi. Namun, Indonesia masih memiliki tantangan dalam kerukunan beragama.

Partisipasi Pemilih (juta orang)



Indeks Kerukunan Beragama



Survey menunjukkan bahwa selama 3 tahun berturut-turut angka kerukunan beragama di Indonesia masuk dalam kategori "Tinggi"

Kepemimpinan dalam Diplomasi Internasional

Dengan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan semakin berperan aktif mewujudkan perdamaian dunia.



Sesuai prioritas politik luar negeri Indonesia "Meningkatkan Peran Indonesia di tingkat kawasan maupun global di bawah Kepemimpinan Presiden Jokowi". **Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020.**



Lebih dari 2/3 negara anggota mempercayai Indonesia mampu untuk membangun jembatan perdamaian dan memajukan perdamaian dunia dengan cara-cara yang diplomatis.



Dipercaya mewakili Asia-Pasifik mengalahkan negara Maladewa.



2.695 peacekeepers tengah bertugas pada 9 misi perdamaian dunia.



Indonesia negara **terbesar ke-8** pengirim pasukan perdamaian.



Para penggiat kemanusiaan berada di Cox Bazaar, Rakhine State, Gaza, dan Marawi.

Perdamaian Palestina dan Afghanistan

Indonesia berperan aktif dalam upaya perdamaian di Palestina dan Afghanistan.



Indonesia untuk Palestina

- Menolak status Yerusalem sebagai ibu kota negara Israel.

- Mendesak PBB menjalankan prinsip demokrasi dari hasil voting terhadap *status quo* Yerusalem.

- Menegaskan terhadap dukungan Palestina dalam pertemuan OIC *Extraordinary Summit* di Istanbul.

- Membebaskan biaya masuk kurma dan minyak zaitun asal Palestina ke Indonesia sejak tahun 2018.



Indonesia untuk Afghanistan

- Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan trilateral dengan Afghanistan dan Pakistan terkait penyebaran bibit perdamaian di Afghanistan yang melakukan ekstremisme kekerasan.

- Indonesia memberikan bantuan beasiswa, pelatihan polisi, pembangunan infrastruktur, pertukaran ulama, dan pemberdayaan perempuan di Afghanistan.

- Penyelenggaraan pertemuan Trilateral Ulama Afghanistan-Pakistan dan Indonesia di Istana Bogor, 11 Mei 2018, menghasilkan Bogor *Ulema Declaration of Peace*

- Menteri Luar Negeri Indonesia menandatangani perjanjian pembangunan klinik "*Indonesia Islamic Center*".

Diplomasi Ekonomi dan Dialog Antar-Peradaban

Sebagai negara demokrasi ke 3 terbesar di dunia dengan pengalaman panjang merawat perdamaian, Indonesia terus berperan aktif mewujudkan perdamaian global.



Penyelenggaraan *Indonesia-Africa Forum 2018* meraih transaksi sebesar US\$ 586,56 juta dan *Business Announcement* sebesar USD 1,3 milyar.



Menghasilkan *business deal* sebesar Rp 3,76 triliun di Bangladesh melalui *Indonesia Fair 2018*.



Pada Trade Expo Indonesia 2017, **menghasilkan transaksi bisnis dengan Rusia sebesar US\$ 50 juta dari sawit dan kopi**, Kapal Api 25 kontainer senilai US\$850,000; dan Kopi *roasting* dari Malang 12 kontainer senilai US\$1,2 juta/tahun, total USD 52,05 juta.



Melanjutkan dialog lintas agama secara bilateral dan multilateral dengan 30 negara dan 3 forum multilateral.



Mengembangkan dan membangun pemahaman Islam Wassatiyyat kepada dunia melalui *High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wassatiyyat Islam* di Indonesia pada Mei 2018. Pertemuan ini menghasilkan *Bogor Ulama Declaration for Peace*.



Mengembangkan *Bali Democracy Forum* (BDF) sebagai forum strategis pengembangan demokrasi di kawasan dan dunia.

Menjauhi Perang Dagang, Menawarkan Kolaborasi

Pemerintah mengajak para pembuat kebijakan fiskal dan moneter dunia untuk mengutamakan kerjasama global ketimbang membiarkan keterpurukan akibat perang dagang.



Sumber : Antarafoto/Puspa Perwitasari/Afriadi Hikmal



Prioritas Indonesia di IMF-World Bank Annual Meetings

- Penguatan Sistem Moneter Internasional
- Ekonomi dan Keuangan Digital
- Pembiayaan Infrastruktur
- Ekonomi dan Keuangan Syariah

Manfaat Bagi Indonesia

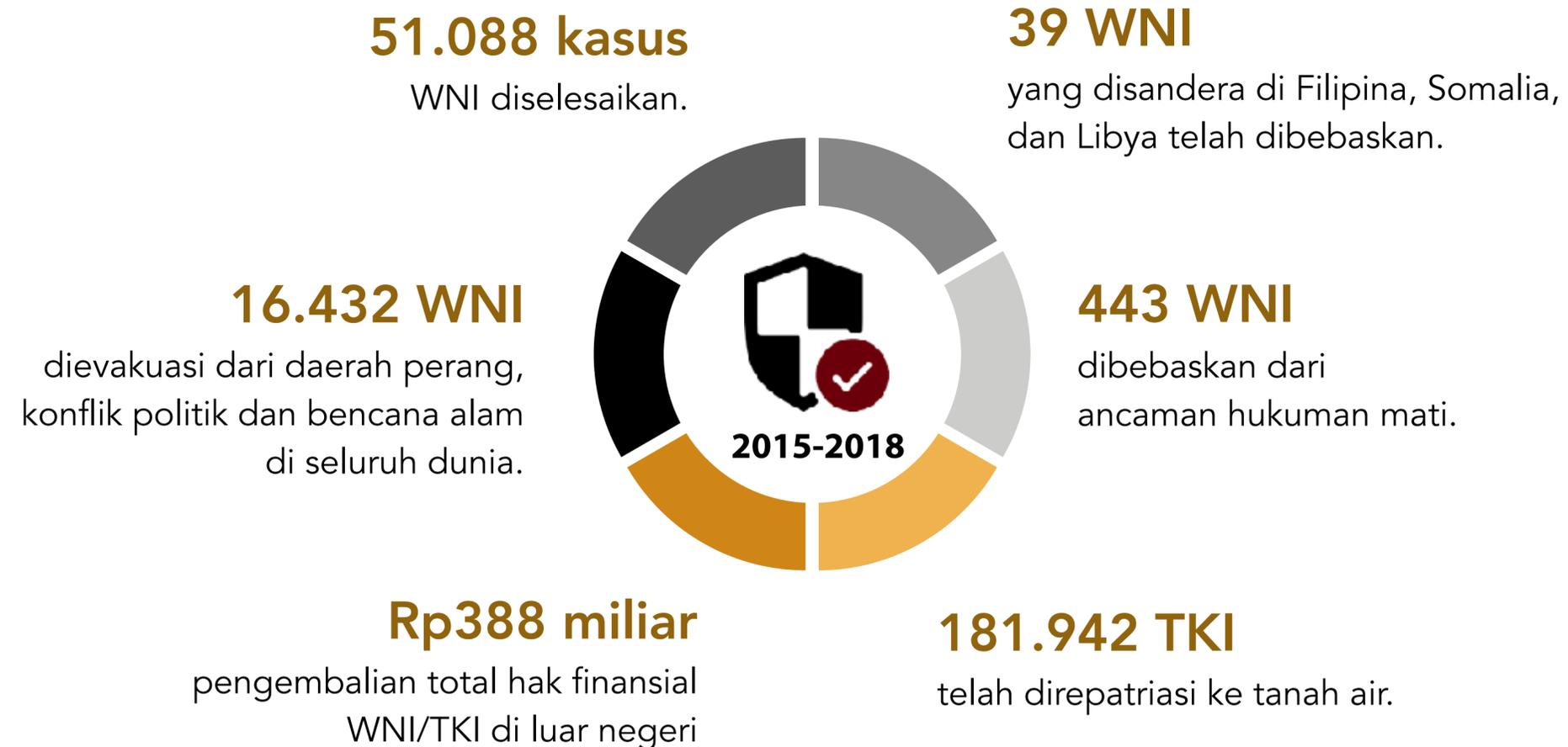
Investasi untuk BUMN	Rp 200 triliun
Prediksi Penerimaan Pajak	Rp 800 miliar - Rp 1 triliun

Manfaat Bagi Ekonomi Bali (2017-2018)



Perlindungan Terhadap Warga Negara Indonesia

Pemerintah terus meningkatkan upaya untuk mendeteksi dan memberikan perlindungan sebesar-besarnya bagi warganya.





Penegakan Hukum Yang Berkeadilan dan Pemenuhan HAM

Hukum yang memenuhi rasa keadilan serta pemenuhan hak asasi manusia merupakan salah satu prasyarat bagi pembangunan manusia.

Janji Pemerintah untuk menghadirkan negara kuat dengan melakukan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya terus diperkuat. Upaya tersebut dimulai dari peningkatan ketaatan Pemerintah terhadap hukum, usaha penguatan legalitas formal, kekuasaan kehakiman yang semakin merdeka, juga akses terhadap keadilan yang semakin terbuka. Adapun kerja keras tersebut mengantarkan pada kenaikan Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia.

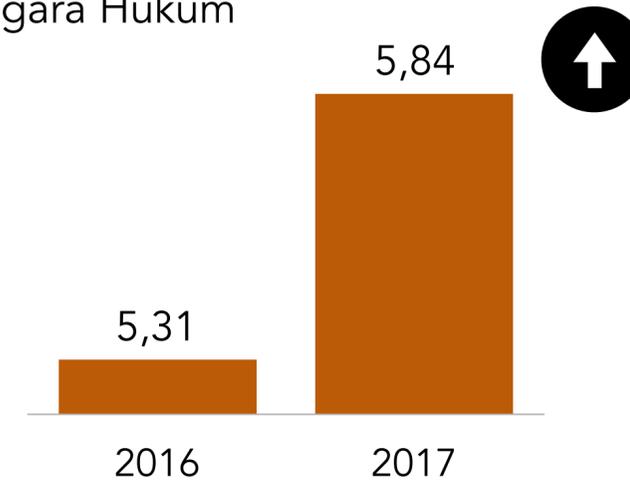
Komitmen terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia diwujudkan dengan pemenuhan hak hidup, program Kota/Kabupaten Peduli HAM, dan pelaksanaan RANHAM.

Peningkatan kepuasan publik terhadap hukum juga memacu penyempurnaan strategi penegakan hukum dalam masyarakat. Hal tersebut terus dikerjakan dengan cara yang lebih *modern*, misalnya melalui E-Samsat dan E-Tilang. ■

Negara Hadir Menegakkan Hukum

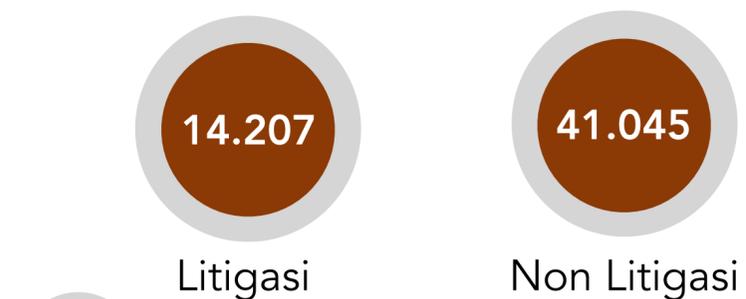
Indonesia menunjukkan peningkatan kinerja sebagai negara hukum.

Indeks Negara Hukum



Sumber: Indonesia Legal Roundtable

Masyarakat Penerima Bantuan Hukum



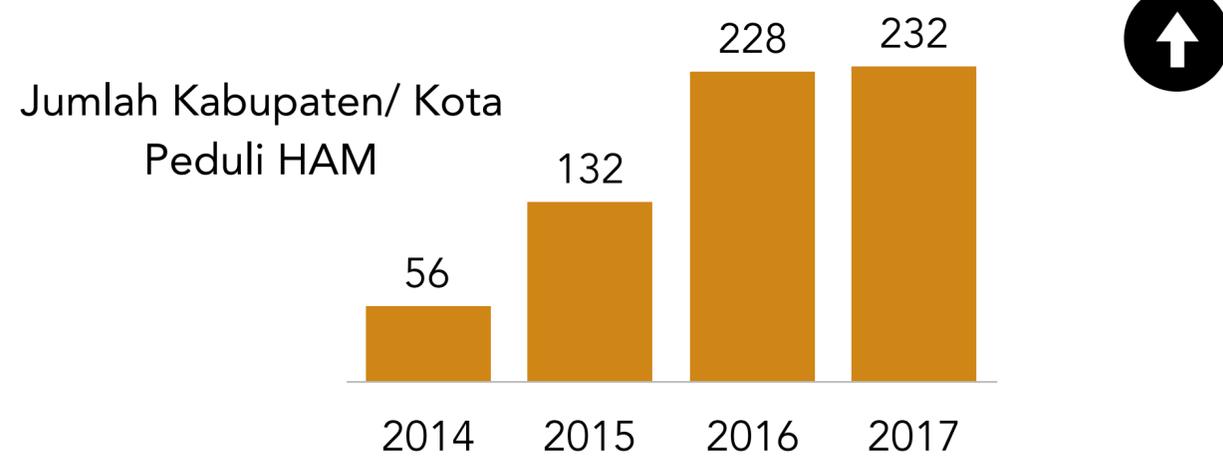
Ket:

- dalam jumlah orang
- data bantuan sampai per 31 Agustus 2018

Sumber: Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)

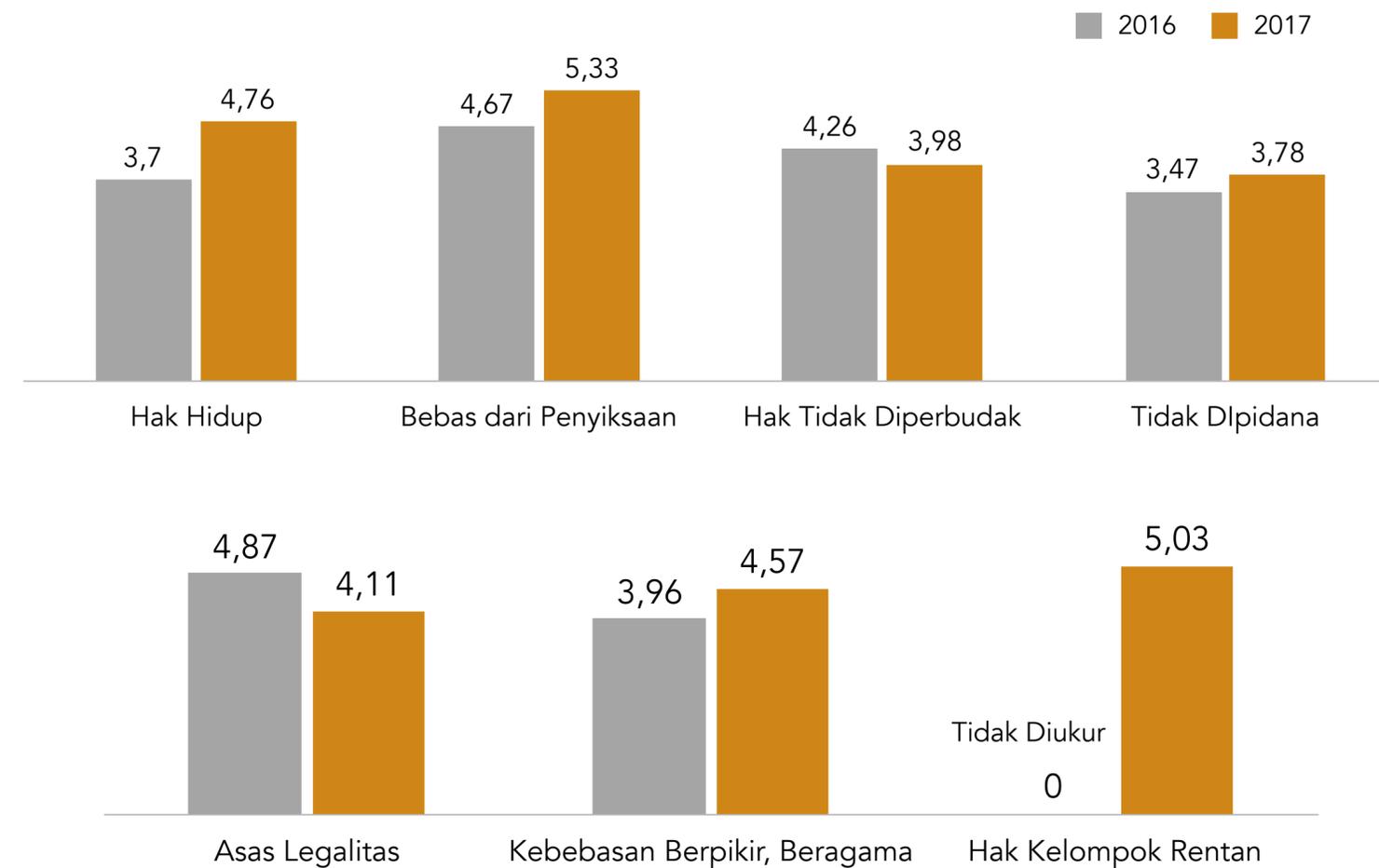
Pemenuhan Hak Asasi Manusia Terus Dibenahi

Program Kabupaten/Kota peduli HAM untuk memenuhi hak hidup warga semakin ditingkatkan.



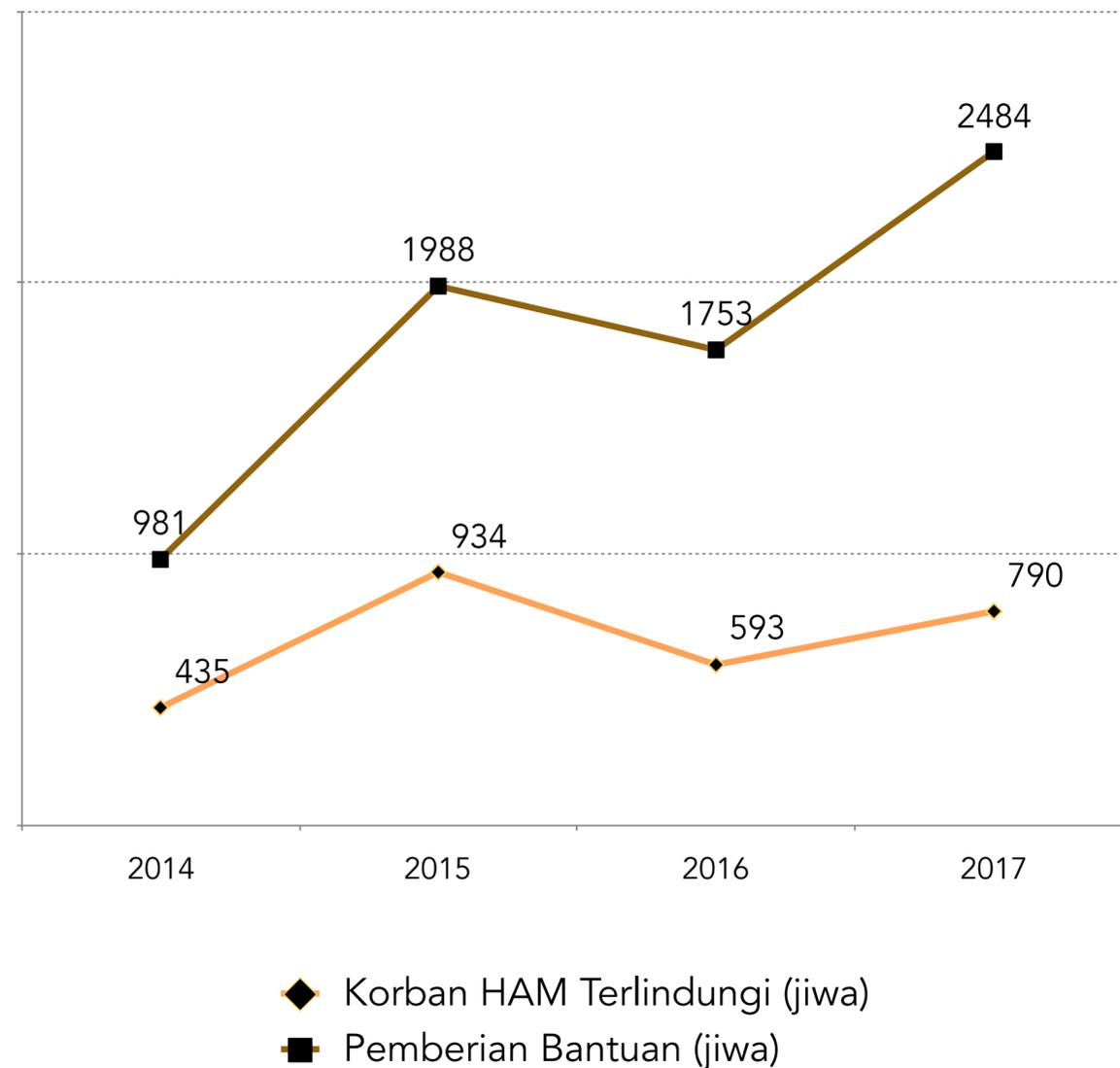
HAM dalam Indeks Negara Hukum

Pemerintah senantiasa berkomitmen meningkatkan pemenuhan HAM untuk menghadirkan keadilan.



Perlindungan HAM

Dalam konteks perlindungan HAM, Pemerintah memberikan perhatian bagi pemulihan korban pelanggaran HAM dan pelaksanaan RANHAM 2017.



Pelaksanaan RANHAM 2017 memberikan kemajuan dalam

Tersedianya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) baru dan pejabat struktural pemangku di 33 provinsi sebagai penunjang Sistem Peradilan Pidana Anak.

82% Anak Berhadapan Hukum (ABH) diselesaikan melalui diversifikasi.

Ketersediaan sarana dan prasarana ruang sidang anak di 160 satuan kerja di Pengadilan Negeri.

17 provinsi dan 180 kabupaten/kota memiliki program "bebas pasung".

17 provinsi telah memiliki kebijakan lokal untuk penanganan dan pelayanan kesehatan jiwa bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).



Stabilitas Pertahanan dan Keamanan yang Terjaga

Pemerintah terus meningkatkan rasa aman kepada warga negara dengan terus-menerus melakukan pemberantasan narkoba, deradikalisasi, pertahanan dan perlindungan terhadap korban kebencanaan.

Stabilitas pertahanan dan keamanan yang terjaga merupakan kunci terciptanya rasa aman bagi warga negara. Perlindungan terhadap warga dari bahaya penyalah-gunaan narkoba, ancaman terorisme dan radikalisme merupakan prioritas bagi Pemerintahan.

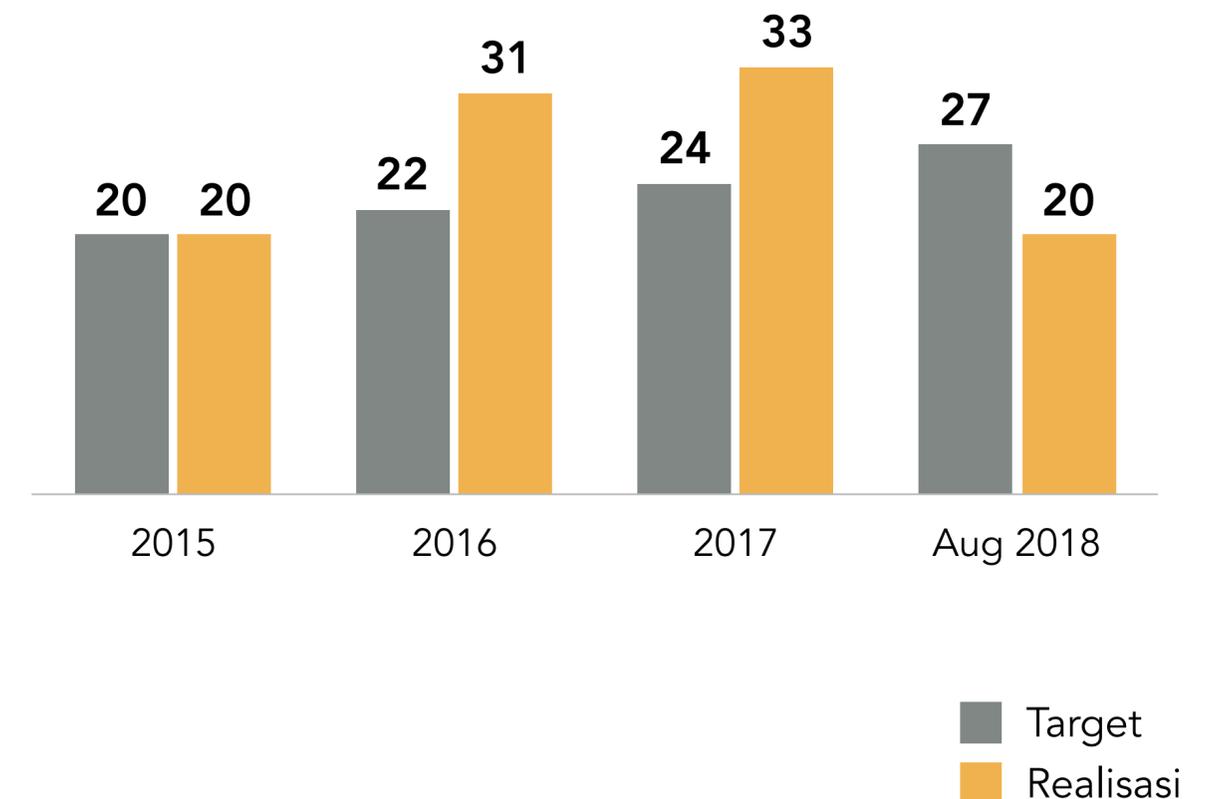
Sebagai negara yang berlokasi di area *ring of fire*, peningkatan kapasitas untuk penanggulangan bencana, mulai dari tahap tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi terus ditingkatkan.

Pendekatan *soft* yang dilakukan dalam menanggulangi terorisme dan radikalisme dianggap tepat dalam bersentuhan dengan kultur masyarakat Indonesia. Melalui program pencegahan dan penindakan, Pemerintah bekerja bersama dengan elemen masyarakat guna menciptakan rasa aman. Kesadaran masyarakat yang tinggi dalam mendukung Pemerintah menunjukkan bahwa keamanan kehidupan bermasyarakat diciptakan melalui budaya bermasyarakat yang saling menjaga. ■

Pemberantasan Narkoba

Pemerintah terus berupaya memutus mata rantai pemasok narkoba dan mata rantai pengguna.

Jumlah Jaringan Sindikat Kejahatan Narkoba yang Terungkap



Sumber: Badan Narkotika Nasional

Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme

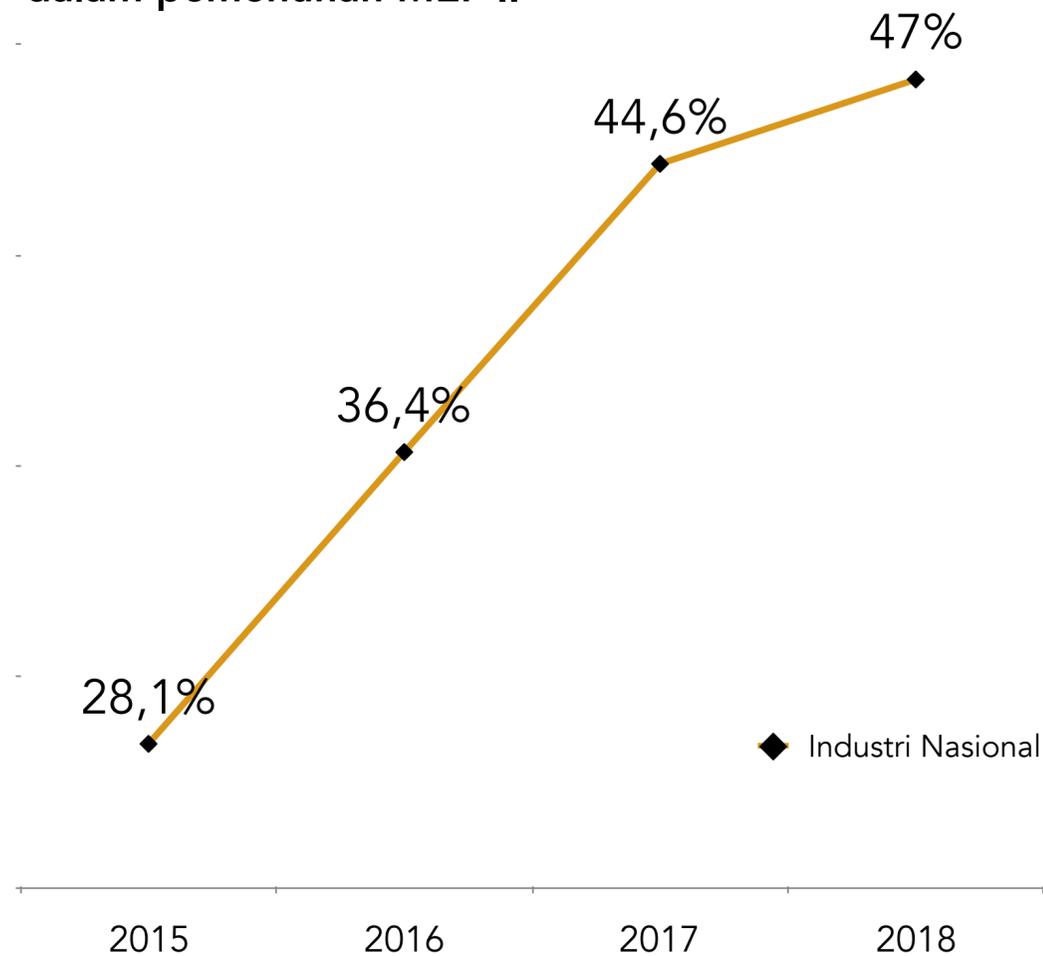
Dalam pemberantasan terorisme dan radikalisme: pencegahan, penindakan, dan deradikalisasi, merupakan tiga program yang menjadi komitmen Pemerintah untuk dijalankan secara simultan.



Kontribusi Industri Pertahanan Nasional

Pemerintah mewujudkan kemandirian pertahanan melalui pengembangan industri pertahanan nasional untuk pemenuhan *Minimum Essential Force (MEF) II*.

Persentase Industri Nasional dalam pemenuhan MEF II



Hasil Industri Pertahanan Nasional antara lain:



Pesawat udara CN235-220 *Maritime Patrol Aircraft* oleh PTDI



Helikopter serang AS555AP



Helikopter MBe Panther AKS Anti Kapal Selam oleh PTDI



Kapal KCR oleh PT PAL



Kapal Selam KRI Nagapasa oleh PT PAL

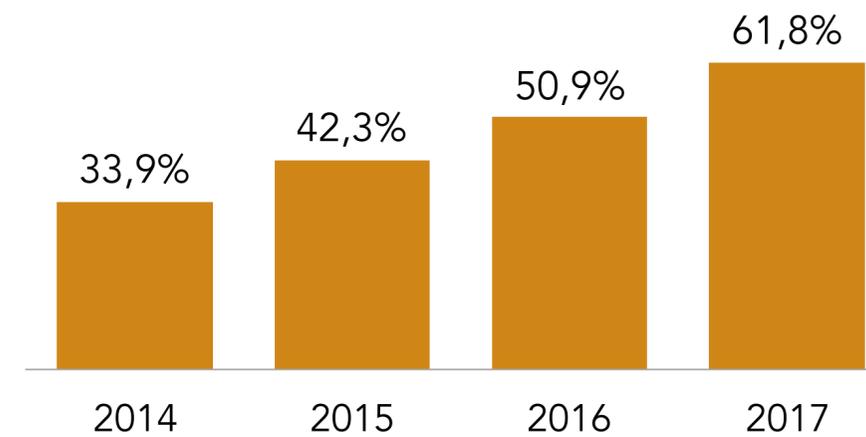


Medium Tank Pindad oleh PT Pindad

Perkembangan *Minimum Essential Force II*

Pemerintah terus melakukan upaya peningkatan Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) dalam rangka pemenuhan kekuatan minimum TNI atau *Minimum Essential Force* (MEF).


 Tingkat Pemenuhan
 Kekuatan Pokok
 Minimum II atau MEF II



Alutsista baru yang dipenuhi melalui pembelian antara lain:



Kapal Latih
Bima Suci



Helikopter
Apache



Pesawat Tempur
Sukhoi Su-35

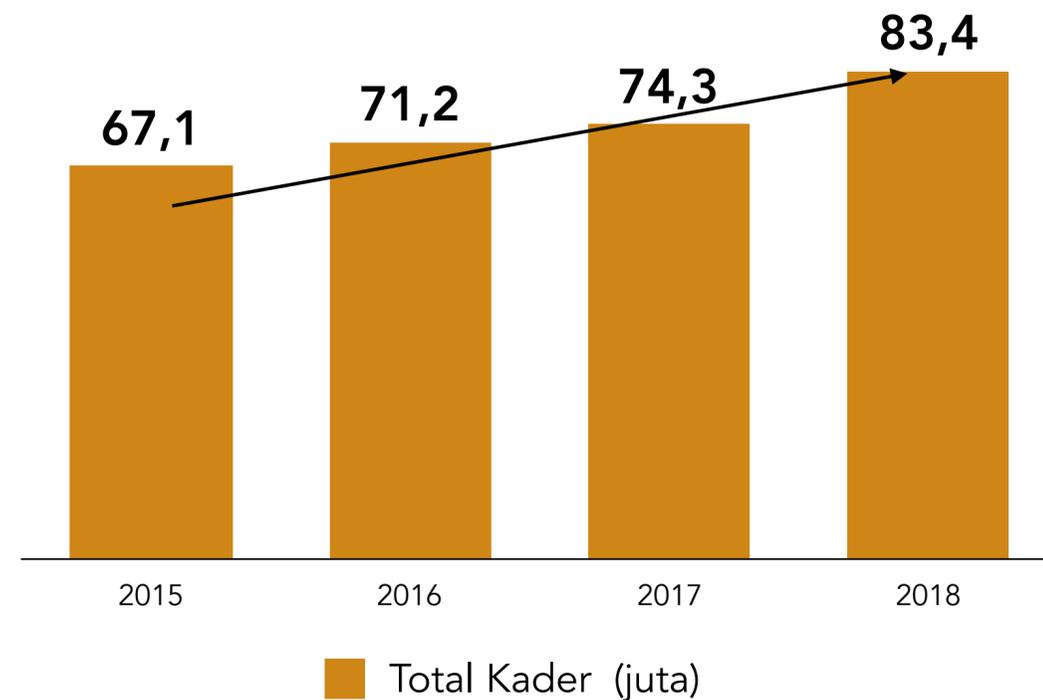


Tank MBT
Leopard 2

Bela Negara untuk Tanah Air

Sebagai perwujudan stabilitas keamanan dalam negeri dan pertahanan upaya pembentukan Kader Bela Negara menjadi penting.

Capaian Pembentukan Bela Negara



- ▶ Kader Bela Negara merupakan tumpuan untuk senantiasa menjaga nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan.
- ▶ Ditargetkan 100 (seratus) juta Kader Bela Negara dalam kurun waktu 10 tahun.



Tangguh Menanggulangi Kebencanaan

Negara hadir dengan cepat-tepat-efektif dengan proaktif melibatkan pemangku kepentingan, dan menempatkan penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses mewujudkan ketahanan (*resilience*) terhadap bencana.

Upaya Rehabilitasi-Rekonstruksi selama 2015 - Tahap II 2017

- Jalan - 1750 km
- 199 jembatan
- Bangunan Pengaman - 912 ruas
- Irigasi - 183 unit
- Bendungan - 18 unit
- Permukiman - 18949 unit rumah, 1097 paket PSU
- Puskesmas - 21 unit
- Perkantoran - 12 unit
- Sekolah - 15 unit
- Rumah Ibadah - 11 unit
- PLT Listrik - 6 titik

Kesiapsiagaan Pemerintah untuk Penanganan Bencana selama 2015 - 2018



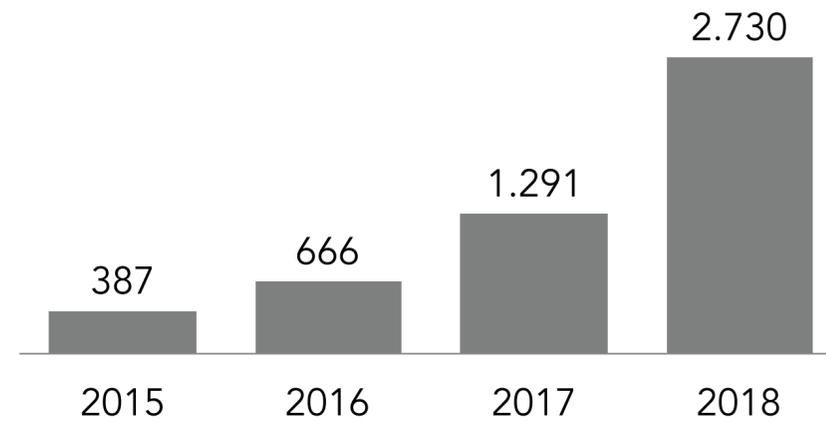
Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Mandiri Mengatasi Bencana

Pemerintah memfasilitasi penguatan kapasitas masyarakat dalam mengantisipasi, beradaptasi, dan memulihkan diri dari bencana melalui program Desa Tangguh Bencana.



Desa Tangguh
Bencana

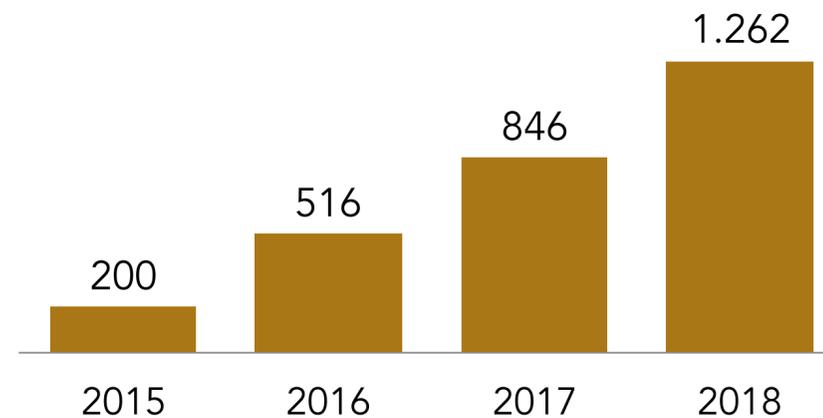


Sumber Daya/Anggaran

- APBN BNPB
- Penganggaran melalui APBD
- KKN tematik di Perguruan Tinggi
- Pemberdayaan Masyarakat oleh Dunia Usaha
- Pemanfaatan Anggaran Dana Desa (ADD)
- Sinergitas Program dengan K/L lain



Jumlah Fasilitator



Desa Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan memulihkan diri dengan cepat dari dampak bencana.



Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional

Pemerintah yang bersih, terbuka, dan melayani adalah kunci untuk menjalankan pembangunan manusia Indonesia menuju bangsa pemenang.

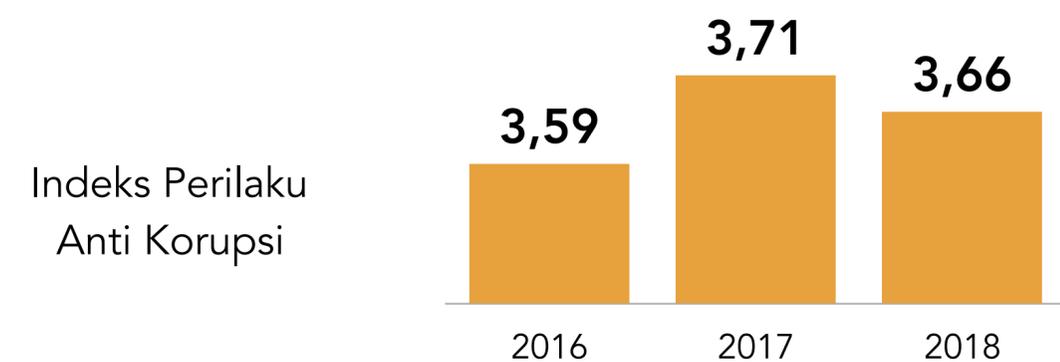
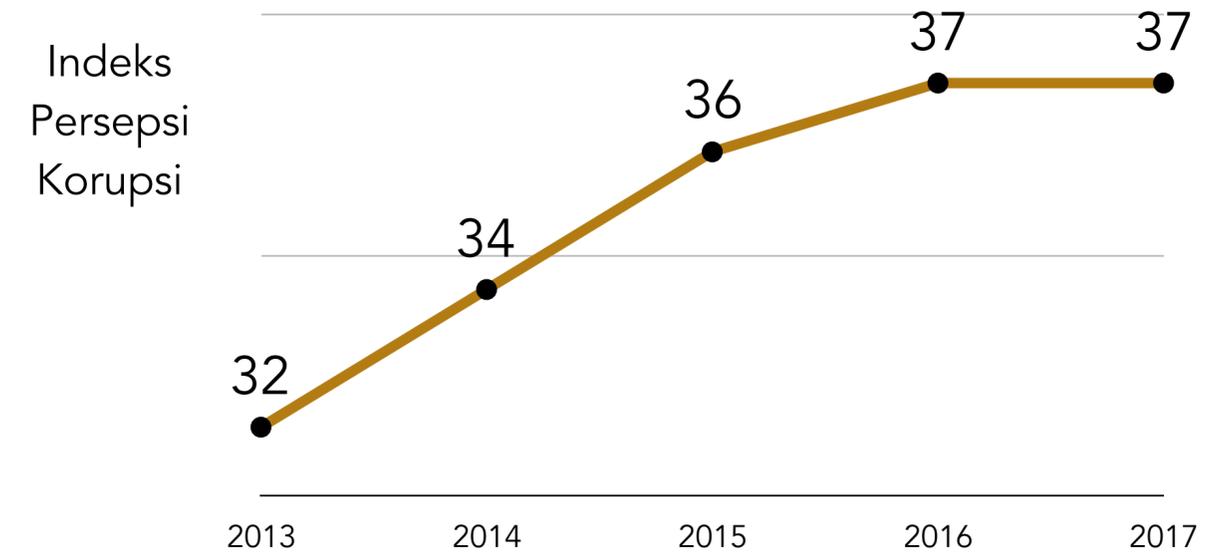
Kepercayaan terhadap Pemerintah adalah modal dasar pembangunan bangsa. Upaya menjaga kepercayaan ini terus ditingkatkan oleh Pemerintah antara lain dengan memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.

Upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terus diimbangi dengan upaya pencegahan korupsi, dan reformasi birokrasi yang bersandar pada pilar peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan akuntabilitas kinerja, pengendalian dan pengawasan internal, peningkatan efektivitas kelembagaan, serta pelibatan elemen masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Upaya ini akan terus dilakukan bukan hanya untuk mewujudkan Pemerintah profesional yang berdaya saing dan memiliki layanan publik yang berkualitas, tetapi juga untuk membawa Indonesia mampu bersaing dan memenangkan persaingan global. ■

Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Perilaku Anti Korupsi

Kendati masih terdapat banyak tantangan, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia masih terus menjadi perhatian serius Pemerintah.

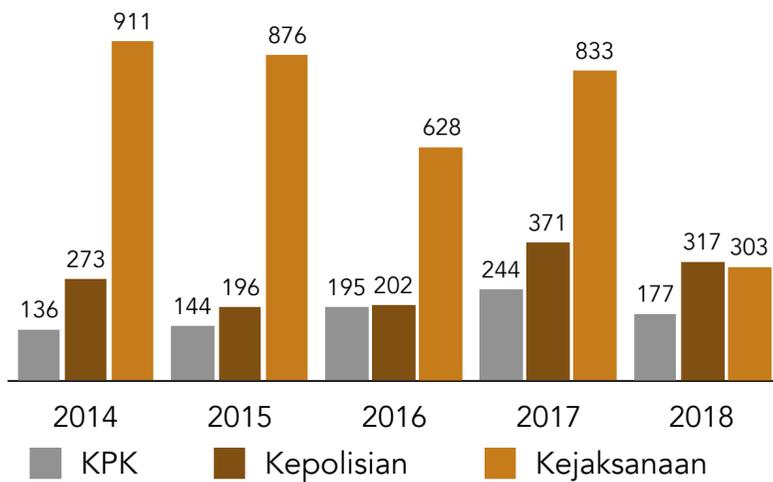


Sumber: Transparency International, BPS

Bersama Memberantas Korupsi

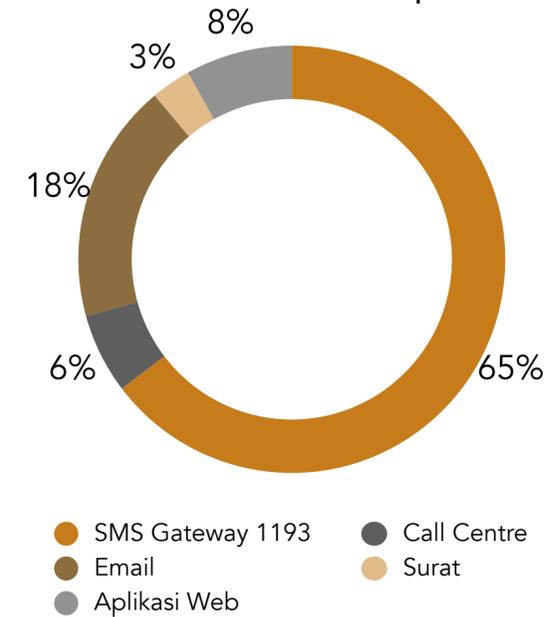
Pemerintah menunjukkan komitmen yang serius untuk memberantas korupsi melalui koordinasi intensif antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan.

Penindakan Tipikor



Koordinasi dan supervisi dalam penindakan korupsi terus ditingkatkan oleh KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Sejak 2014 hingga 2018, KPK telah melakukan proses hukum inkracht terhadap **362** terpidana korupsi. Penegakan hukum terus dilakukan untuk mewujudkan proses peradilan yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu.

Sapu Bersih Pungutan Liar



36.343 laporan/aduan pungutan liar

Satgas, UPP, K/L dan Daerah telah melaksanakan **5.070** kegiatan OTT dan tersangka sejumlah **8.290** orang di berbagai instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung RI, dan vampier di Pemerintahan seluruh Provinsi

Menyelamatkan Keuangan Negara

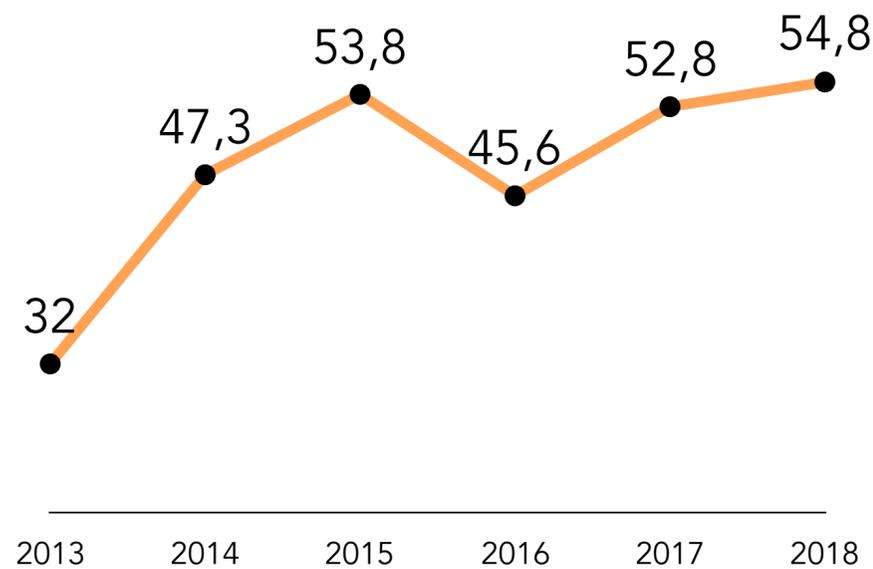


Sejak 2014 hingga 2018, Upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK telah berhasil menyelamatkan uang negara ± **Rp 1,5 Triliun**. Sejumlah aset juga disita dan dikembalikan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan negara.

Kinerja Birokrasi

Pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerja birokrasi yang terlihat dari beberapa indikator penting tata kelola pemerintahan.

Indeks Efektivitas Pemerintah (IEP)

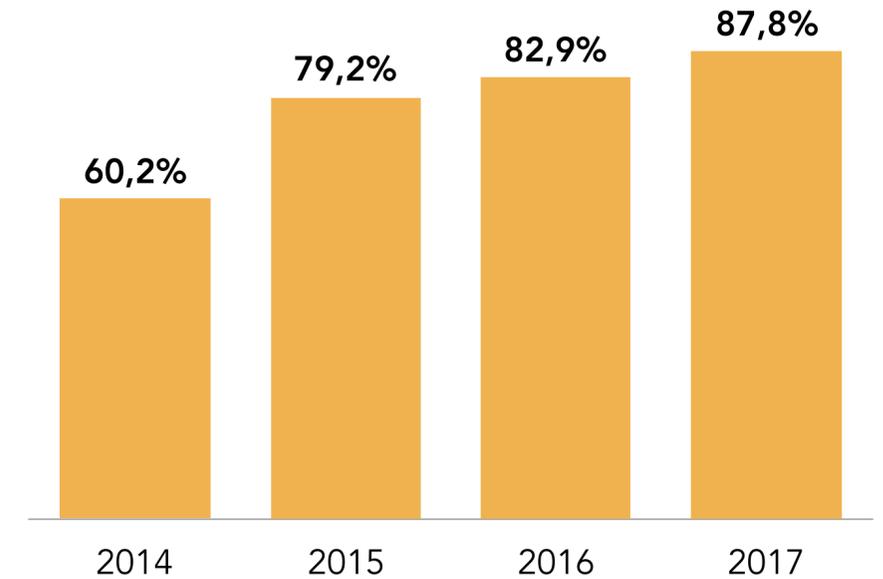


Skor Indeks Efektivitas Pemerintah (IEP) Indonesia Tahun 2017 menjadi skor tertinggi Indonesia sepanjang sejarah.

Program reformasi birokrasi terus dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, akuntabel, dan memiliki layanan prima.

Persentase Instansi Pemerintah (K/L) dengan Kategori Akuntabilitas Kinerja Baik (Kategori "B" keatas)

Kategori Akuntabilitas Kinerja Pemerintah



Nilai efisiensi anggaran dampak dari peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah tahun 2017 adalah sebesar ± Rp 41,15 Triliun

Perbaikan Tata Kelola Penerimaan ASN

Pemerintah melakukan pembenahan mendasar penerimaan ASN melalui seleksi berbasis tes komputer yang menjamin akuntabilitas dan transparansi serta distribusi ASN yang lebih merata.

Distribusi ASN yang lebih merata



6.296 GGD

Guru Garis Depan
Kemendikbud



6.058 THL

Tenaga Harian Lepas – Tenaga Bantu
Pertanian, Kementan



43.243 PTT

Pegawai Tidak Tetap Dokter,
Dokter Gigi dan Bidan, Kemenkes



495 Kab/Kota terpecil

Pengangkatan Guru Garis Depan, Tenaga
Harian Lepas Pertanian, dan Tenaga
Kesehatan Pegawai Tidak Tetap

Rekrutmen ASN berbasis Merit

Total Formasi Tahun 2017

37.138

Calon PNS

1.684

CALON HAKIM MA

14.000

PENJAGA LAPAS

3.526

PETUGAS IMIGRASI &
JABATAN LAIN DI
KUMHAM

17.928

JABATAN LAINNYA

Sistem rekrutmen CPNS
dengan menggunakan
Computer Assisted Test.

Total
Pelamar

2.433.656

34.926

Rekrutmen
Reguler

1.850

Lulusan Pa/i
Terbaik

166

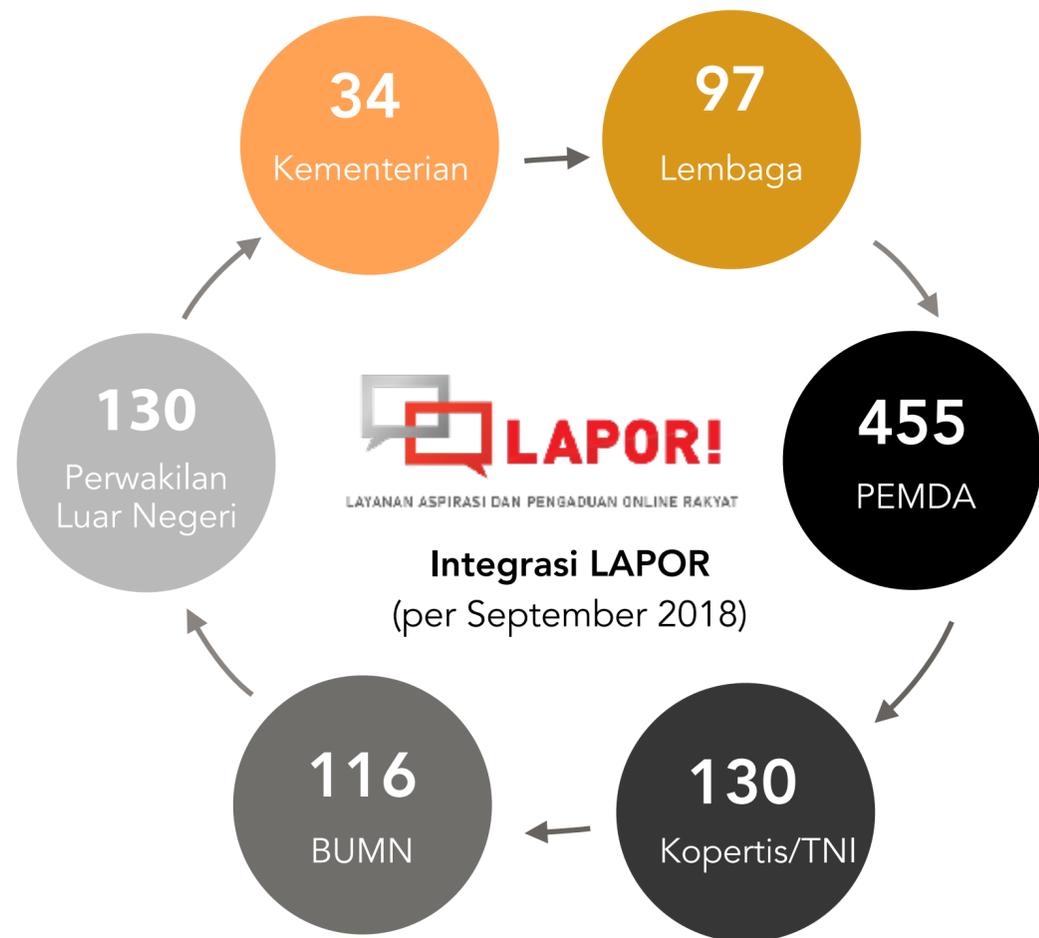
Penyandang
Disabilitas

196

Pa/i Papua &
Papua Barat

Menuju Pelayanan Publik yang Berkualitas

Komitmen Pemerintah untuk menghadirkan negara diwujudkan dengan perluasan akses layanan dan peningkatan kualitas layanan publik.



 **1.392.982**
Laporan hingga September 2018

 **574**
Rata-rata laporan per hari

 **760.751**
User Aktif

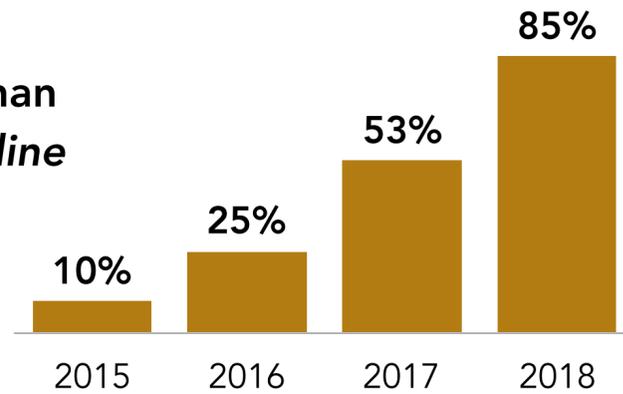


Pertama kalinya Indonesia meraih penghargaan tingkat dunia dari PBB bidang layanan publik (UN Public Service Award) Tahun 2018 di Maroko, terkait inovasi sistem *Early Detection and Treatment (EDAT)* malaria di Kabupaten Teluk Bintuni.

Meningkatkan Pelayanan Lalu Lintas

Mengurus SIM dan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat *Online* menjadi lebih mudah, cepat, dan bebas pungli.

Pelayanan SIM Online

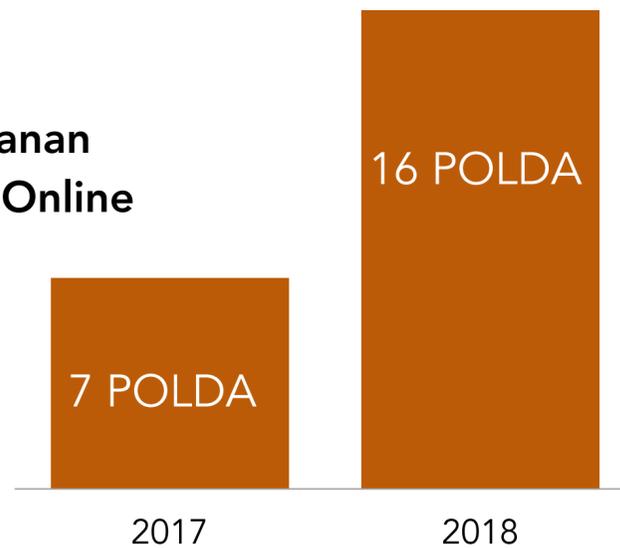


Hingga 2018, sudah 85% POLDA menyediakan pelayanan SIM online



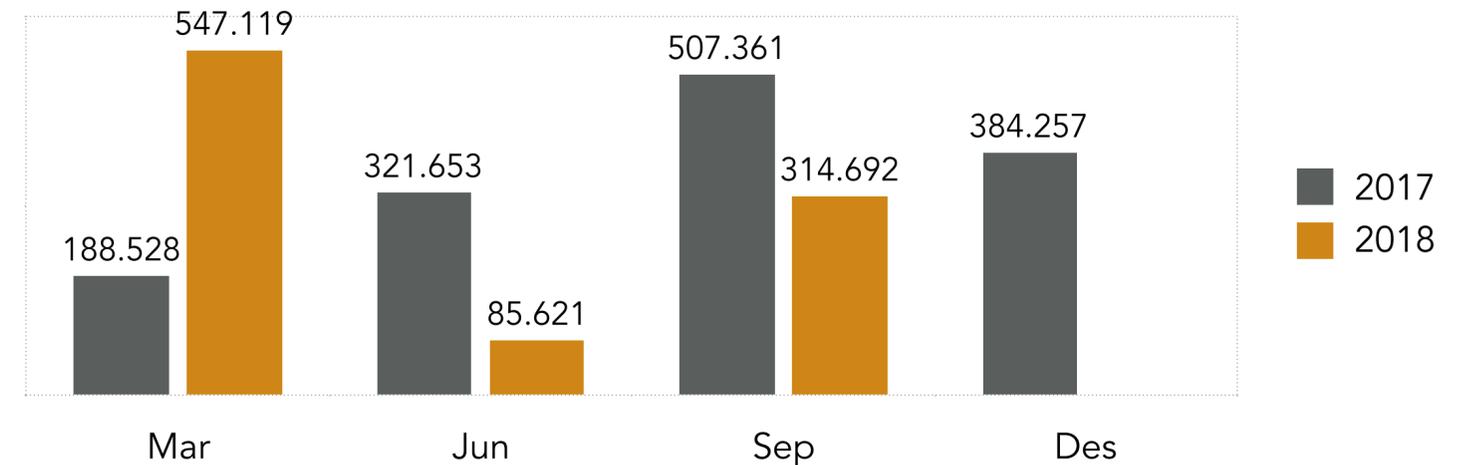
Pembuatan SIM dapat dilakukan secara *online* melalui website <http://sim.korlantas.polri.go.id/>

Pelayanan Samsat Online



Hingga 2018, sudah 16 POLDA menyediakan pelayanan Samsat *online*

Penindakan Tilang



Peningkatan Pelayanan Mudik 2018

Pemerintah meningkatkan pelayanan arus mudik lebaran sehingga lebih lancar, selamat, dan aman.



Panjang Jalur Mudik Lintas Utara Jakarta-Surabaya

Jalan Non Tol ; 787 km
Jalan Tol : 759 km



Tingkat Kecelakaan

Jumlah kecelakaan dan korban jiwa turun 37%



Pengguna Sepeda Motor

2017: 1.658.407
2018: 1.297.617
turun 22%



Kecepatan Rata-Rata

Arus Mudik	Arus Balik
2017: 66 km/jam	2017: 64 km/jam
2018: 72 km/jam	2018: 79 km/jam



Waktu Tempuh

Berkurangnya waktu tempuh Jakarta-Surabaya sebesar 6 jam



Mudik Gratis

Penumpang naik 64%
2017: 185.389
2018: 303.429



Bagian V

**Pemajuan Kebudayaan dan
Prestasi Bangsa**

Pemajuan Budaya Kewirausahaan

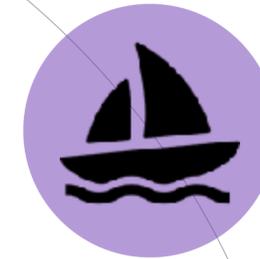
- Rasio Wirausaha
- Budaya Wirausaha



Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Bangsa

Pemajuan Budaya Maritim

- Penanaman Nilai-nilai Kemaritiman
- Pariwisata Maritim



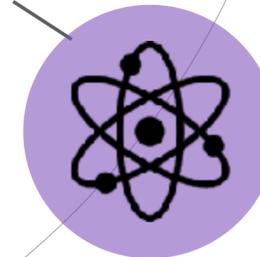
Prestasi Bidang Olahraga

- Kesuksesan Asian Games dan Asian Para Games 2018
- Prestasi Asian Games dan Asian Para Games 2018
- Kualitas Prajurit TNI-AD



Prestasi Sains dan Teknologi

- Perkembangan Sains dan Teknologi
- Prestasi Internasional Bibit Unggul





Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Bangsa

Kebudayaan sejatinya adalah haluan pembangunan nasional. Sebagai negara bangsa, Pancasila adalah fondasi dan perekat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keragaman budaya dan Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia. Kesadaran sebagai bangsa maritim besar yang dibangun di atas keragaman budaya, agama, bahasa, etnis, dan suku bangsa yang direkatkan oleh Pancasila adalah kunci untuk bertahan di tengah persaingan megatren peradaban dunia. Hal tersebut tentunya harus didukung secara penuh oleh seluruh elemen bangsa.

Merupakan tanggung jawab Pemerintah untuk mengorkestrasi upaya membangkitkan optimisme yang mampu menggugah rasa nasionalisme dan kebanggaan menjadi Indonesia.

Oleh karena itu, Pemerintah selama empat tahun terus berjuang untuk membangun budaya dan karakter manusia Indonesia yang memiliki mentalitas juara melalui pembangunan di berbagai bidang di antaranya bidang kebudayaan, pendidikan, olahraga, dan seni. ■

Pemajuan Budaya

Pertama kalinya Indonesia memiliki UU Pemajuan Kebudayaan No. 5/2017 yang menjadi arah pemajuan kebudayaan nasional dan bertujuan untuk memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa.



Sejak periode 2015-2018 Pemerintah telah mengeluarkan 12 Peraturan Presiden yang sejalan dengan pemajuan kebudayaan, di antaranya:

- Perpres 46/2017 Badan Otorita Pengelola Pariwisata Borobudur,
- Perpres 87/2017 Penguatan Pendidikan Karakter,
- Perpres 95/2017 Penguatan Prestasi Olahraga Nasional,
- Perpres 38/2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional,
- Perpres 65/2018 tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Budaya.

Penetapan Warisan Budaya Takbenda

Pemerintah menunjukkan komitmen nyata untuk melindungi tradisi budaya yang diwariskan secara turun-temurun melalui penetapan warisan budaya takbenda.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan:

- Ditetapkan **255** Warisan Budaya Takbenda dalam Acara Apresiasi Warisan Budaya Takbenda Tahun 2018

- Telah diserahkan sertifikat penghargaan kepada **30 provinsi** yang karya budayanya telah ditetapkan menjadi Warisan Budaya Takbenda Indonesia

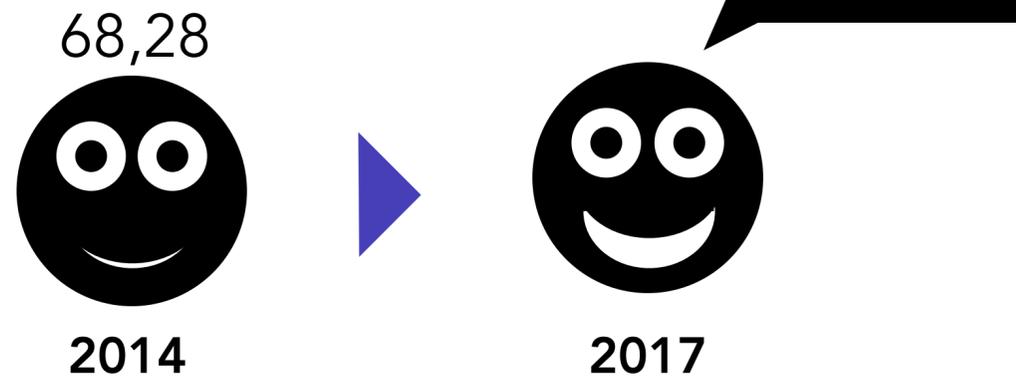
- Dengan penetapan ini, Indonesia memiliki **819** Warisan Budaya Takbenda dari **8.065** karya budaya.

*Warisan Budaya Tak Benda adalah seluruh hasil perbuatan dan pemikiran yang terwujud dalam identitas, ideologi, mitologi, ungkapan konkret dalam bentuk suara, gerak maupun gagasan yang termuat dalam benda, kemudian juga sistem perilaku, sistem kepercayaan dan adat istiadat.

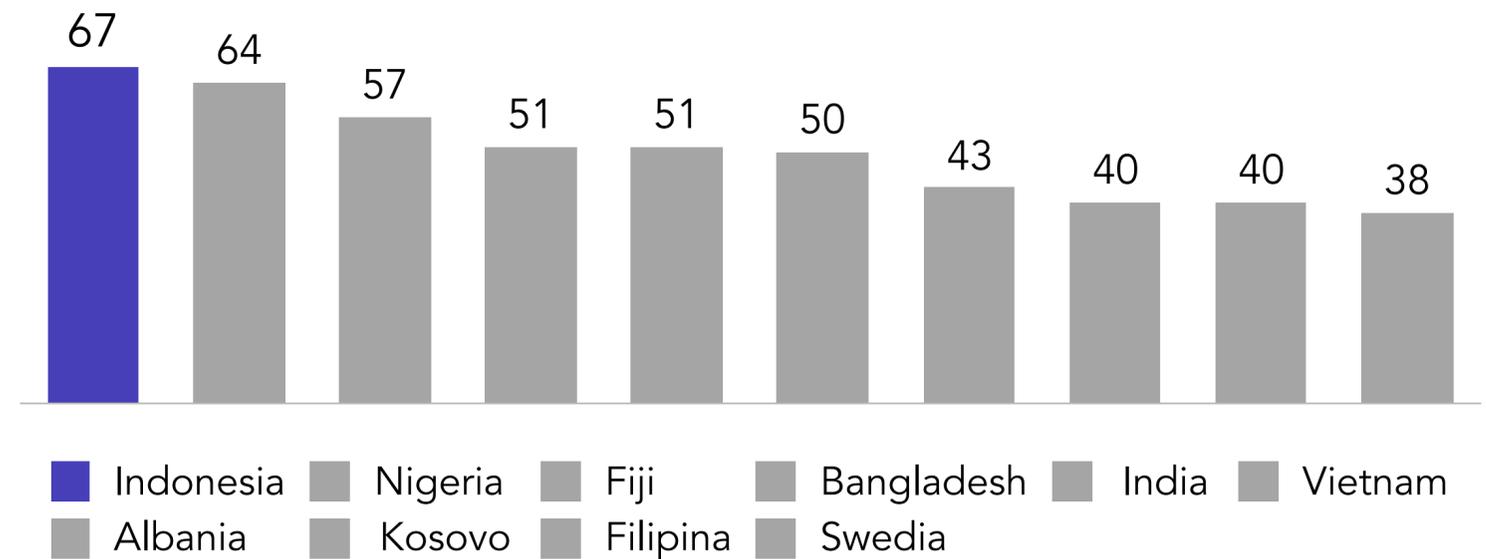
Bangsa Besar Menuju Bangsa Pemenang

Optimisme dan semangat juang adalah modal dasar untuk pencapaian prestasi bangsa.

Indeks Kebahagiaan Masyarakat Indonesia



Indeks Optimisme Bangsa di Dunia



Optimis Sejak Dini

Kedua Indeks ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki pandangan positif, semangat juang, dan optimisme terhadap masa depannya. Hal ini mengindikasikan sekaligus modal untuk menjadi **bangsa bermental juara**.



Pemajuan Budaya Maritim

Budaya maritim adalah salah satu komponen utama pembentuk peradaban maritim. Laut adalah jembatan pemersatu. Laut adalah masa depan Indonesia.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah menjadikan maritim sebagai bagian dari kebudayaan Indonesia.

Keterbukaan terhadap perubahan, semangat pantang menyerah, dan bekerja keras adalah corak kebudayaan maritim yang menjadi karakter manusia Indonesia.

Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk terus memajukan budaya maritim melalui sektor pendidikan, ekonomi, dan pariwisata. ■

Penanaman Nilai-nilai Kemaritiman

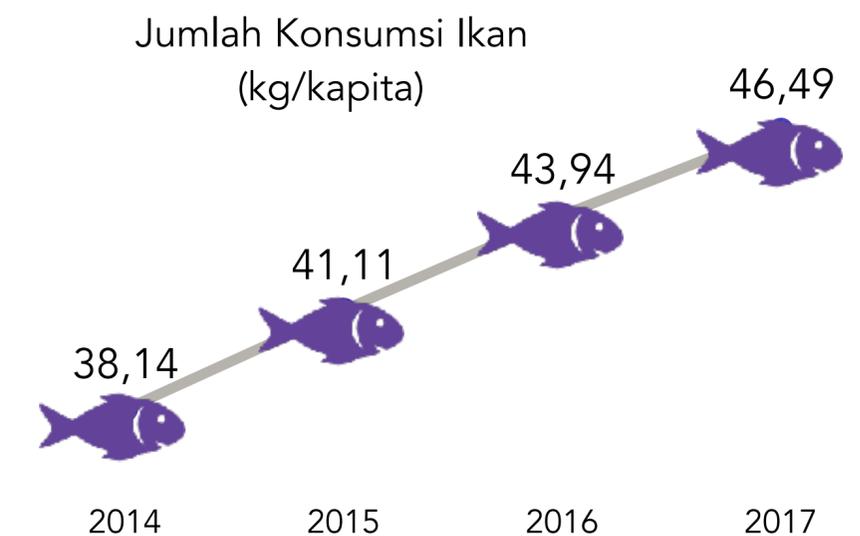
Pemerintah terus berupaya menanamkan nilai-nilai kemaritiman melalui pendidikan formal serta mempromosikan budaya makan ikan.



Implementasi Kurikulum Maritim di 12 Kabupaten/Kota

- ▶ Kota Sabang
- ▶ Kota Bengkulu
- ▶ Kab. Pandeglang
- ▶ DKI Jakarta
- ▶ Kota Cirebon
- ▶ Kota Ambon
- ▶ Kota Surabaya
- ▶ Kota Tarakan
- ▶ Kab. Pangkep
- ▶ Kab. Lombok Barat
- ▶ Kab. Sikka
- ▶ Kab. Raja Ampat

Ikan makin digemari masyarakat, konsumsi ikan terus meningkat



Pengembalian Peradaban Maritim

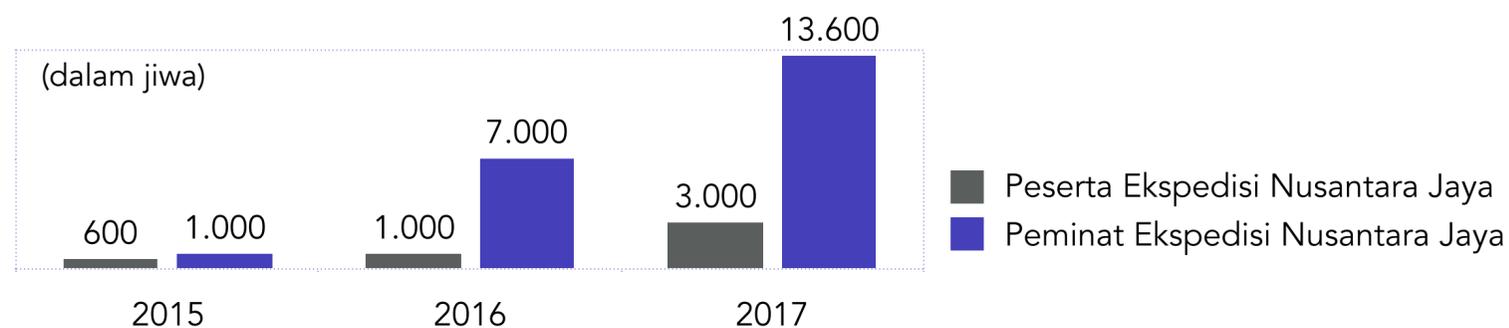
Pemerintah terus berupaya mengembalikan peradaban maritim sehingga menciptakan konektivitas kultur di kepulauan Indonesia

Festival Pariwisata Pesisir Unggulan



Destinasi wisata unggulan pesisir antara lain: Mandalika, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Wakatobi, dan Mandeh.

Event kelas dunia diselenggarakan antara lain: Sail Sabang, Sail Moyo Tambora, dan Sail Tomini.



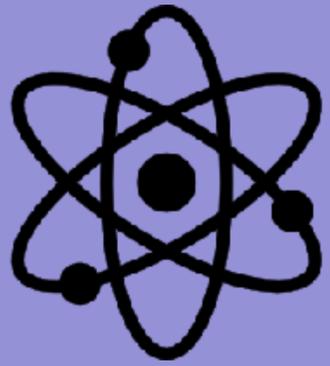
Penghargaan Dunia terhadap Budaya Maritim Indonesia



Pada Desember 2017, Seni Pembuatan Perahu Phinisi di Sulawesi Selatan resmi ditetapkan ke dalam Warisan Budaya Takbenda UNESCO.



Tradisi yang berasal dari Kabupaten Bulukumba ini adalah warisan perekat dan penjaga adat istiadat yang pengerjaannya dilakukan secara gotong royong.



Prestasi Bidang Sains dan Teknologi

Indonesia terus mengukir prestasi di bidang sains dan teknologi dengan peraih berbagai penghargaan di tingkat internasional.

Pendidikan adalah kunci untuk membangun kualitas manusia Indonesia. Di tangan generasi muda, sains dan teknologi adalah instrumen untuk memberikan solusi bagi permasalahan bangsa, meningkatkan produktivitas, serta berkontribusi terhadap pemajuan ilmu pengetahuan.

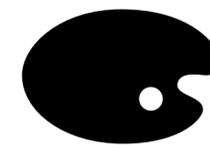
Oleh karena itu, pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan menjadi fokus utama pembangunan di bidang pendidikan. Pemerintah akan terus mendukung para ilmuwan muda ini agar bangsa ini siap menghadapi persaingan masa depan. ■

Perkembangan Sains dan Teknologi Nasional

Menuju 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045. Masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda yang menguasai sains dan teknologi.



Hasil Penelitian BOPTN (dari 2015- 2017):



126
Desain



2.333
Hak Kekayaan
Intelektual



2.004
Teknologi Tepat
Guna



970
Prototipe

Perolehan Medali di Kancah Internasional

Setiap tahun siswa bibit unggul dari berbagai daerah di Indonesia selalu konsisten menunjukkan prestasi dalam berbagai kompetisi Internasional.

Total Perolehan Medali (Emas, Perak, Perunggu)
Lomba Internasional Tingkat SD Tahun 2014-2018



Total Perolehan Medali (Emas, Perak, Perunggu)
Lomba Internasional Tingkat SMP Tahun 2014-2017



1 Kategori *Earth System Project* (Olimpiade Sains Internasional (IESO) Prancis)



1 Kategori *Life Science Olimpiade Science Internasional* (25th ICYS 2018) Serbia



2 Kategori Fisika Biologi Kimia *International Junior Science Olympiad (IJSO)* Belanda



Prestasi Bidang Olahraga

Membangun mentalitas juara di dalam diri setiap manusia akan terus dilakukan, guna memupuk kebanggaan sebagai sebuah bangsa besar.

Olahraga adalah perjuangan lintas batas kemanusiaan. Segala perbedaan dikesampingkan dan menyatu dalam keuletan gerak, cucuran peluh, serta keindahan cipta rasa karsa manusia di berbagai media.

Para atlet Indonesia adalah orang pilihan yang telah mencurahkan hidupnya untuk mengharumkan nama bangsa, bagaimanapun kondisi fisik tubuhnya.

Prestasi olahraga hanya dapat dicapai dengan daya juang, penundaan kesenangan, serta latihan yang konsisten dan fokus. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung perjuangan mereka. ■

Kesuksesan Penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games 2018



Upacara Pembukaan dan Penutupan Asian Games 2018 berlangsung spektakuler, menggugah, dan berhasil merepresentasikan Indonesia sebagai Energy of Asia!

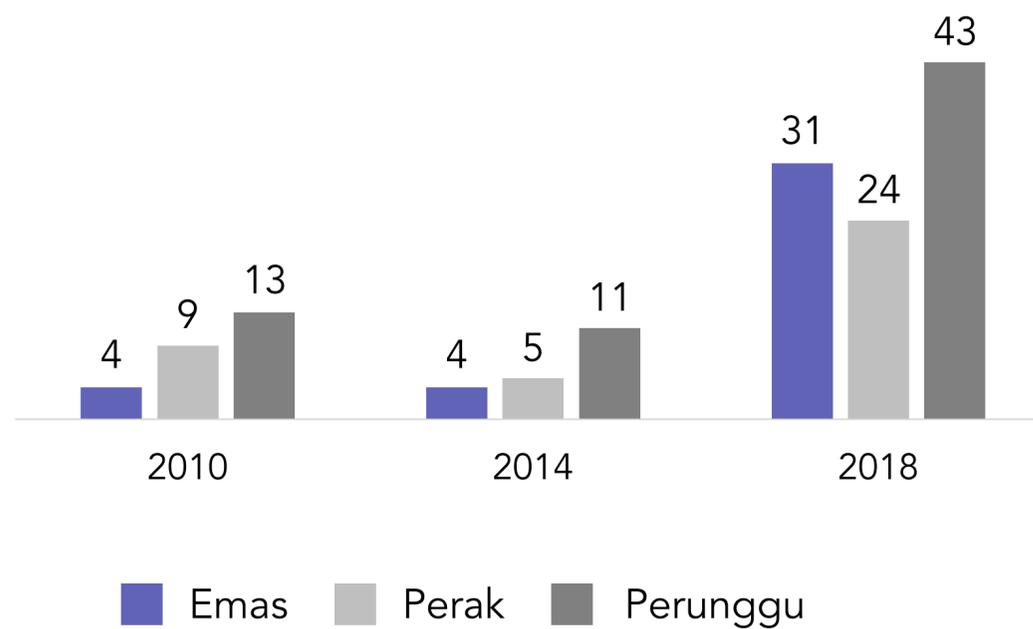


Di mata dunia Asian Para Games 2018 dengan tema *ability* berhasil memukau dan menjadi inspirasi.

Prestasi Asian Games 2018

Prestasi adalah buah dari perjuangan tanpa henti dan proses yang amat panjang. Membangun mentalitas juara di dalam diri setiap manusia Indonesia akan terus dilakukan, guna memupuk kebanggaan sebagai bangsa besar. Siapa kita, Indonesia!

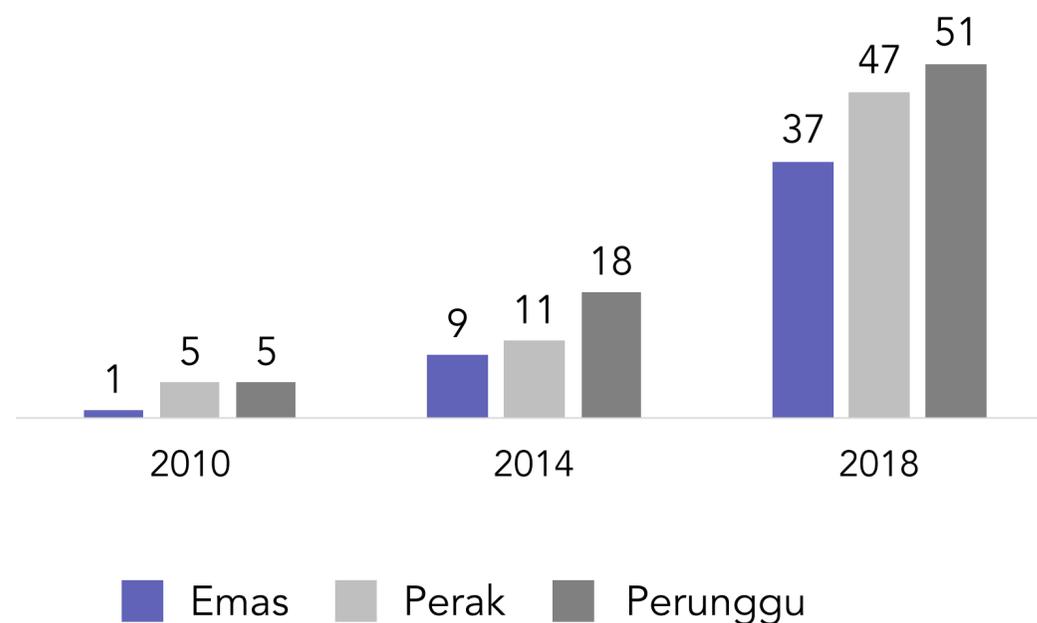
Perolehan medali tertinggi Indonesia dalam sejarah keikutsertaan Indonesia di ajang **Asian Games**



Prestasi Asian Para Games 2018

Dengan semangat tinggi, kerja keras, pantang menyerah, dan dukungan dari semua pihak, para atlet Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan menempati peringkat ke-5 di Asian Para Games 2018.

Prestasi atlet di **Asian Para Games 2018** adalah capaian yang terbaik sepanjang sejarah keikutsertaan Indonesia pada ajang olahraga tersebut.

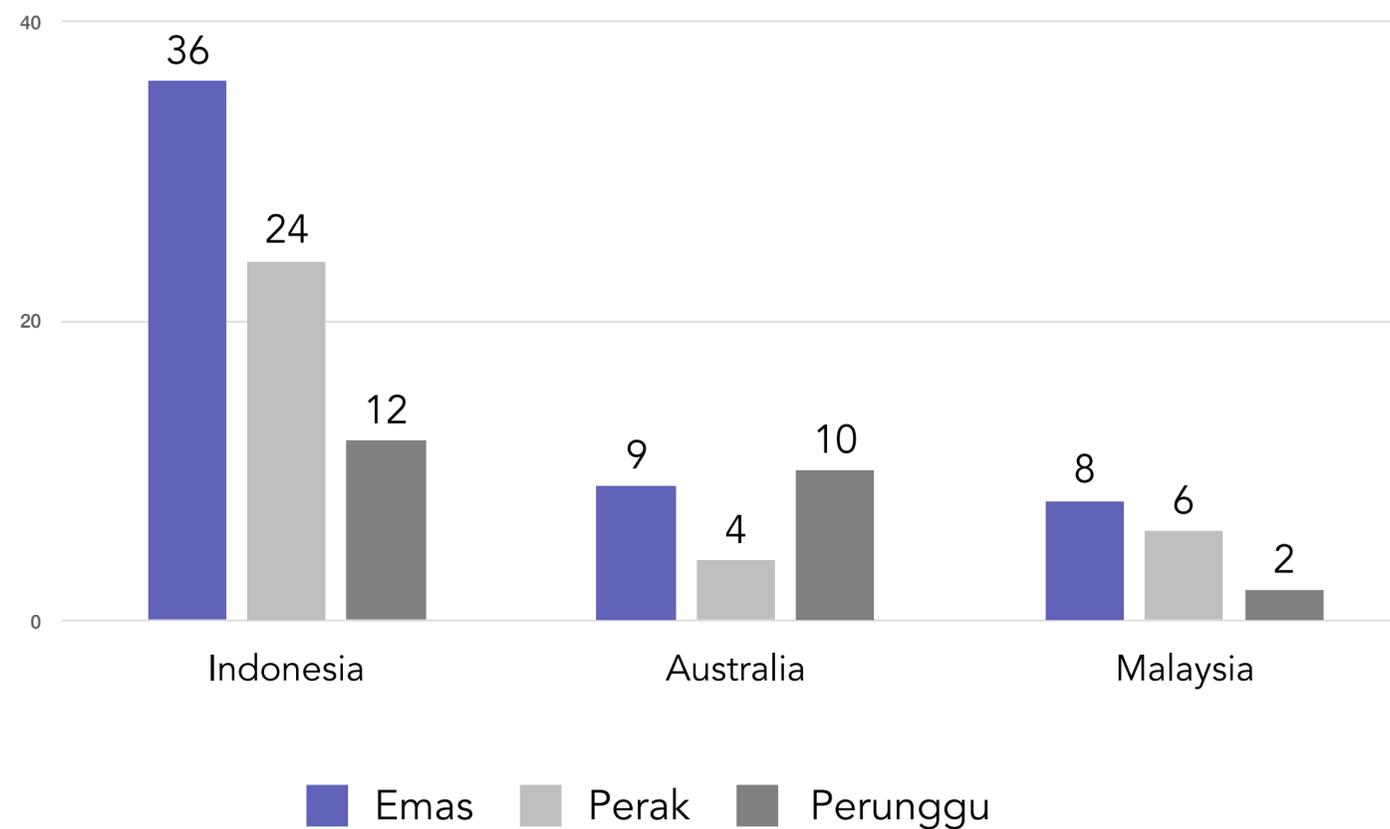


Berhasil menghadirkan peserta terbanyak dari 43 negara dan 2762 peserta

Kualitas Prajurit TNI-Angkatan Darat di Mata Dunia

Pembuktian kepada dunia bahwa prajurit dan satuan TNI-AD Indonesia memiliki ketangguhan, profesionalisme tinggi dan daya saing yang kuat.

Perolehan Emas, Perak, Perunggu



Anggota tim menembak TNI AD menjuarai kompetisi menembak pada Australian Army Skill-At-Arms Meeting (AASAM) 2018 di Australia



Budaya Kewirausahaan

Membangun ekonomi yang berdiri di atas kaki sendiri, dimulai dengan mentalitas berwirausaha. Selain menciptakan lapangan pekerjaan baru, wirausaha adalah salah satu jalan untuk meningkatkan produktivitas bangsa.

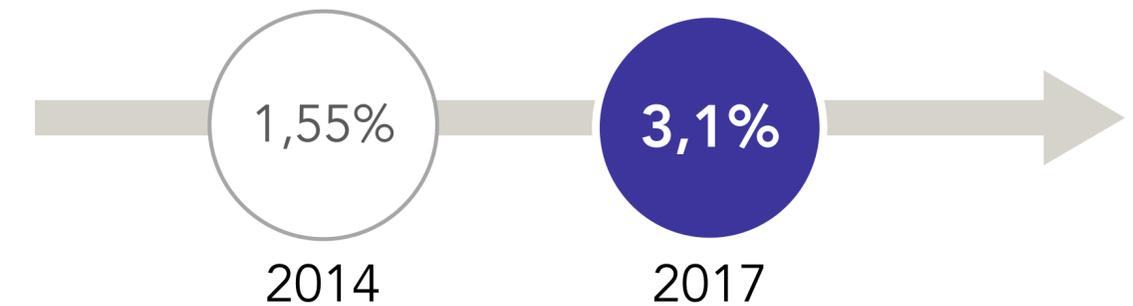
Ekonomi adalah urat nadi pembangunan. Perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama berlandaskan asas kekeluargaan, dengan koperasi sebagai tiang penopang utamanya. Kontribusi ekonomi lokal terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang semakin meningkat adalah prasyarat dasar untuk semakin kokoh menghadapi ketidakpastian global.

Hal ini dilakukan dengan berbagai kebijakan antara lain memberi pemudahan akses kredit, peningkatan penggunaan produk lokal dalam pengadaan barang jasa, serta berkembangnya *e-commerce* dan inkubasi ekonomi kreatif. ■

Rasio Wirausaha Meningkat Pesat

Pemerintah terus konsisten mendukung wirausaha lokal sehingga rasio wirausaha meningkat dari tahun ke tahun.

Rasio Wirausaha dari Populasi

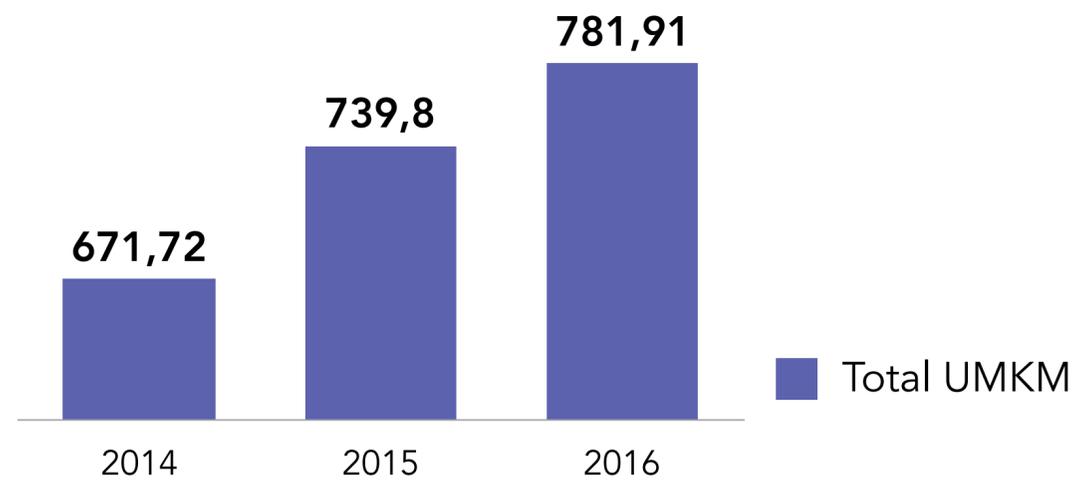


Peningkatan ini didukung oleh sektor perbankan, terutama dalam akses permodalan UMKM yang semakin meningkat.

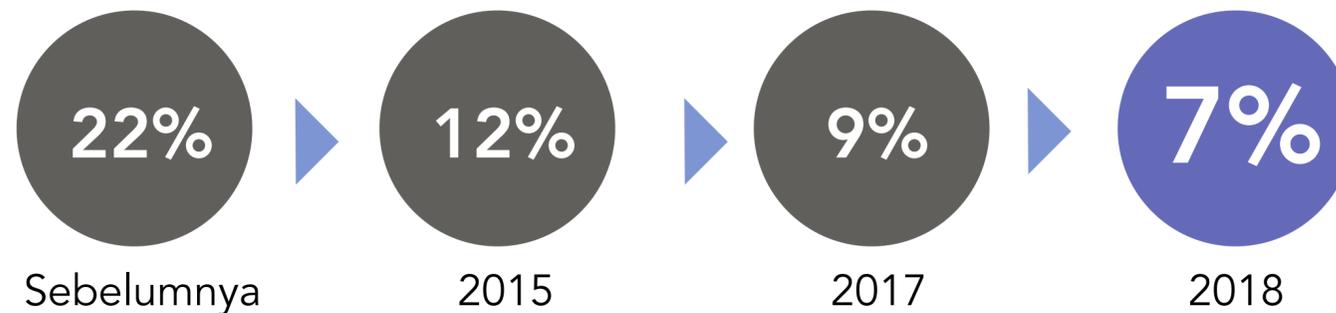
Membangun Budaya Wirausaha

Membangun ekonomi yang berdiri di atas kaki sendiri, dimulai dengan mentalitas berwirausaha. Selain menciptakan lapangan pekerjaan baru, wirausaha adalah salah satu jalan untuk meningkatkan produktivitas bangsa.

Proporsi Kredit UMKM Terhadap Total Kredit (Triliun Rupiah)



Suku Bunga KUR turun dari 9% menjadi 7% di tahun 2018



Kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari **1,71%** di tahun 2014 menjadi **4,48%** di tahun 2017.

E M P A T T A H U N

Kerja Kita

Prestasi Bangsa